

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	14 Juni 2002	Periode pemecahan Sertifikat Bukti HMETD	1 - 4 Juli 2002
Tanggal efektif	14 Juni 2002	Periode perdagangan HMETD	2 - 8 Juli 2002
Tanggal terakhir perdagangan saham dengan Hak (Cum) - Pasar Reguler & Pasar Negosiasi	21 Juni 2002	Tanggal pencatatan saham di Bursa Efek Jakarta	2 Juli 2002
Tanggal awal perdagangan saham tanpa hak (Ex) - Pasar Reguler & Pasar Negosiasi	24 Juni 2002	Periode pelaksanaan HMETD	2 - 9 Juli 2002
Tanggal terakhir perdagangan saham dengan hak (Cum) - Pasar Tunai	27 Juni 2002	Periode distribusi saham	9 - 16 Juli 2002
Tanggal awal perdagangan saham tanpa hak (Ex) - Pasar Tunai	28 Juni 2002	Tanggal terakhir pembayaran pemesanan tambahan	10 Juli 2002
Tanggal terakhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD	27 Juni 2002	Tanggal penajahan	12 Juli 2002
Periode distribusi HMETD	28 Juni-1 Juli 2002	Tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian saham tambahan	16 Juli 2002

BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BANK NISP Tbk BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



BANK NISP

PT BANK NISP Tbk

BIDANG USAHA : JASA PERBANKAN

Berkedudukan di Bandung, Indonesia

TOTAL JARINGAN : 85 KANTOR

KANTOR PUSAT

Jalan Taman Cibeunying Selatan No. 31, Bandung 40114
Tel : (022) 715-9888 (hunting)
Fax : (022) 710-0466, 727-4268

KANTOR JAKARTA

Jalan Gunung Sahari No. 38, Jakarta 10720
Tel : (021) 2650-8400 (hunting)
Fax : 649-2264, 600-6763

E-mail : nisp@banknisp.com

Home page : www.banknisp.com

Corporate Communications : yani@banknisp.com

Investor Relations : wahyu@banknisp.com

**PENAWARAN UMUM TERBATAS III KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
UNTUK MEMBELI SAHAM BIASA ATAS NAMA**

Sebanyak-banyaknya 810.584.200 (delapan ratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus) saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp 405,- (empat ratus lima puluh rupiah) setiap saham. Setiap pemegang saham yang memiliki 3 (tiga) saham dengan nilai nominal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) setiap saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Juni 2002 pukul 16.00 WIB, mempunyai 2 (dua) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") untuk membeli sebanyak 2 (dua) saham baru dengan harga penawaran Rp 405,- (empat ratus lima puluh rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas III dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar Bursa Efek Jakarta selama tidak kurang dari 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 2 Juli 2002 sampai dengan tanggal 8 Juli 2002. Pencatatan saham biasa akan dilakukan di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 2 Juli 2002.

Perseroan tidak akan menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Terbatas III dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya dalam Penawaran Umum Terbatas III ini akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham (dilusi) dalam jumlah yang cukup material yaitu maksimum sampai dengan 40%

RESIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KETIDAKMAMPUAN DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI KREDIT YANG DIBERIKAN, DAN APABILA JUMLAHNYA CUKUP MATERIAL DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA PERSEROAN.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2002

PROSPEKTUS

PT Bank NISP Tbk ("Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas III dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Penawaran Umum Terbatas II") melalui surat Nomor 003/RI-III/SKKom-Ry/05-2002 pada tanggal 17 Mei 2002 kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-07/PM/2001 tanggal 23 Maret 2001, mengenai Hak Memesan Efek Terlebih dahulu dan peraturan No. IX.D.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-08/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000, mengenai Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Terbatas III bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data, keterangan atau laporan serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kode etik dan norma profesinya.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas III ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan penjelasan/ atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya mendapat persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut dalam Penawaran Umum Terbatas III ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tanggal 10 Nopember Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608).

Sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas III, Perseroan juga telah melaksanakan penitipan kolektip saham Perseroan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan No. IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-07/PM/2001 tanggal 23 Maret 2001 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam hal pemegang saham mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu dalam bentuk pecahan, maka Hak pecahan Efek tersebut menjadi milik Perseroan dan harus dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan ayat 2 dan ayat 3 Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum yang dikeluarkan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992, ditetapkan bahwa Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) dari jumlah saham yang bersangkutan (Ayat 2 Pasal 4); dan sekurang-kurangnya 1% (satu per seratus) dari saham Bank yang dimaksud ayat 2 yang tidak dicatat di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia (ayat 3 Pasal 4). Dengan demikian untuk menghindari kepemilikan saham Perseroan, selaku bank umum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perbankan yang berlaku di Republik Indonesia, Pemodal Asing yang melebihi 99% (sembilan puluh sembilan per seratus), maka Perseroan hanya akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) dari jumlah saham yang diterbitkan Perseroan, sehingga seluruh saham Perseroan yang dicatatkan di Bursa Efek dapat dibeli oleh Pemodal Asing tanpa pembatasan.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham pada tanggal 8 Mei 2002 kepemilikan saham oleh pemodal asing adalah 55,63% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal tersebut.

Penawaran Umum Terbatas III ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang / peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar Indonesia menerima Prospektus ini atau Sertifikat Bukti HMETD, maka dokumen-dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham atau melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, kecuali bila penawaran tersebut, pembelian saham, maupun pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang / peraturan yang berlaku di negara tersebut.

Setiap perubahan atau penambahan informasi mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu akan diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan. Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak ada lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
RINGKASAN	ii
I. PENAWARAN UMUM TERBATAS III	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS III	5
III. PERNYATAAN HUTANG	7
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	13
1. UMUM	13
2. KEUANGAN	15
3. PROSPEK USAHA	16
V. RESIKO USAHA	19
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	31
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN	33
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	33
2. PERKEMBANGAN STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	33
3. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	35
4. KETERANGAN TENTANG ANAK PERUSAHAAN	43
5. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN DIMANA PERSEROAN MEMPUNYAI PENYERTAAN	45
6. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	48
7. SUMBER DAYA MANUSIA	52
8. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN	54
9. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	54
10. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	55
VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN	57
1. UMUM	57
2. KEGIATAN USAHA	61
3. PEMASARAN	69
4. TINGKAT KESEHATAN	70
5. PROSPEK USAHA	72
6. LAIN-LAIN	74
IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	75
X. EKUITAS	77
XI. KEBIJAKAN DIVIDEN	79
XII. PERPAJAKAN	81
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	83
XIV. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	85
XV. KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU	91
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD	93
XVII. INFORMASI TAMBAHAN	94

RINGKASAN

Ringkasan ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci serta laporan keuangan dan penjelasannya yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang rupiah dan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Perseroan didirikan di Bandung pada tahun 1941 dengan nama "N.V. Nederlandsch Indische Spaar En Depositobank" atau disingkat N.I.S.P., dan memperoleh status sebagai bank komersial pada tahun 1967. Pada tahun 1990, Perseroan memperoleh status sebagai bank devisa, dan kemudian melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (go public) pada tahun 1994.

Di tahun 1972, Perseroan menandatangani perjanjian kerjasama pembiayaan dan bantuan teknis dengan Daiwa Bank dari Jepang, melalui PT Bank Daiwa Perdania, yang merupakan bank patungan pertama di Indonesia. Saat ini kepemilikan saham Perseroan di PT Bank Daiwa Perdania sebesar 20,10%.

Pada tahun 1997, Perseroan melakukan kerjasama dengan OCBC Bank dari Singapura dan membentuk bank patungan, yaitu PT Bank OCBC-NISP, dengan persentase kepemilikan saham sebesar 15%.

Perseroan memulai usahanya di kota Bandung, yang kemudian memperluas jaringannya di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Sampai akhir 30 April 2002 Perseroan telah memiliki 85 jaringan kantor yang tersebar di daerah Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Batam, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	1999	2000	2001
Total aktiva	4.044.071	5.261.023	7.137.366
Kredit yang diberikan (net)	1.274.174	2.929.726	4.282.855
Dana pihak ketiga	2.740.549	3.969.624	5.889.250
Total kewajiban	3.718.518	4.881.417	6.658.024
Total ekuitas	325.552	379.605	479.341
Laba bersih	19.491	60.665	71.492
ROAE (setelah pajak)	6,11%	17,21%	16,65%
ROAA (setelah pajak)	0,58%	1,30%	1,15%
LDR	34,15%	59,29%	66,33%
CAR	14,83%	9,94%	9,02%

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (1999 - 2001), Perseroan mencatat pertumbuhan total aktiva rata-rata sebesar 39%, sebagai salah satu bank yang tumbuh dan berkembang pesat dengan predikat Sehat. Di tahun 2001 dan 2000, Perseroan membukukan total aktiva sebesar Rp. Rp 7.137 miliar dan Rp 5.261 miliar atau meningkat masing-masing sebesar 36% dan 31% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika pengaruh depresiasi Rupiah diabaikan, maka pertumbuhan riil total aktiva sesungguhnya tahun 2001 dan 2000 sekitar 19% dan 41%.

Total ekuitas Perseroan pada tahun 1999 adalah Rp 325,6 miliar meningkat 17% menjadi Rp. 379,6 miliar di tahun 2000. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan laba bersih Perseroan sebesar Rp 41 miliar. Pada tahun 2001 total ekuitas Perseroan meningkat sebesar 26% menjadi Rp 479,3 miliar.

Peningkatan ini selain disebabkan oleh peningkatan laba bersih Perseroan sebesar Rp 71 miliar, juga disebabkan peningkatan modal disetor dan agio dari hasil Right Issue II sebesar Rp 46,5 miliar dan berkurang sekitar Rp 18,2 miliar akibat pembagian dividen .

Laba bersih Perseroan tahun 1999 adalah Rp 19,5 miliar, meningkat 211% menjadi Rp 60,6 miliar di tahun 2000. Di tahun 2001 laba bersih Perseroan meningkat 19% menjadi Rp 71,9 miliar, menghasilkan rasio imbal hasil terhadap ekuitas rata-rata (Return on Average Equity/ROAE) sebesar 16,65% dan rasio imbal hasil terhadap rata-rata aktiva (Return on Average Assets/ROAA) sebesar 1,15%. Adanya peningkatan laba di tahun 2000 dikarenakan mulai bangkitnya sektor usaha yang mendorong kepada meningkatnya penyaluran kredit maupun penghimpunan dana secara pesat setelah krisis yang dialami, dan berdampak terhadap perolehan laba Perseroan. Hal ini bukan dirasakan oleh Perseroan semata, tetapi juga oleh perusahaan afiliasi dimana Perseroan melakukan penyertaan saham, sehingga pada tahun 2000 peningkatan laba Perseroan meningkat pesat, diantaranya berkat kontribusi laba yang diperoleh Perseroan dari perusahaan afiliasi. Sedangkan adanya peningkatan laba di tahun 2001 yang cukup besar dikarenakan hasil usaha normal sesuai pertumbuhan asset Perseroan dan juga adanya peningkatan pendapatan yang diperoleh dari transaksi dan penempatan surat berharga sebagai akibat dari mark to market atas surat berharga yang dimiliki.

Ditinjau dari segi penghimpunan dana, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (1999-2001), Perseroan berhasil mencatat pertumbuhan dana pihak ketiga secara rata-rata sebesar 51% pada setiap tahunnya. Pada tahun 2001, dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun Perseroan sebesar Rp 5.889,3 miliar atau meningkat 48% dibandingkan dengan tahun 2000. Komposisi terbesar dari dana pihak ketiga yang dihimpun Perseroan berasal dari deposito dimana meliputi 74% dari keseluruhan dana pihak ketiga.

Di samping dana pihak ketiga, Perseroan melakukan diversifikasi sumber dana melalui emisi Obligasi Bank NISP I tahun 1997 senilai Rp 150 miliar, obligasi Bank NISP II tahun 1999 senilai 250 miliar, yang mana nilainya saat itu tidak berkurang akibat adanya pembelian kembali di pasar sekunder, sehingga nilai bukunya setelah dikurangi biaya emisi obligasi per tanggal 31 Desember 2001 adalah sebesar Rp 305,4 miliar. Sumber dana yang berasal dari pinjaman yang diterima sebesar Rp 279,1 milyar pada tahun 2001 diperoleh dari berbagai lembaga keuangan internasional terkemuka, diantaranya berasal dari International Finance Corporation (IFC), Export Import Bank of Japan melalui dana kelolaan dari Bank Indonesia dan pinjaman-pinjaman dalam valas lainnya yang dijamin dalam program exchange offer, disamping Perseroan juga terlibat dalam program USAID. Diversifikasi sumber dana dengan fokus utama pada perolehan dana jangka panjang adalah untuk menjaga stabilitas likuiditas.

Ditinjau dari segi penyaluran dana, Perseroan berhasil menempatkan dananya kedalam aktiva-aktiva yang sifatnya produktif, melalui pemberian kredit, penempatan di bank lain, penempatan pada surat berharga dan penyertaan. Total aktiva produktif Perseroan tahun 2001 sebesar Rp 6.418,2 miliar, dimana penyaluran kredit meliputi 68% dari keseluruhan aktiva produktif.

Portofolio kredit Perseroan pada akhir tahun 2001 terutama disalurkan ke sektor perindustrian (42.6% dari total kredit), perdagangan (20% dari total kredit) dan jasa (22.4% dari total kredit).

Sebagian besar dari portofolio kredit berada dalam kategori skala kecil dan menengah dimana hal ini sejalan dengan strategi Perseroan yang memfokuskan pangsa pasarnya pada sektor ritel. Pada periode 31 Desember 2000, sekitar 30% dari total kredit disalurkan berskala sampai dengan Rp 1 miliar, 43% berskala lebih dari Rp 1 miliar sampai dengan Rp 10 miliar dan 27% diberikan dalam skala lebih dari Rp 10 miliar. Sementara pada periode 31 Desember 2001 prosentase kredit yang diberikan sampai dengan Rp 1 miliar sebanyak 26%, 44% disalurkan dalam skala lebih dari Rp 1 miliar sampai dengan Rp 10 miliar, dan 30% diberikan dalam nilai lebih dari Rp 10 miliar.

Perseroan lebih memfokuskan penyaluran dananya kedalam kredit jangka pendek dan jangka menengah. Per 31 Desember 2001, 63% dari total kredit yang disalurkan berjangka waktu dibawah 2 tahun, dan 76% dari total kredit diberikan dalam bentuk kredit modal kerja.

Dari segi target pasar, Perseroan masih tetap berkeyakinan bahwa sesuai dengan pengalaman dan pemahamannya terhadap pangsa pasar ritel yang ditanganinya selama ini, maka sektor tersebut masih menjadi pangsa pasar utama dari Perseroan. Didukung pula oleh kenyataan, bahwa dimasa sulit yang dialami oleh dunia usaha beberapa waktu lalu, telah membuktikan bahwa sektor tersebutlah yang praktis masih mampu bertahan bahkan berpeluang untuk terus berkembang. Namun demikian, untuk meningkatkan daya saing Perseroan di era globalisasi, maka Perseroan senantiasa mencari peluang untuk menggarap segmen lainnya diluar ritel.

Kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam rangka Penyehatan Perbankan mempunyai dampak yang luar biasa terhadap seluruh bank di Indonesia, demikian juga halnya dengan Perseroan. Disatu sisi Perseroan melihatnya sebagai tantangan besar untuk lebih meningkatkan profesionalisme dan prinsip kehati-hatian bank, namun di lain sisi dilihatnya sebagai peluang untuk meraih pangsa pasar yang lebih besar dengan terjadinya pergeseran signifikan dari pangsa pasar perbankan nasional.

Di dalam situasi perekonomian yang memburuk beberapa waktu yang lalu, dimana perbankan dihadapkan kepada kondisi meningkatnya rata-rata suku bunga beberapa waktu yang lalu berakibat terciptanya kondisi negative spread serta masih belum tercapainya stabilitas nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing. Kondisi tersebut memberikan dampak kepada peningkatan kredit bermasalah yang akhirnya menurunkan kualitas aktiva produktif Perseroan.

Untuk menanggulangi resiko ini Perseroan terus menerus meningkatkan aktivitas pemeliharaan kredit serta membentuk cadangan yang tinggi sesuai ketentuan dari Bank Indonesia nomor 31/148/KEP/DIR tanggal 12 November 1998. Sehubungan dengan ini Perseroan berhasil menurunkan jumlah kredit bermasalah dari Rp 183,81 milyar pada akhir 2000 menjadi Rp 177,97 milyar pada akhir 2001.

RENCANA MASA DATANG

Perekonomian Indonesia tahun 2002 tampaknya masih akan diliputi ketidakpastian. Satu hal yang menggembirakan adalah adanya kecenderungan penurunan suku bunga. Bagi Perseroan, hal ini berarti penurunan biaya dana, sehingga akan menunjang rencana Perseroan untuk melakukan ekspansi kredit. Perseroan berharap ditahun 2002 ini rasio LDR (Loan to Deposit Ratio) dapat terus ditingkatkan mencapai lebih dari 70%. Segmen yang dipilih tetap berfokus pada pembiayaan usaha kecil dan menengah (sekitar 60%-70%) dan sisanya adalah ke konsumen dan korporasi (masing-masing 10%-20%). Sedangkan untuk penempatan pada surat berharga hanya akan mencakup sekitar 15%-30% dari aktiva produktif.

Sejalan dengan fokus Perseroan untuk terus meningkatkan efisiensi, sejak tahun 2001 Perseroan melaksanakan program optimalisasi cabang dimana diharapkan dapat diselesaikan ditahun 2002. Sejalan dengan program optimalisasi tersebut, maka Perseroan akan terus meningkatkan aspek teknologi informasi serta sumber daya manusianya.

Perseroan akan terus melakukan ekspansi jaringan dalam rangka membawa Perseroan lebih dekat dengan nasabah. Penambahan jumlah jaringan ini diharapkan dapat menunjang pertumbuhan dana pihak ketiga.

Berkaitan dengan dana pihak ketiga, Perseroan akan memusatkan perhatian pada upaya meningkatkan pertumbuhan produk berbunga rendah, seperti giro dan tabungan, antara lain dengan melakukan repackaging produk dan jasa yang ada, review terhadap pricing yang berlaku serta melakukan aktivitas pemasaran secara lebih aktif.

Perseroan menyadari bahwa untuk menjaga keseimbangan struktur pendanaan dan tingkat kesehatan yang optimal serta tingkat permodalan yang mencukupi bagi pengembangan usaha Perseroan secara maksimal, maka diperlukan adanya peningkatan modal Perseroan. Oleh sebab itu Perseroan berencana untuk melakukan peningkatan modal melalui Penawaran Umum Terbatas III kepada masyarakat.

RESIKO USAHA

Resiko utama yang mungkin dihadapi Perseroan adalah antara lain ketidakmampuan debitur untuk membayar kembali kredit yang diberikan, dan apabila jumlahnya cukup material dapat mempengaruhi kinerja Perseroan. Semakin besar porsi kredit yang bermasalah karena adanya keraguan atas kemampuan debitur untuk membayar kembali kredit yang diberikan, maka semakin besar pula biaya penyisihan penghapusan kredit yang harus dicadangkan oleh Perseroan, sehingga akan sangat mempengaruhi laba Perseroan.

PENAWARAN UMUM TERBATAS III

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Terbatas III kepada para Pemegang Saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sejumlah sebanyak-banyaknya sebanyak-banyaknya 810.584.200 (delapan ratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus) saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp 405,- (empat ratus lima Rupiah) setiap saham.

Setiap pemegang saham yang memiliki 3 (tiga) saham dengan nilai nominal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) setiap saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Juni 2002 pukul 16.00 WIB, mempunyai 2 (dua) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") untuk membeli sebanyak 2 (dua) saham baru dengan harga penawaran Rp 405,- (empat ratus lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas III dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham, dan seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dan akan dicatatkan di Bursa Efek Jakarta.

STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN SEBELUM DAN SESUDAH PENAWARAN UMUM TERBATAS III

Dengan dilaksanakan hak atas HMETD maka struktur permodalan Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Terbatas III secara proforma apabila 810.584.200 (delapan ratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus) saham dikeluarkan seluruhnya adalah sebagai berikut :

	Sebelum		Sesudah	
	Penawaran Umum Terbatas III		Penawaran Umum Terbatas III	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham (Sebanyak-banyaknya)	Jumlah Nilai Nominal (Rp) (Sebanyak-banyaknya)
Modal Dasar	4.800.000.000	1.200.000.000.000	4.800.000.000	1.200.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :				
- Saham lama	1.215.876.301	303.969.075.250	1.215.876.301	303.969.075.250
- Saham baru yang ditawarkan			810.584.200	202.646.050.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.215.876.301	303.969.075.250	2.026.460.501	506.615.125.250
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.584.123.699	896.030.924.750	2.773.539.499	693.384.874.750

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS III

Apabila sebanyak-banyaknya 810.584.200 (delapan ratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus) saham yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas III dilaksanakan seluruhnya, maka seluruh dana yang diperoleh setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan, yang akan disalurkan seluruhnya kedalam aktiva produktif.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Semua saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh termasuk saham baru dalam rangka Penawaran Umum Terbatas III ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lainnya yang telah disetor penuh termasuk hak atas dividen.

Sejak Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan tahun 1994, Perseroan senantiasa membagikan dividen kas (tunai) kepada para pemegang saham dimana realisasi pembayaran dividen kas (tunai) sejak tahun buku 1994 sampai dengan 2000 berkisar antara 23,11% - 46,78% dari laba bersih Perseroan.

Tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal lain sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, mulai tahun buku 2002 Direksi Perseroan merencanakan untuk membayar dividen kas (tunai) sekurang-kurangnya sekali dalam setahun yang besarnya dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dengan tidak mengabaikan kebutuhan permodalan, tingkat kesehatan Perseroan dan kebutuhan dana yang diperlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha. Rencana pembagian dividen akan berkisar antara 20% - 40% dari laba bersih Perseroan.

Kebijakan dividen diatas merupakan kebijakan dividen yang akan diusulkan Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS") yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Juni 2002, dan kebijakan dividen yang diusulkan tersebut baru berlaku setelah disetujui oleh RUPS.

Mengingat Perseroan ikut serta dalam program penjaminan Pemerintah, maka Perseroan wajib tunduk kepada ketentuan Pemerintah mengenai prosedur pembagian dividen bagi Bank yang menerima jaminan Pemerintah, sebagaimana ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional No. 1036/BPPN/0401 tanggal 2 April 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 179/KMK.017/2000 tanggal 26 Mei 2000 tentang Syarat, Tata Cara dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

I. PENAWARAN UMUM TERBATAS III

Direksi atas nama Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas III kepada para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sampai dengan sebanyak-banyaknya 810.584.200 (delapan ratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus) saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp 405,- (empat ratus lima puluh rupiah) setiap saham.

Setiap pemegang saham yang memiliki 3 (tiga) saham dengan nilai nominal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) setiap saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Juni 2002 pukul 16.00 WIB, mempunyai 2 (dua) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") untuk membeli sebanyak 2 (dua) saham baru dengan harga penawaran Rp 405,- (empat ratus lima puluh rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas III dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.



BANK NISP

BIDANG USAHA: JASA PERBANKAN

Berkedudukan di Bandung, Indonesia

TOTAL JARINGAN : 85 KANTOR

KANTOR PUSAT

Jalan Taman Cibeunying Selatan No. 31

Bandung 40114

Tel : (022) 715-9888 (hunting)

Fax : (022) 710-0466, 727-4268

KANTOR JAKARTA

Jalan Gunung Sahari No. 38

Jakarta 10720

Tel : (021) 2650-8400 (hunting)

Fax : 649-2264, 600-6763

E-mail : nisp@banknisp.com

Home page : www.banknisp.com

Corporate Communications : yani@banknisp.com

Investor Relations : wahyu@banknisp.com

RESIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KETIDAKMAMPUAN DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI KREDIT YANG DIBERIKAN, DAN APABILA JUMLAHNYA CUKUP MATERIAL DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA PERSEROAN

RESIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DIUNGKAPKAN PADA BAB V PROSPEKTUS

Perseroan didirikan di Bandung pada tanggal 4 April 1941 dengan nama "N.V. NEDERLANDSCH INDISCHE SPAAR EN DEPOSITOBANK genaamd N.I.S.P" berdasarkan Akta No. 6 tanggal 4 April 1941 yang dibuat di hadapan Theodor Johan Indewey Gerlings, pada saat itu Notaris di Purwakarta dan telah disetujui oleh yang berwajib menurut penetapan Directeur van Justitie tanggal 28 April 1941 No. A.42/6/9 dan diumumkan dalam Berita Javasche Courant tanggal 20 Juni 1941 No. 49 Bijvoegsel No. 1961 dan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5 tanggal 16 Januari 1951, Tambahan No. 21.

Perseroan memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum pada tahun 1967 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. D.15.6.2.27 tanggal 20 Juli 1967. Berdasarkan Keputusan Bank Indonesia No. 23/9/KEP/DIR tanggal 19 Mei 1990, Perseroan memperoleh izin usaha sebagai Bank Devisa dan mulai beroperasi sebagai Bank Devisa sejak tanggal 3 Agustus 1990. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S.35/MK.03/1993 tanggal 6 Januari 1993, Perseroan memperoleh status sebagai Bank Persepsi untuk menerima setoran-setoran pajak dan bukan pajak.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 67 tanggal 30 April 2002, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I dengan Surat Keputusan No.C-07830 HT.01.04.TH2002 tanggal 6 Mei 2002 dan telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 6 Mei 2002 dengan No.C-07831 HT.01.04.TH.2002, yang antara lain mengenai peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) menjadi sebesar Rp 1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus miliar rupiah).

Adapun riwayat pencatatan saham Perseroan secara kronologis mulai dari Penawaran Umum Perdana (IPO) adalah sebagai berikut :

Jenis Tindakan (Corporate Action)	Tanggal Pencatatan	Tambahan Saham Hasil Corporate Action	Akumulasi Jumlah Saham yang Dicatatkan	Total Nilai Nominal Saham yang Dicatatkan
		(lembar)	(lembar)	(Rp)
Penawaran Umum Perdana (IPO)	20-Oct-94	62.500.000	62.500.000	62.500.000.000
Stock Split I (1 saham lama : 1 saham baru)	3-Feb-97	62.500.000	125.000.000	62.500.000.000
Saham Bonus I (5 saham lama : 2 saham baru)	28-Feb-97	50.000.000	175.000.000	87.500.000.000
Saham Bonus II (100 saham lama : 33 saham baru)	4-Dec-98	57.750.000	232.750.000	116.375.000.000
Dividen Saham I (25 saham lama : 9 saham baru)	4-Dec-98	63.000.000	295.750.000	147.875.000.000
Penawaran Umum Terbatas I	18-Dec-98	253.471.865	549.221.865	274.610.932.500
Stock Split II (1 saham lama : 1 saham baru)	4-Nov-99	549.221.865	1.087.458.730	271.864.682.500
Penawaran Umum Terbatas II	18-Jan-01	117.432.571	1.203.717.537	300.929.384.250

Berikut ditampilkan komposisi permodalan Perseroan berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat No. 67 tanggal 30 April 2002 :

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp 250.00 (dua ratus lima puluh rupiah) Setiap saham

Uraian	Modal Dasar	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah saham	4.800.000.000	1.215.876.301
Jumlah Nominal (Rp)	1.200.000.000.000	303.969.075.250

Struktur permodalan Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 8 Mei 2002 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	4.800.000.000	1.200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : (nilai nominal Rp 250 setiap saham)			
1. PT Suryasono Sentosa	223.202.857	55.800.714.250	18.36
2. PT Udayawira Utama	223.202.856	55.800.714.000	18.36
3. International Finance Corporation	116.875.000	29.218.750.000	9.61
4. Moore Investments Limited	83.508.346	20.877.086.500	6.87
5. Hurst Investments Limited	158.012.324	39.503.081.000	13.00
6. Stiles Investments Limited	158.012.325	39.503.081.250	13.00
7. Masyarakat	253.062.593	63.265.648.250	20.81
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.215.876.301	303.969.075.250	100.00
Jumlah saham dalam portepel	3.584.123.699	896.030.924.750	

Catatan:

Sehubungan dengan 34.4% saham Perseroan yang dimiliki oleh Moore Investments Limited ("Moore"), Hurst Investments Limited ("Hurst") dan Stiles Investments Limited ("Stiles"); Moore, Hurst dan Stiles telah memberikan kuasa kepada PT Suryasono Sentosa dan PT Udayawira Utama untuk menghadiri RUPS dan memberikan suara dalam RUPS Perseroan.

Dengan dilaksanakan hak atas HMETD maka struktur permodalan Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Terbatas III secara proforma apabila 810.584.200 (delapan ratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus) saham dikeluarkan seluruhnya adalah sebagai berikut :

	Sebelum Penawaran Umum Terbatas III		Sesudah Penawaran Umum Terbatas III	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	4.800.000.000	1.200.000.000.000	4.800.000.000	1.200.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :				
- Saham lama	1.215.876.301	303.969.075.250	1.215.876.301	303.969.075.250
- Saham baru yang ditawarkan			810.584.200	202.646.050.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.215.876.301	303.969.075.250	2.026.460.501	506.615.125.250
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.584.123.699	896.030.924.750	2.773.539.499	693.384.874.750

Semua saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh termasuk saham baru dalam rangka Penawaran Umum Terbatas III ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen.

Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas III ini, dapat menjual haknya kepada pihak lain dari tanggal 2 Juli 2002 sampai dengan 8 Juli 2002 melalui Bursa Efek Jakarta atau dapat juga dilakukan diluar bursa sesuai dengan Peraturan No. IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep.07/PM/2001 tanggal 23 Maret 2001 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Apabila pemegang HMETD hanya mengambil sebagian dari haknya dalam Penawaran Umum Terbatas III ini, sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD yang melakukan pemesanan yang lebih besar dari haknya, sebagaimana tercantum dalam HMETD secara proporsional berdasarkan hak yang telah terlaksana.

Pemegang Saham yang tidak menggunakan haknya dapat mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) dalam jumlah cukup material sampai dengan maksimum 40% (empat puluh persen).

Perseroan tidak bermaksud untuk mengeluarkan saham baru atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS III

Apabila sebanyak-banyaknya sebanyak-banyaknya 810.584.200 (delapan ratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus) saham yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas III dilaksanakan seluruhnya, maka seluruh dana yang diperoleh setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan, yang akan disalurkan seluruhnya kedalam aktiva produktif.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas III ini secara periodik kepada Bapepam serta kepada para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dananya tidak seperti yang diungkapkan dalam Prospektus ini, maka terlebih dahulu harus melaporkan kepada Bapepam disertai alasan dan pertimbangannya dan memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Terbatas II telah dipergunakan seluruhnya sesuai dengan penggunaan dana yang telah diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan pada tanggal 17 Nopember 2000 dan telah dilaporkan oleh Perseroan kepada Bapepam.

REKAM-REKAM PERUSAHAAN
KANTOR: ...
JALAN: ...

Halaman ini sengaja dikosongkan

III. PERNYATAAN HUTANG

A. PERNYATAAN HUTANG PER TANGGAL 31 DESEMBER 2001 (AUDITED)

Tabel dibawah ini menunjukkan posisi hutang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2001 yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Robert Yogi, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Pada tanggal 31 Desember 2001 Perseroan mempunyai (A.1.) Kewajiban sebesar Rp 6.637,12 miliar dan (A.2.) Kewajiban karena komitmen dan kontinjensi sebesar Rp 1.098,07 miliar dengan perincian sebagai berikut :

(dalam miliar rupiah)

	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah
A.1. KEWAJIBAN			
Simpanan			
- Giro	513,31	251,91	765,22
- Tabungan	754,42	-	754,42
- Deposito	3.123,51	947,61	4.071,12
- Sertifikat deposito - bersih	26,90	-	26,90
- Simpanan dari bank lain	218,67	52,92	271,59
Jumlah Simpanan	4.636,81	1.252,44	5.889,25
Hutang pajak	16,95	-	16,95
Kewajiban akseptasi	-	59,37	59,37
Surat berharga yang diterbitkan	305,35	-	305,35
Pinjaman yang diterima	45,08	182,00	227,08
Kewajiban lainnya	59,17	14,96	74,13
Pinjaman subordinasi	-	52,00	52,00
Kewajiban pajak tangguhan	9,54	-	9,54
Kepemilikan minoritas	3,45	-	3,45
Jumlah Kewajiban	5.076,35	1.560,77	6.637,12
A.2. KEWAJIBAN KARENA KOMITMEN DAN KONTINJENSI			
Kewajiban Komitmen			
- Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum dipergunakan	808,98	70,73	879,71
- Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum dipergunakan	0,13	-	0,13
- LC irrevocable dalam rangka impor dan ekspor	-	43,34	43,34
- LC yang irrevocable dan masih berjalan dalam negeri	7,75	-	7,75
- Penjualan berjangka valuta asing tunai yang belum diselesaikan	20,81	4,16	24,97
Jumlah Kewajiban Komitmen	837,67	118,23	955,90
Kewajiban Kontinjensi			
- Penerbitan jaminan dalam bentuk :			
- Bank garansi	121,19	18,64	139,83
- Penerusan pinjaman	2,34	-	2,34
Jumlah Kewajiban Kontinjensi	123,53	18,64	142,17
Jumlah Kewajiban Karena Komitmen Dan Kontinjensi	961,20	136,87	1.098,07

A.1.KEWAJIBAN

1. HUTANG DALAM BENTUK SIMPANAN

(dalam miliar rupiah)

Keterangan	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah
Giro			
- Pihak lain	512,99	251,58	764,57
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	0,32	0,33	0,65
Tabungan			
- Pihak lain	749,98	-	749,98
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	4,44	-	4,44
Deposito berjangka			
- Pihak lain	3.106,07	945,98	4.052,05
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	17,44	1,63	19,07
Sertifikat deposito - bersih	26,90	-	26,90
Simpanan dari bank lain	218,67	52,92	271,59
Jumlah	4.636,81	1.252,44	5.889,25

a) Giro

Merupakan penempatan dana masyarakat dalam bentuk rekening giro. Saldo giro pada tanggal 31 Desember 2001 adalah sebesar Rp 765,22 miliar dengan suku bunga rata-rata 5,31% untuk giro rupiah dan 3,42% untuk giro valuta asing.

b) Tabungan

Merupakan penempatan dana masyarakat dalam bentuk tabungan, terdiri dari :

- Tabanas (Visi Kid's) yaitu tabungan yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat serta memperoleh bunga yang dibukukan setiap akhir bulan.
- Rekening Tabungan (Visi Save) yaitu tabungan yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat, serta memperoleh bunga yang dihitung atas dasar saldo terendah setiap periode, dimana dalam 1 bulan terdapat 4 periode.
- Tabungan Harian, yaitu tabungan yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat, serta memperoleh bunga yang dihitung atas dasar saldo harian.
- Tabungan Berjangka, yaitu tabungan yang penyetorannya dilakukan secara rutin setiap bulan dalam jumlah yang sama, sementara itu penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo, dimana jangka waktu dan jumlah nominalnya sesuai dengan yang ditentukan pada saat pembukaan tabungan berjangka tersebut.

Saldo tabungan pada tanggal 31 Desember 2001 adalah sebesar Rp 754,42 miliar dan tingkat bunga rata-rata tabungan adalah sebesar 10,22% per tahun.

c) Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito

Merupakan simpanan masyarakat yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan jangka waktu simpanan dan atas nama. Sedangkan Sertifikat Deposito adalah surat bukti penyimpanan berjangka atas unjuk yang dapat diperjual belikan. Pada tanggal 31 Desember 2001, saldo deposito berjangka adalah sebesar Rp 4.071,12 miliar dan saldo Sertifikat Deposito adalah sebesar Rp 26,90 miliar. Tingkat bunga rata-rata deposito berjangka dalam rupiah adalah sebesar 12,88% per tahun sedangkan dalam valuta asing adalah sebesar 5,36%, dan sertifikat deposito adalah sebesar 12,86% per tahun pada tahun 2001.

d) Simpanan dari Bank Lain

Merupakan simpanan dari bank lain dalam bentuk Giro, Tabungan, Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito.

2. HUTANG PAJAK

Posisi hutang pajak bank pada tanggal 31 Desember 2001 adalah sebesar Rp 16,95 miliar yang terdiri dari :

(dalam miliar rupiah)

Keterangan	
Hutang pajak yang masih harus dibayar pasal 21	0,87
Hutang pajak yang masih harus dibayar pasal 23	7,44
Hutang pajak yang masih harus dibayar pasal 25	2,83
Hutang pajak yang masih harus dibayar pasal 29	5,80
Hutang PPN yang masih harus dibayar	0,01
Jumlah	16,95

3. KEWAJIBAN AKSEPTASI

Merupakan tagihan dan kewajiban akseptasi L/C impor atas dasar L/C berjangka dalam mata uang asing. Saldo pada tanggal 31 Desember 2001 adalah sebesar Rp 59,37 miliar, terdiri dari:

(dalam miliar rupiah)

Dollar Amerika Serikat	43,11
Dolar Australia	0,30
Yen Jepang	0,25
Euro	15,71
Jumlah	59,37

4. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN - OBLIGASI

Surat berharga komersial yang diterbitkan oleh Perseroan yaitu berupa obligasi. Saldo pada tanggal 31 Desember 2001 adalah sebesar Rp 305,35 miliar setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi sebesar Rp 1,35 miliar. Obligasi terdiri dari:

(dalam miliar rupiah)

Obligasi Bank NISP I Tahun 1997	
Diterbitkan	150,00
Telah ditarik kembali	(14,30)
Saldo 31 Desember 2001	135,70

Obligasi ini adalah obligasi atas unjuk, berjangka waktu 5 (lima) tahun yang jatuh waktu di tahun 2002, dengan tingkat bunga tetap untuk tahun ke-1 sebesar 15,50% dan tingkat bunga mengambang untuk tahun ke-2,3,4 dan 5 yang dihitung berdasarkan rata-rata tingkat bunga deposito 6 (enam) bulan dari 6 (enam) bank, ditambah premi sebesar 1,25 % per tahun.

(dalam miliar rupiah)

Obligasi Bank NISP II Tahun 1999	
Diterbitkan	250,00
Telah ditarik kembali	(79,00)
Saldo 31 Desember 2001	171,00

Obligasi ini adalah obligasi atas unjuk, berjangka waktu 5 (lima) tahun yang jatuh waktu di tahun 2004 atau tanggal yang lebih awal jika terjadi Opsi Call atau Opsi Put pada ulang tahun emisi tahun ke-3 (tiga), dengan tingkat bunga tetap untuk 6 bulan pertama sebesar 15,00 % dan tingkat bunga mengambang untuk masa selanjutnya yang dihitung berdasarkan rata-rata tingkat bunga deposito 6 (enam) bulan dari 4 (empat) bank Pemerintah, ditambah premi sebesar 1,25 % per tahun

5. PINJAMAN YANG DITERIMA

Merupakan pinjaman yang diterima Perseroan dalam bentuk Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka penyaluran Kredit Usaha Kecil (KUK), dan Pinjaman Bilateral dalam valuta asing. Rincian pinjaman yang diterima adalah sebagai berikut :

(dalam miliar rupiah)

Rupiah :	
Pinjaman Likuiditas dari Bank Indonesia (KKPA)	0,27
Penerusan pinjaman	44,81
Jumlah	45,08
Mata uang asing :	
Pinjaman dari bank lain	
The Daiwa Bank Limited (USD 90,000.00)	0,94
Bank Brussels Lambert (USD 300,000.00)	3,12
Fuji Bank Limited (USD 200,000.00)	2,08
N.V De Indonesische Overzeese Bank (USD 400,000.00)	4,16
ING Bank N.V Singapore Bank (USD 112,500.00)	1,17
Overseas Chinese Banking Corporation Ltd (USD 9,200,000.00)	95,68
International Finance Corporation (USD 357,145.32)	3,71
GSM 102 (USD 6,841,040.64)	71,14
Jumlah	182,00
Jumlah pinjaman yang diterima	227,08

Tingkat suku bunga Pinjaman Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka penyaluran kredit berskala kecil (KKPA) sebesar 9%. Suku bunga rata-rata penerusan pinjaman sebesar 12,53%.

Pinjaman dari The Daiwa Bank Limited, Bank Brussels Lambert, Fuji Bank Limited, NV De Indonesische Overzeese Bank dan ING Bank N.V. Singapore Bank dengan tingkat bunga Libor ditambah 2,75% - 3,5%. Sedangkan pinjaman dari Overseas Chinese Banking Corporation dengan tingkat bunga Libor ditambah 2,25% - 2,75% Semua itu adalah pinjaman yang diterima dengan perjanjian exchange offer dari Bank Indonesia.

Pinjaman yang diterima dari International Finance Corporation dengan tingkat bunga Libor ditambah 1,3%. Sementara itu fasilitas penjaminan trade finance GSM-102 mempunyai tingkat suku bunga Libor 6 bulan ditambah 0,5% sampai dengan 0,625%.

6. KEWAJIBAN LAIN-LAIN

(dalam miliar rupiah)

Rupiah :	
Setoran jaminan	1,20
Biaya yang masih harus dibayar	33,99
Hutang dividen	0,01
Rupa-rupa	21,08
Rupa-rupa kewajiban anak perusahaan	2,89
Jumlah	59,17
Valuta asing :	
Pinjaman dari bank lain	
Setoran jaminan	6,62
Biaya yang masih harus dibayar	4,87
Rupa-rupa	3,47
Jumlah	14,96
Jumlah kewajiban lain-lain	74,13

7. PINJAMAN SUBORDINASI

Pinjaman yang diterima dari International Finance Corporation sebesar USD 5,000,000.00, Pinjaman subordinasi dapat dikonversi ke saham biasa. Pinjaman akan jatuh tempo tahun 2006 dan dikenakan bunga 1,3% diatas LIBOR.

A.2. KEWAJIBAN KARENA KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Pada tanggal 31 Desember 2001, Perseroan memiliki kewajiban komitmen sebesar Rp 955,90 miliar dan kewajiban kontinjensi sebesar Rp 142,17 miliar. Kewajiban komitmen terdiri dari fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan, irrevocable letters of credit yang masih berjalan dalam rangka impor dan ekspor, penjualan valuta asing tunai (spot) yang belum diselesaikan. Kewajiban kontinjensi terdiri dari penerbitan jaminan dalam bentuk bank garansi dan penerusan pinjaman.

B. PERNYATAAN HUTANG PER TANGGAL 30 APRIL 2002 (UNAUDITED)

Pada tanggal 30 April 2002 Perseroan mempunyai (B.1.) Kewajiban sebesar Rp 6.468,47 miliar dan (B.2.) Kewajiban karena komitmen dan kontinjensi sebesar Rp 1.034,65 miliar dengan perincian sebagai berikut :

	(dalam miliar rupiah)		
	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah
B.1. KEWAJIBAN			
Simpanan			
- Giro	436,62	261,55	698,17
- Tabungan	788,03	-	788,03
- Deposito	3.041,76	780,44	3.822,20
- Sertifikat deposito - bersih	27,57	-	27,57
- Simpanan dari bank lain	252,59	156,74	409,33
Jumlah Simpanan	4.546,57	1.198,73	5.745,30
Hutang pajak			
Kewajiban akseptasi	12,58	-	12,58
Surat berharga yang diterbitkan	0,89	48,52	49,41
Rejuman yang diterima	288,85	-	288,85
Kewajiban lainnya	42,70	117,65	160,35
Rejuman subordinasi	140,56	15,18	155,74
Kewajiban pajak tangguhan	-	46,55	46,55
Pemilikan minoritas	5,96	-	5,96
	3,73	-	3,73
Jumlah Kewajiban	5.041,84	1.426,63	6.468,47
B.2. KEWAJIBAN KARENA KOMITMEN DAN KONTINJENSI			
Kewajiban Komitmen			
- Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum dipergunakan	696,21	69,03	765,24
- Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum dipergunakan	0,35	-	0,35
- LC irrevocable dalam rangka impor dan ekspor	13,41	76,71	90,12
- LC yang irrevocable dan masih berjalan dalam negeri	-	-	-
- Penjualan berjangka valuta asing tunai yang belum diselesaikan	-	33,96	33,96
Jumlah Kewajiban Komitmen	709,97	179,70	889,67
Kewajiban Kontinjensi			
- Penerbitan jaminan dalam bentuk :			
- Bank garansi	129,92	13,41	143,33
- Penerusan pinjaman	1,65	-	1,65
Jumlah Kewajiban Kontinjensi	131,57	13,41	144,98
Jumlah Kewajiban Karena Komitmen Dan Kontinjensi	841,54	193,11	1.034,65

Seluruh kewajiban Perseroan per tanggal Laporan Keuangan terakhir telah diungkapkan didalam Prospektus, dan Manajemen berkeyakinan bahwa Perseroan mempunyai kesanggupan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Halaman ini sengaja dikosongkan

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

1. UMUM

Bank NISP didirikan di Bandung pada tahun 1941 dan memperoleh status sebagai bank komersial pada tahun 1967. Pada tahun 1972, Perseroan menandatangani perjanjian kerjasama pembiayaan dan bantuan teknis dengan Daiwa Bank dari Jepang, melalui PT Bank Daiwa Perdania, yang merupakan bank patungan pertama di Indonesia. Perseroan memperoleh status sebagai bank devisa pada tahun 1990, dan kemudian melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (go public) pada tahun 1994.

Pada tahun 1995, Perseroan memperoleh sertifikat ISO 9002 untuk divisi Treasury dan Lembaga Keuangan. Bank NISP merupakan bank pertama di kawasan Asia Tenggara penerima sertifikat ISO 9002. Selanjutnya pada tahun 1996, sertifikasi ISO 9002 diberikan untuk seluruh satuan kerja kantor pusat Perseroan. Di tahun 2000 sertifikat ISO 9002 ditingkatkan menjadi ISO 9001-1994, dan pada tahun 2001 meningkat lagi menjadi ISO 9001-2000.

Pada tahun 1997, Perseroan melakukan kerjasama dengan OCBC Bank dari Singapura dan membentuk bank patungan yaitu PT Bank OCBC-NISP.

Pada bulan Juni 1997, Perseroan menerbitkan Obligasi Bank NISP I Tahun 1997 dengan tingkat bunga tetap dan mengambang senilai Rp 150 miliar berjangka waktu 5 tahun. Obligasi tersebut memperoleh peringkat tertinggi yang dapat dicapai oleh bank di Indonesia oleh Pefindo dan 'Fitch', yang merupakan lembaga pemeringkat bank terkemuka di dunia.

Pada bulan Oktober 1997, Perseroan memperoleh pinjaman berjangka waktu 5 tahun dari IFC (International Finance Corporation) sebesar USD 10 juta dengan tingkat suku bunga sebesar Libor + 1,3%, dan menjadikan Perseroan sebagai bank pertama di Indonesia yang menerima pinjaman bilateral langsung dari IFC.

Berdasarkan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) pada tanggal 27 Juli 1998, Perseroan termasuk diantara 21 bank pelaksana (terdiri dari 7 bank pemerintah dan 14 bank swasta) yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk menyalurkan kredit kepada eksportir dan distributor guna menggerakkan perekonomian, khususnya menggerakkan ekspor dan distribusi. Disamping itu, Perseroan termasuk pula diantara ke-28 bank (terdiri dari 7 bank pemerintah dan 21 bank swasta) yang pembukaan L/C impornya dijamin oleh Bank Indonesia.

Pada tahun 1998, Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Terbatas I ("PUT-I") dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 300.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 500,- per saham. Rasio yang mendasari penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam PUT-I ini ditetapkan dengan perbandingan 1.183 : 1.200. Melalui PUT-I ini Perseroan berhasil menerbitkan 253.471.865 saham sehingga meningkatkan modal disetornya sebesar Rp 126,7 milyar.

Setelah sukses dengan Obligasi Bank NISP I tahun 1997, maka Bank NISP kembali menerbitkan obligasi kedua di tahun 1999. Obligasi Bank NISP II dengan tingkat bunga tetap dan mengambang ini telah berhasil menghimpun dana sebesar Rp 250 miliar dan telah diterima pada tanggal 6 Oktober 1999.

Selain dengan membaiknya kinerja Bank NISP, maka pada tanggal 3 Maret 2000 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) Bank NISP telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk meningkatkan penyertaan sahamnya di PT Bank Daiwa Perdania dari 11,93% menjadi 20,10%. Diharapkan dengan investasi ini kemitraan Bank NISP dengan PT Bank Daiwa Perdania yang telah berlangsung selama 28 tahun akan dapat semakin ditingkatkan. Hasil penyertaan ini telah memberikan kontribusi secara berarti terhadap laba Perseroan dalam 2 tahun terakhir.

Pada bulan Mei 2000 Bank NISP kembali menerima penghargaan prestisius "Asian Banking Award" untuk kategori "Risk Management". Sebelumnya pada tanggal 27 Maret 1998, Perseroan menerima penghargaan yang sama untuk kategori "Commercial Credit Program" dan "Operational Efficiency Program" setelah di tahun 1997 menerima penghargaan untuk kategori "Credit Quality".

Pada akhir tahun 2000 telah disepakati perjanjian dengan International Finance Corporation (IFC) untuk menyetorkan modalnya kedalam Perseroan sebesar USD 10,000,000,-. Penanaman modal ini sebagian dilakukan melalui penyeteroran langsung serta sebagian lagi melalui konversi pinjaman subordinasi.

Penyetoran IFC untuk sebesar USD 5,000,000 telah diwujudkan melalui Right Issue II yang baru selesai pada akhir Januari 2001. Dari Right Issue II tersebut, total dana yang masuk sekitar Rp 47 miliar melalui penerbitan 117,4 juta lembar saham. Berdasarkan data per 31 Januari 2001, sebanyak 9,6% saham Bank NISP resmi dimiliki oleh lembaga yang merupakan salah satu bagian dari Bank Dunia (World Bank). Dana hasil Right Issue II tersebut telah digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dan disalurkan sepenuhnya untuk meningkatkan aktiva produktif Perseroan.

Dan akhirnya, diusianya yang ke-60, Bank NISP semakin memantapkan posisinya di kancah perbankan nasional, sebagaimana tercermin dari banyaknya penghargaan yang diperoleh Perseroan disepanjang tahun 2001:

- February 2001: Bank NISP memperoleh penghargaan sebagai bank paling aktif dalam perdagangan obligasi atau kategori surat utang di Bursa Efek Surabaya selama tahun 2000.
- Mei 2001: Bank NISP dinobatkan sebagai salah satu bank publik terbaik sesuai hasil pemeringkatan oleh Majalah Investor bersama konsultan Arthur Andersen terhadap seluruh perusahaan (emiten) publik yang tercatat di Bursa Efek Jakarta.
- Agustus 2001: Majalah Infobank memberi peringkat "Sangat Bagus" berdasarkan hasil riset mereka terhadap seluruh bank di Indonesia
- November 2001 : Majalah Asian Business dari Hong Kong dalam survei "Asia's Most Admired Company" kembali menempatkan Bank NISP sebagai bank peringkat pertama dari Indonesia di antara 180 perusahaan yang paling dikagumi di Asia.
- Desember 2001: Bank NISP dinilai sebagai perusahaan publik yang memenuhi standar tata kelola perusahaan yang memadai oleh Asian Development Bank (ADB), Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Komite Nasional Kebijakan mengenai Good Corporate Governance.
- Januari 2002: dinobatkan sebagai "2001 Best Retail Bank for Indonesia" oleh the Asian Banker - Singapore. Selain itu Bank NISP juga memperoleh "Honourable Mentions for Product and Service Excellence Award" untuk produk Taka dengan asuransi.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2001, Perseroan memiliki 80 jaringan kantor yang tersebar di daerah Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Batam, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Jumlah ini meningkat dari tahun 1999 yaitu sebanyak 64 kantor, kemudian tahun 2000 menjadi sebanyak 72 kantor. Seiring dengan peningkatan jumlah kantor, jumlah karyawan pun meningkat 1.369 orang di tahun 1999 menjadi 1.574 orang di tahun 2000. Dan akhir tahun 2001 jumlah karyawan Perseroan tercatat sebanyak 1.740 orang.

Perseroan memfokuskan diri pada pembiayaan usaha skala kecil dan menengah. Dalam menjalankan aktivitasnya ini Perseroan memperoleh kepercayaan dalam bentuk pinjaman dari Export Import Bank of Japan dan beberapa lembaga keuangan terkemuka. Perseroan juga terlibat dalam program USAID di Indonesia

Perseroan menawarkan produk-produk jasa perbankan pada umumnya. Produk penghimpunan dana hadir dalam bentuk rekening giro, tabungan, deposito berjangka dan sertifikat deposito. Sedangkan bentuk-bentuk penyaluran dana antara lain dikenal dengan istilah kredit profesi, kredit ekspor, kredit konsumen dan kredit komersial. Perseroan juga memiliki divisi corporate finance yang antara lain terlibat dalam pemberian kredit berskala besar dan penasehat jasa keuangan.

2. KEUANGAN

2.1 *Pertumbuhan Pendapatan dan Beban Operasional*

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga Perseroan untuk masa dua belas bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001 adalah sebesar Rp 746,35 miliar, meningkat Rp 224,06 miliar atau 42,90% dibandingkan dengan tahun 2000. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aktiva produktif Perseroan dari Rp 4,8 triliun menjadi Rp 6,4 triliun.

Ditahun 2000, pendapatan bunga mengalami penurunan sebesar 4% dari Rp 545,90 miliar yang dihasilkan pada tahun 1999 menjadi Rp 522,29 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh tingkat suku bunga dari penempatan pada surat berharga (terutama dalam bentuk SBI) serta kredit yang disalurkan telah kembali kepada tingkat yang wajar apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 1998.

Rata-rata suku bunga atas penempatan dana Perseroan untuk tahun 1999, 2000 dan 2001 masing-masing adalah: 22,37%; 14,32% dan 16,00%.

Bila dilihat besarnya kontribusi pendapatan bunga terhadap total pendapatan operasional dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 masing-masing adalah 95,7%; 90,7% dan 91,4%.

Beban Bunga

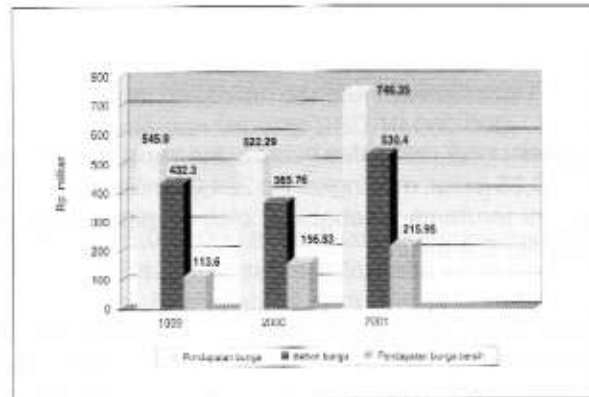
Beban bunga untuk masa dua belas bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001 adalah sebesar Rp 530,40 miliar, meningkat Rp 164,6 miliar atau sebesar 45% dibandingkan dengan tahun 2000. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya dana pihak ketiga dari Rp 4 triliun pada akhir tahun 2000 menjadi Rp 5,9 triliun pada akhir tahun 2001. Ditahun 2000, beban bunga mengalami penurunan sebesar 15% dari Rp 432,3 miliar pada tahun 1999 menjadi Rp 365,76 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan tingkat bunga pasar ke tingkat yang lebih wajar.

Rata-rata suku bunga atas penempatan dana pihak lain untuk tahun 1999, 2000 dan 2001, masing-masing adalah : 14,41%; 9,8% dan 11,7%.

Pendapatan Bunga Bersih

Per 31 Desember 2001, Perseroan berhasil memperoleh pendapatan bunga bersih sebesar Rp 215,95 miliar, dimana mengalami kenaikan sebesar 38% dibandingkan dengan pendapatan bunga bersih tahun 2000 sebesar Rp 156,53 miliar. Pendapatan bunga bersih pada tahun 2000, juga meningkat sekitar 38% dibandingkan dengan pendapatan bunga bersih pada tahun 1999 yang berjumlah sebesar Rp. Rp. 113,6 miliar. Rasio untuk pendapatan bunga bersih yang dicapai selama 3 tahun terakhir mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 1999, 2000 dan 2001 masing-masing mencapai 3,18%; 3,29% dan 3,36%.

Grafik Pertumbuhan Pendapatan Bunga Bersih Tahun 1999, 2000 dan 2001

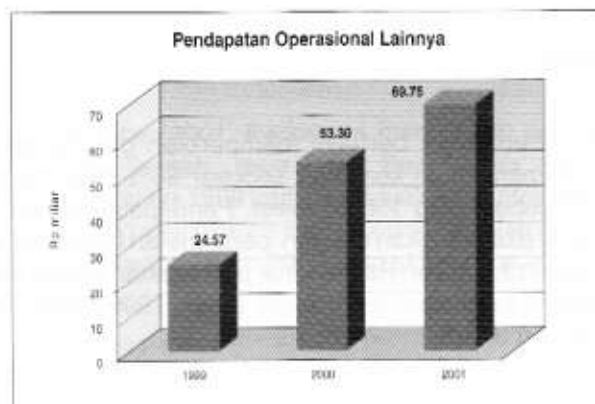


Pendapatan Operasional Lainnya

Komponen dari pendapatan operasional lainnya adalah provisi dan komisi yang diterima selain dari pemberian kredit, keuntungan efek, keuntungan bersih dari penyertaan saham dan pendapatan (operasional) lainnya. Pada tahun 2001 terdapat peningkatan sebesar 31% dari Rp 53,30 miliar pada tahun 2000 menjadi Rp 69,75 miliar. Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan nilai dari efek-efek yang dimiliki juga karena keuntungan atas transaksi pembelian dan penjualan efek.

Secara umum peningkatan bunga maupun provisi dan komisi kredit terutama dihasilkan dari peningkatan pinjaman yang diberikan selama 3 tahun terakhir ini, dari tahun 1999 - 2001 yaitu Rp 1.274,17 miliar pada tahun 1999, Rp 2.929,73 miliar pada tahun 2000 dan Rp 4.282,86 miliar pada tahun 2001. Sejak kuartal ke-IV tahun 1999 karena kondisi perekonomian mulai membaik, Perseroan mulai melakukan ekspansi kredit yang cukup berarti sehingga pertumbuhan kredit selama tahun 1999 - 2001 mengalami kenaikan yang menggembirakan.

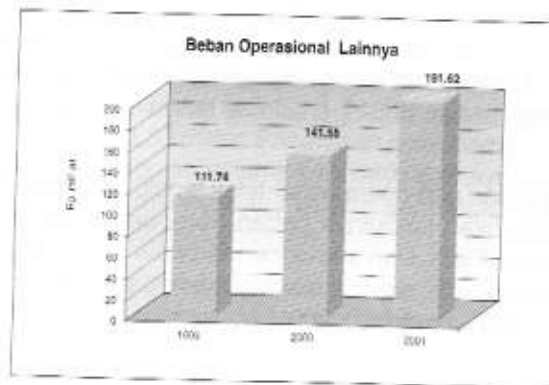
Grafik Pertumbuhan Pendapatan Operasional Lainnya Tahun 1999, 2000 dan 2001



Beban Operasional Lainnya

Beban operasional lainnya adalah beban diluar beban bunga yang meliputi biaya tenaga kerja, biaya umum dan administrasi, biaya penyisihan/penurunan aktiva produktif dan biaya lainnya berkenaan dengan operasional bank. Per tanggal 31 Desember 2001, Perseroan mencatat beban operasional lainnya sebesar Rp 191,62 miliar.

**Grafik Pertumbuhan Beban Operasional Lainnya
Tahun 1999, 2000 dan 2001**



Beban operasional lainnya untuk masa tiga tahun terakhir yang berakhir tanggal 31 Desember 2001 mengalami kenaikan masing-masing sebesar 27% pada tahun 2000 dan 35% pada tahun 2001. Hal ini disebabkan karena pengembangan usaha dan perluasan jaringan kantor sehingga meningkatkan biaya-biaya yang berhubungan dengan aktiva tetap, personalia, komunikasi dan lainnya

Laba Operasional

Laba operasional per 31 Desember 2001 tercatat sebesar Rp 94,08 miliar, sedangkan pada dua tahun sebelumnya laba operasional hanya mencapai Rp 68,28 miliar pada tahun 2000 dan Rp 26,43 pada tahun 1999.

Tahun 1999 perolehan laba operasional Perseroan menurun sekitar 23,5% dibandingkan pencapaian laba operasional tahun 1998, hal ini akibat dari dampak kondisi perekonomian nasional yang menyebabkan tingginya kredit bermasalah dan rendahnya penyaluran kredit oleh Perseroan.

Pada tahun 2000 jumlah laba operasional Perseroan meningkat drastis sebesar 158,4% atau mencapai Rp 68,28 milyar yang disebabkan oleh mulai pulihnya kondisi perekonomian, peningkatan aktiva produktif dan tambahan pendapatan dari pemilikan/penjualan surat-surat berharga serta pendapatan yang diterima dari perusahaan anak perusahaan.

Kondisi tersebut berlanjut ke tahun 2001, dimana laba operasional Perseroan meningkat lagi sekitar 38% atau mencapai Rp 94,08 miliar seiring dengan meningkatnya aktiva produktif Perseroan dari Rp 4,8 triliun menjadi Rp 6,4 triliun.

Pendapatan Non-Operasional

Pendapatan non-operasional per tanggal 31 Desember 2001 adalah sebesar Rp 2,65 miliar, menurun sekitar 41% dibandingkan pendapatan non-operasional yang dicapai pada tahun 2000 sebesar Rp 4,46 miliar. Kondisi tersebut disebabkan oleh laba yang diperoleh dari penjualan agunan yang diambil alih pada tahun 2001 tidak sebesar yang diperoleh pada tahun 2000.

Pendapatan non-operasional yang dicapai pada tahun 2000 meningkat sekitar Rp 4 miliar dari Rp 0,41 miliar. Hal ini disebabkan pada tahun 2000 Perseroan memperoleh keuntungan dari laba penjualan jaminan yang dibeli sekitar Rp 3 miliar.

Beban Non-Operasional

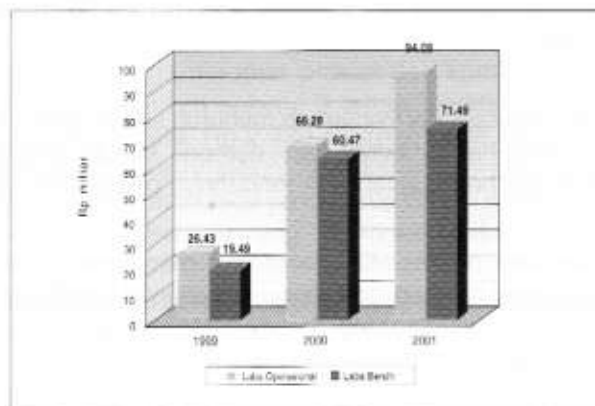
Beban non-operasional untuk masa yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001 adalah sebesar Rp 1,88 miliar, menurun sebesar Rp. 0,11 miliar dari beban non-operasional selama tahun 2000 sebesar Rp 1,99 miliar. Sebaliknya pada tahun 2000 jumlah beban non-operasional meningkat sebesar Rp 0,16 miliar dibandingkan beban non-operasional tahun 1999 sebesar Rp 1,82 miliar.

Terlihat bahwa perubahan beban non-operasional tidak terlalu bergejolak dari tahun ke tahun. Adapun faktor utama yang menyebabkan timbulnya beban non-operasional adalah rugi penjualan aktiva tetap dan agunan yang diambil alih. Dan komponen terbesar biaya non-operasional adalah rugi atas penjualan agunan yang diambil alih, dimana masing-masing sebesar Rp 1,5 miliar pada tahun 1999, Rp 1,3 miliar pada tahun 2000 dan tahun 2001.

Laba Bersih

Pada tahun 2001, Laba bersih yang diperoleh Perseroan mencapai Rp 71,49 miliar meningkat 18% dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2000 yang sebesar Rp 60,67 miliar. Laba bersih pada tahun 2000 meningkat sebesar 211% dari pencapaian laba bersih pada tahun 1999 yang sebesar Rp 19,49 miliar.

Grafik Pertumbuhan Laba Operasional dan Laba Bersih Tahun 1999, 2000 dan 2001



Peningkatan laba Perseroan pada tahun 2000 dan 2001 disebabkan oleh pulihnya perekonomian nasional sehingga meskipun interest margin tidak dapat dicapai setinggi tahun-tahun lalu sebelum atau saat krisis, namun pendapatan non bunga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dan juga pendapatan dari perusahaan afiliasi memberikan kontribusi yang tidak kecil.

2.2 Pertumbuhan Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas

Aktiva

Peningkatan volume usaha yang dicapai Perseroan terlihat dari peningkatan total aktiva dari tahun ke tahun yang mana sejalan dengan peningkatan jumlah aktiva produktif yang ditempatkan Perseroan. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (1999 - 2001), Perseroan mencatat pertumbuhan aktiva rata-rata sebesar 39% setiap tahunnya.

Total aktiva pada tahun 2001 sebesar Rp 7.137,37 miliar atau meningkat sekitar 36% dibandingkan dengan total aktiva pada tahun 2000 yang sebesar Rp 5.261,02 miliar. Ditahun 2000, Perseroan berhasil meningkatkan total aktivanya hingga 30% dari Rp 4.044,07 miliar pada tahun 1999.

Hal ini sejalan dengan peningkatan total kredit yang pada tahun 2001 dan 2000 meningkat masing-masing sekitar 46% pada tahun 2001 dan sebesar 130% pada tahun 2000, dan secara keseluruhan ditahun 2001 ini total aktiva produktif Perseroan meningkat sekitar 35%.

Untuk penempatan pada pos surat berharga, pada tahun 2001 meningkat sekitar 21% dari Rp 1.439,82 miliar pada tahun 2000 menjadi Rp 1.742,92 miliar, dan untuk tahun 2000 itu sendiri menurun sekitar 26% dari Rp 1.952,33 miliar. Penurunan surat berharga pada tahun 2000 diakibatkan karena Perseroan mulai mengalihkan penanaman dananya dari surat berharga kepada kredit, dimana hal ini sejalan dengan pulihnya perekonomian nasional serta dalam rangka menjalankan fungsinya kembali sebagai lembaga intermediasi keuangan.

Untuk penempatan dalam bentuk penyertaan, pada tahun 2000 mengalami peningkatan dari Rp 41,16 miliar menjadi Rp 120,44 miliar. Hal ini disebabkan oleh peningkatan penyertaan yang dilakukan Perseroan pada awal tahun 2000, dari Rp 41,3 miliar menjadi Rp 92,3 miliar serta adanya pengakuan pendapatan atas kepemilikan diatas 20% dari PT Bank Daiwa Perdania dan PT NISP Sekuritas. Prosentase kepemilikan Perseroan di PT. Bank Daiwa Perdania sebesar 20,1% dan pada PT NISP Sekuritas sebesar 66,67%. Pada tahun 2001, pos penyertaan meningkat sekitar 16% menjadi Rp 140,17 miliar.

Kewajiban

Komponen kewajiban terbesar Perseroan berasal dari dana pihak ketiga (masyarakat), dan komponen lainnya adalah surat berharga yang diterbitkan dan pinjaman diterima.

Pada tahun 2001, Perseroan mencatat total kewajiban sebesar Rp 6.658,02 miliar. Pertumbuhan total kewajiban pada tahun 2001 sekitar 36% dari Rp 4.881,42 miliar, sedangkan pada tahun 2000 pertumbuhan total kewajiban sekitar 31% dari Rp 3.718,52 miliar ditahun 1999.

Dalam kurun waktu tiga tahun (1999 - 2001), secara rata-rata dana pihak ketiga mengalami pertumbuhan sebesar 51,27%, mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap Perseroan.

Tingginya kepercayaan masyarakat pada Perseroan ditengah-tengah kondisi krisis perbankan menyebabkan dana pihak ketiga pada akhir tahun 1999 tetap meningkat sebesar 60,6% dibandingkan penghimpunan dana pada akhir 1998 atau mencapai Rp 2,7 triliun.

Peningkatan terus berlanjut, dimana pada tahun 2000 Perseroan berhasil mencapai kenaikan dana pihak ketiga sebesar 44,9% atau mencapai Rp 4 triliun dan pada akhir tahun 2001 meningkat sebesar 48,4% atau mencapai Rp 5,9 triliun.

Peningkatan dana pihak ketiga ini, pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap peningkatan yang pesat pada total aktiva Perseroan.

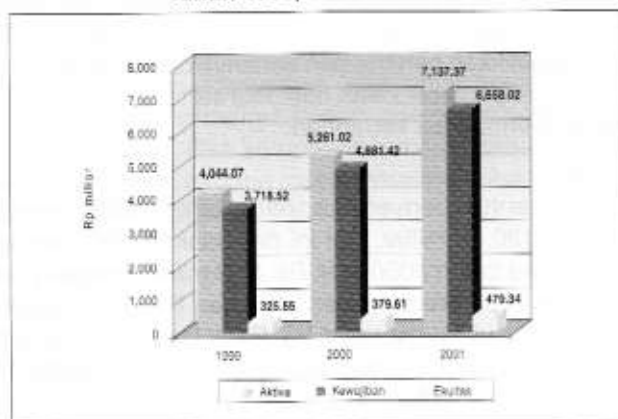
Untuk komponen pinjaman yang diterima, dalam kurun waktu tiga tahun (1999-2001) mengalami penurunan yang disebabkan adanya angsuran pokok dan jatuh tempo atas pinjaman yang diterima oleh Perseroan, sehingga pada tahun 2001 dan 2000 pinjaman yang diterima menurun masing-masing sebesar 29% pada tahun 2001 dan 21% pada tahun 2000.

Ekuitas

Total ekuitas pada tahun 2001 sebesar Rp 479,34 miliar atau meningkat sebesar 26% dari Rp 379,61 miliar pada tahun 2000. Total ekuitas pada tahun 1999 sebesar Rp 325,55 miliar, sehingga pada tahun 2000 total ekuitas Perseroan meningkat sebesar 17% dibandingkan dengan tahun 1999.

Peningkatan ekuitas disebabkan oleh adanya peningkatan laba bersih yang diperoleh pada tahun 2001 sebesar 18% dan ditahun 2000 terjadi kenaikan sebesar 211% serta adanya penambahan modal disetor dari IFC sebesar Rp 46,48 melalui Right Issue II tahun 2001.

Grafik Pertumbuhan Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas Tahun 1999, 2000 dan 2001



2.3 Pertumbuhan Aktiva dan Kewajiban dalam valuta asing

Berikut adalah tabel pertumbuhan aktiva dan kewajiban dalam valuta asing beserta rekening administratifnya dalam valuta asing:

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		
	1999	2000	2001
Aktiva	865.694	1.170.042	1.556.640
Pasiva	879.305	1.119.792	1.556.334
Aktiva Rekening Administratif	7.100	84.336	14.560
Pasiva Rekening Administratif	0	93.520	13.842
Posisi Devisa Netto (PDN)	(6.511)	41.066	1.024

Posisi aktiva dalam valuta asing pada tahun 2001 dan 2000 masing-masing meningkat sebesar 33% dan 35% dan posisi kewajiban dalam valuta asing pada tahun 2001 dan 2000 sebesar masing-masing meningkat sebesar 39% dan 27%

Peningkatan aktiva dan kewajiban dalam valas, disamping peningkatan volume disebabkan oleh faktor kurs yang meningkat cukup tajam, sebagaimana terlihat pada pergerakan nilai kurs USD secara berturut-turut Rp 7.100 pada akhir tahun 1999, Rp 9.595 pada akhir tahun 2000 dan kemudian terdapat kenaikan lagi sehingga mencapai Rp 10.400 pada akhir tahun 2001.

Posisi PDN dari tahun 2000 dan 2001 masing-masing adalah 0,26% dan 10,73% dan posisi PDN tersebut ini masih berada dalam batas ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2.4 Imbal Hasil

Meningkatnya total aktiva dan ekuitas Perseroan sebagaimana telah diuraikan dalam point-point terdahulu, karena adanya peningkatan total kredit yang diberikan dan laba bersih yang diperoleh Perseroan sehingga rasio imbal hasil (sebelum pajak) terhadap aktiva dan ekuitasnya pun naik dalam kurun tahun 1999, 2000 dan 2001, yaitu dari 7,84% pada tahun 1999 menjadi 20,16% pada tahun 2000 dan tahun 2001 menjadi 22,06%.

Sedangkan imbal hasil (sebelum pajak) terhadap aktiva rata-rata (Return on Average Assets - ROAA) untuk tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 masing-masing tercatat 0,74%, 1,53% dan 1,53%. Pada tahun 1999, ROAA relatif kecil karena peningkatan total aktiva jauh melebihi dari kenaikan laba bersih sebagai dampak dari krisis ekonomi yang mengakibatkan turunnya kualitas aktiva bank. Tetapi pada tahun 2000 dan 2001 terdapat kenaikan yang disebabkan membaiknya kondisi perekonomian sehingga laba yang diperoleh Perseroan pun meningkat.

2.5 Likuiditas

Perseroan selalu memenuhi ketentuan Giro Wajib Minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu Bank Indonesia menetapkan besarnya Giro Wajib Minimum sebesar 5% untuk Rupiah, dan 3% untuk valuta asing.

Rasio Giro Wajib Minimum Perseroan pada tahun 1999, 2000 dan 2001 adalah sebagai berikut :

	31 Desember		
	1999	2000	2001
Ketentuan Posisi Giro Wajib Minimum Rupiah	5%	5%	5%
Saldo Giro BI (dalam jutaan rupiah)	135.968	198.499	237.540
Rata-Rata Kewajiban (dalam jutaan rupiah)	2.608.446	3.635.006	4.530.585
Giro Wajib Minimum Rupiah	5,21%	5,46%	5,24%
Ketentuan Posisi Giro Wajib Minimum Valas	3%	3%	3%
Saldo Giro BI (dalam ribuan USD)	3.440	3.500	9.435
Rata-Rata Kewajiban (dalam ribuan USD)	106.003	113.085	146.126
Giro Wajib Minimum Valas	3,25%	3,10%	6,46%

Posisi likuiditas dalam bentuk kas, giro, penempatan antar bank dan surat berharga pada tahun 1999 sampai dengan 2001 adalah Rp 2.403,07 pada tahun 1999, Rp 1.891,18 miliar pada tahun 2000 dan Rp 2.319,89 miliar pada tahun 2001. Sementara itu rasio giro wajib minimum yang dipelihara per periode 31 Desember 2001 adalah 5,24% untuk rupiah dan 6,46% untuk valas.

2.6 Solvabilitas

Perseroan selalu menjaga rasio LDR-nya (Loan to Deposit Ratio) senantiasa berada dalam batas-batas yang sehat menurut ketentuan Bank Indonesia, dimana nilai maksimum menurut ketentuan adalah 115%.

Sejak krisis ekonomi yang melanda negara kita pada pertengahan 1997, banyak pengusaha tidak melakukan ekspansi usaha, demikian juga halnya dengan Perseroan dimana harus lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit guna menghindari kredit macet, sehingga LDR pada tahun 1999 hanya mencapai 34,15%. Untuk kemudian, sejak adanya perbaikan ekonomi, LDR-pun mulai meningkat kembali hingga mencapai 59,29% pada tahun 2000 dan 66,33% pada tahun 2001.

2.7 Prinsip-Prinsip Perbankan yang Sehat seperti Capital Adequacy, Asset Quality, Management, Earning Sustainability dan Liquidity (CAMEL)

Kecukupan Modal (Capital Adequacy)

Modal merupakan salah satu faktor yang penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung resiko kerugian. Semakin tinggi modal yang dimiliki oleh bank maka akan mempertinggi rasio kecukupan modal (CAR). Dengan demikian, CAR yang lebih tinggi dari tingkat minimum membuat bank semakin kuat karena kemampuannya yang lebih tinggi dalam menampung kerugian.

CAR Perseroan pada akhir tahun 2001 seharusnya sekitar 12% namun turun menjadi 9,02% karena adanya ketentuan Bank Indonesia yang baru dikeluarkan dan langsung diberlakukan pada tanggal dikeluarkannya peraturan tersebut. Peraturan dimaksud adalah Peraturan Bank Indonesia No. 3/21/PBI/2001 yang dikeluarkan per tanggal 13 Desember 2001, tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum. Peraturan BI tersebut mengharuskan agar semua bank mengurangi jumlah penyertaan dalam perhitungan CAR sebesar jumlah penyertaan mereka di lembaga lain dan afiliasinya.

Perseroan memiliki penyertaan di PT Bank Daiwa Perdania, PT Bank OCBC-NISP, PT NISP Sekuritas, dimana nilai total penyertaannya tersebut sebesar Rp 152,1 miliar. Dengan demikian, jumlah tersebut mengurangi total modal Perseroan dalam menghitung CAR. Namun CAR Perseroan tetap melebihi batas minimum 8% yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.

Tabel dibawah ini menunjukkan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum, termasuk rasio kecukupan modal (CAR) Perseroan untuk periode 31 Desember 1999, 2000 dan 2001.

(dalam jutaan Rupiah)

Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum	31 Desember		
	1999	2000	2001
I. KOMPONEN MODAL			
A. MODAL INTI			
1. Modal Disetor	274,611	274,611	303,969
2. Cadangan Tambahan Modal (disclosed reserves)			
a. Agio saham	14,236	13,116	30,240
b. Disagio	0	0	0
c. Modal sumbangan	0	0	0
d. Cadangan umum dan tujuan	0	0	0
e. Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak	17,214	31,213	73,640
f. Rugi tahun-tahun lalu	0	0	0
g. Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak (50%)	9.745	30,333	35,746
h. Rugi tahun berjalan	0	0	0
i. Selisih penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri			
- Selisih lebih	0	0	0
- Selisih kurang	0	0	0
k. Dana setoran modal	0	0	0
l. Penurunan nilai penyertaan pada portopolio tersedia untuk dijual	0	0	0
3. Goodwill (maks. 100% dari modal inti)	0	0	0
1. Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap	0	0	0
2. Cadangan Umum PPAP (maks.1,25% dari ATMR)	28,985	33,480	55,251
3. Modal pinjaman.	0	0	0
4. Pinjaman Subordinasi (maks. 50% dari modal inti)	0	0	52,000
5. Peningkatan harga saham pada portopolio tersedia untuk dijual (45%)	0	0	0
II. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A+B)	344,791	382,753	550,846
III. PENYERTAAN	0	0	152,145
IV. TOTAL MODAL (II - III)	344,791	382,753	398,701
V. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR)	2.324.956	3,849,998	4,420,070
VI. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA (IV:V)	14,83%	9.94%	9.02%
VII.RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YG DIWAJIBKAN	4%	4%	8%

Kualitas Aset (Asset Quality)

Krisis ekonomi yang dialami oleh Indonesia merupakan penyebab menurunnya kualitas aktiva produktif yang dimiliki oleh Perseroan, akibat melemahnya kemampuan sektor riil dan dunia usaha dalam memenuhi kewajibannya kepada Perseroan. Sebagai dampaknya, maka pengembalian kredit yang diberikan dari sebagian nasabah menjadi menurun baik secara kualitas maupun kuantitas.

Namun memasuki tahun 2000, kualitas aktiva produktif Perseroan membaik karena hasil usaha penagihan yang terus menerus, restrukturisasi dan penghapusbukuan. Hal ini mengakibatkan rasio NPL Perseroan pada akhir tahun 2001 berada pada tingkat di bawah 5%, yaitu sebesar 4,09%.

Tabel dibawah ini menunjukkan perkembangan persentase kredit bermasalah untuk periode 31 Desember 1999, 2000 dan 2001.

Kategori Kredit Berdasarkan Kolektibilitas	31 Desember		
	1999	2000	2001
Lancar (%)	83,0%	88,9%	95,3%
Dalam Perhatian Khusus (%)	2,9%	5,0%	0,6%
Kurang Lancar (%)	6,8%	1,5%	2,8%
Diragukan (%)	3,3%	0,4%	0,2%
Macet (%)	4,0%	4,2%	1,1%
Kredit Bermasalah (%)	14,11%	6,11%	4,09%
Jumlah Kredit yang Diberikan (%)	100,0%	100,0%	100,0%

Fasilitas kepada pihak yang terkait dengan Perseroan pada umumnya diberikan kepada perusahaan afiliasi yang jumlahnya tidak terlalu besar dan umumnya relatif lancar. Adapun rincian jumlah fasilitas kepada pihak yang terkait dengan Perseroan pada 31 Desember 2001 adalah sebagai berikut:

(dalam miliar rupiah)

Fasilitas kepada pihak terafiliasi	
Kredit yang diberikan	1,07
Penempatan dana	-
Total fasilitas kepada pihak terafiliasi	1,07
Total aktiva	7,137,37
Persentase fasilitas pihak terafiliasi terhadap total aktiva	0,01%

Sedangkan pinjaman yang diberikan kepada pegawai merupakan uang muka yang diperhitungkan dengan gaji setiap bulan sebagai angsuran.

Sering dengan memburuknya kualitas kredit yang diberikan pada awal tahun 1998, maka Perseroan telah meningkatkan penyisihan penghapusan untuk kredit bermasalah secara penuh (full provision) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Tabel berikut menunjukkan perkembangan penyisihan untuk kredit bermasalah untuk periode 31 Desember 1999, 2000 dan 2001.

Penyisihan Penghapusan Kredit	31 Desember		
	1999	2000	2001
Kredit yang diberikan	1.348,63	3.024,90	4.355,09
Penyisihan penghapusan kredit			
- Saldo awal periode	75,25	74,45	95,17
- Penyisihan selama periode berjalan	7,44	27,14	30,34
- Penerimaan kembali kredit yang telah dihapuskan	0,24	0,16	0,60
- Penghapusan kredit	(8,48)	(6,58)	(57,47)
- Selisih kurs	-	-	3,60
- Saldo akhir periode	74,45	95,17	72,24

Kemampuan Manajemen (Management)

Penilaian terhadap manajemen resiko meliputi kualitas manajemen resiko, resiko pasar, resiko kredit, resiko operasional, resiko hukum, resiko pemilik dan pengurus. Perseroan berusaha menekan berbagai resiko yang mungkin timbul dari aktivitas operasi perbankan termasuk pula resiko atas kredit yang telah diberikan dengan selalu berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dalam setiap kebijakannya dan selalu memperhatikan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Perseroan memiliki standar khusus dalam pemberian kredit yaitu dengan melakukan proses dan analisa rinci seperti penilaian atas karakter, kemampuan nasabah, kelayakan usaha dan nilai jaminan yang diberikan atas besarnya pemberian kredit serta kondisi ekonomi secara umum dan industri yang dibiayai secara khusus.

Perseroan memiliki manajemen yang ditunjang oleh para anggota Direksi Perseroan dan diawasi oleh jajaran anggota Komisaris Perseroan yang telah berpengalaman dibidang perbankan. Perseroan dalam jajaran pejabat seniornya juga ditunjang oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas serta pengalaman luas dalam industri perbankan dan keuangan.

Perseroan selalu berpegang teguh pada keyakinan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu aset terpenting dalam memajukan usahanya. Guna meningkatkan sumber daya manusia yang bardaya guna, Perseroan secara konsisten dan berkala melakukan pelatihan karyawannya dimana mereka diberikan pelatihan sesuai dengan bidangnya sehingga karyawan yang bersangkutan dapat bekerja lebih produktif. Program pelatihan yang diadakan terdiri dari pelatihan internal maupun eksternal.

Kualitas Pendapatan (Earnings Sustainability)

Pendapatan Perseroan terutama berasal dari pendapatan bunga yang sangat dipengaruhi oleh kualitas aktiva produktif yang dimiliki oleh Perseroan. Oleh karena itu Perseroan selalu mengacu pada prinsip kehati-hatian dalam mengelola aktiva produktif yang dimilikinya (prudent banking).

Pendapatan bunga dari penempatan surat berharga yang dulu merupakan salah satu sumber utama pendapatan Perseroan, kini telah diimbangi dengan pendapatan bunga dari penyaluran kredit. Selain itu, Perseroan telah berusaha untuk meminimalkan resiko kredit dengan melaksanakan program pelunasan kredit yang intensif untuk mengantisipasi kelancaran aktivitas operasional Perseroan. Usaha tersebut telah berhasil membantu Perseroan dalam meningkatkan pendapatan bunga sekaligus mampu menjaga kualitas aktiva produktif yang dimiliki hingga saat ini.

Guna menunjang strategi pemasaran Perseroan, telah direncanakan untuk melakukan pembukaan cabang-cabang baru di kota-kota dan lokasi-lokasi yang dipandang strategis yang nantinya akan semakin memperkuat posisi Perseroan di industri perbankan nasional sehingga rentabilitas Perseroan akan lebih terjamin.

Likuiditas (Liquidity)

Penilaian terhadap faktor likuiditas dilakukan dengan menilai rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank (Loan to Deposit Ratio) dan ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 5% dan 3% masing-masing untuk total simpanan dan kewajiban lainnya dalam bentuk rupiah dan bentuk valuta asing. Manajemen Perseroan selalu berusaha untuk menjaga tingkat likuiditas Perseroan pada level tertentu agar dapat memenuhi kebutuhan nasabah tepat pada waktunya. Perseroan selama ini telah berhasil memenuhi ketentuan GWM yang dipersyaratkan dan menjaga rasio LDR-nya berada dalam klasifikasi sehat menurut Bank Indonesia.

Tabel di bawah ini menunjukkan posisi rasio LDR Perseroan untuk periode 31 Desember 1999, 2000 dan 2001.

	31 Desember		
	1999	2000	2001
Satas Maksimum LDR	110,00%	110,00%	110,00%
Total Kredit (dalam jutaan rupiah)	1.348.625	3.024.895	4.355.094
Total Dana + Modal Inti (dalam jutaan rupiah)	3.949.122	5.101.690	6.565.999
LDR Perseroan	34,15%	59,29%	66,33%

2.8. Pemasaran dan Operasional

Dalam mengantisipasi pulihnya perekonomian nasional dan sektor perbankan Perseroan akan berkonsentrasi kedalam bisnis ritel perbankan, mencakup aktivitas penyaluran kredit kepada perusahaan dengan skala menengah serta skala kecil dan penyediaan jasa perbankan secara lengkap kepada masyarakat. Aktivitas bisnis ritel dewasa ini memiliki peran yang semakin penting mengingat potensinya yang terus berkembang, dan disisi lain bisnis ini berkontribusi penting terhadap pengumpulan dana dan pendapatan fee bagi Perseroan.

Perseroan memfokuskan target pasarnya pada segmen usaha kecil dan menengah. Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa strategi ini akan dapat mengoptimalkan tingkat keuntungan bank di satu pihak, dan dilain pihak mengandung resiko kredit yang relatif kecil. Perhatian yang cukup besar kepada segmen ini didasari oleh prospek dan peran bisnis berskala kecil dan menengah yang akan semakin besar juga karena kinerjanya relatif mampu bertahan ditengah krisis. Umumnya segmen ini berbasiskan pada sumber daya dalam negeri serta memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan ekonomi.

Perseroan dalam penyaluran kredit yang diberikan dan dana pihak ketiga menganut kebijakan yang sangat konservatif dan berhati-hati dalam pertumbuhan aktiva terutama pertumbuhan pinjaman yang diberikan, akan tetapi cukup agresif dalam menghimpun dana pihak ketiga.

Perseroan juga menyadari bahwa dalam era globalisasi, persaingan di sektor perbankan akan semakin ketat, oleh karena itu Perseroan akan memperluas jaringan kantornya ke daerah-daerah yang berpotensi, dengan meningkatkan fleksibilitas produk dan jasa perbankan tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian yang selama ini menjadi ciri utama strategi Perseroan.

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam mendukung pemasaran produk adalah unsur pelayanan yang tepat, cepat dan ramah. Disamping berusaha terus meningkatkan sumber daya manusia, dipersiapkan pula elemen-elemen penunjang lainnya, yaitu perangkat-perangkat pendukung di bidang teknologi, perluasan jaringan koresponden, serta penyediaan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) di berbagai kantor cabang Perseroan. Upaya lain untuk meningkatkan pelayanan adalah dengan pembukaan kantor-kantor operasional di tempat-tempat yang strategis.

2.9. Kondisi Industri Perbankan Saat Ini

Sebagai hasil dari berbagai kebijakan perbankan yang ditempuh Pemerintah dan Bank Indonesia pada beberapa tahun terakhir, kinerja industri perbankan mulai menunjukkan kemajuan. Beberapa indikator kinerja, khususnya menyangkut pemenuhan CAR minimum 8% dan NPLs 5% menunjukkan perbaikan.

Jumlah bank yang mencapai tingkat CAR sebesar 8% sampai dengan November 2001 sebanyak 138 dari 145 bank. Berarti, secara umum struktur permodalan bank mengalami perbaikan yang cukup berarti dibandingkan dengan kondisi diawal krisis pada pertengahan tahun 1997. NPL juga telah mengalami perbaikan yang cukup signifikan yaitu mencapai 12,1% dari 18,8% pada tahun 2000. Hal ini terutama disebabkan karena adanya penghapusbukuan kredit macet, restrukturisasi dan penyelesaian kredit, pengalihan kredit ke BPPN, serta penyaluran kredit baru.

Net Interest Margin (NIM) perbankan meningkat rata-rata Rp 1,9 triliun pada tahun 2000 menjadi Rp 3,2 triliun pada tahun 2001. Indikator ini menunjukkan membaiknya kinerja perbankan dilihat dari sisi profitabilitas.

Namun demikian, peningkatan NIM ini terutama berasal dari spread positif karena naiknya suku bunga SBI dan besarnya penerimaan obligasi pemerintah yang mencapai sekitar 45,3% dari total pendapatan bunga. Sementara itu, pendapatan bunga dari kredit perbankan hanya tercatat sebesar 32,2%.

Tingginya ketergantungan perbankan terhadap penerimaan bunga obligasi mengindikasikan proses restrukturisasi perbankan yang telah dilakukan masih belum mampu meningkatkan fungsi intermediasi perbankan secara keseluruhan.

Untuk memulihkan fungsi intermediasi perbankan, pemerintah dan Bank Indonesia akan mendorong perbankan untuk lebih banyak lagi menyalurkan kredit kepada sektor-sektor yang dianggap telah siap dan memiliki resiko yang relatif rendah seperti kredit bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan kredit ekspor dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat.

Selain itu, usaha untuk meningkatkan kesehatan bank juga akan didukung dengan upaya-upaya yang terus menerus untuk menekan angka NPL perbankan nasional dengan mewajibkan bank-bank untuk mencapai target NPL sebesar 5% pada akhir 2002. Di samping NPL, upaya untuk memelihara CAR bank-bank yang telah mencapai 8% terus dilakukan khususnya terhadap bank-bank yang struktur permodalannya masih rentan terhadap pengaruh kenaikan suku bunga dan melemahnya nilai tukar serta penurunan kualitas kredit.

3. PROSPEK USAHA

Perseroan yang didirikan di kota Bandung sejak tahun 1941, telah mengakar kuat di daerah Jawa Barat, sehingga wilayah Jawa Barat saat ini masih menjadi salah satu obyek pemasaran utama. Namun seiring dengan perubahan menuju ke ekonomi pasar bebas dan otonomi daerah, maka jaringan yang lebih luas akan terus dikembangkan. Saat ini Perseroan berhasil memperluas obyek pemasarannya ke wilayah lain seperti Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur dan luar Jawa seperti Pulau Bali, Pulau Batam, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan.

Kondisi umum perbankan nasional yang saat ini masih dalam tahap konsolidasi menciptakan peluang pasar yang sangat menarik bagi Perseroan. Perseroan yang berdiri sejak tahun 1941, dalam perjalanan usahanya telah melampaui beberapa masa krisis. Yang membuat Perseroan tetap bertahan dalam badai krisis perekonomian saat ini adalah berkat dipegang teguhnya prinsip kehati-hatian serta senantiasa menempatkan kesehatan bank sebagai prioritas utama.

Perseroan selama lima tahun terakhir tetap aktif dalam menjalankan fungsi intermediasi perbankan. Dan hal ini akan terus menjadi fokus utama perseroan di masa mendatang, khususnya ke bidang ritel. Dalam menghadapi resiko kredit bermasalah, Perseroan terus berupaya melakukan reengineering proses keputusan kredit yang berprinsip pada kehati-hatian tanpa mengabaikan faktor efisiensi dan rentabilitas. Untuk restrukturisasi kredit, Perseroan tetap berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Upaya yang dilakukan Perseroan didalam menjaga kualitas aktivitya, yaitu dengan cara:

- Secara proaktif memelihara semua kredit yang disalurkan,
- Mengintensifkan pemeliharaan kredit serta mengantisipasi munculnya kredit yang bisa menjadi masalah,
- Mengintensifkan upaya penagihan langsung maupun restrukturisasi kredit bermasalah.

Kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam rangka penyehatan perbankan mempunyai dampak yang luar biasa terhadap seluruh bank di Indonesia, demikian juga halnya dengan Perseroan. Disatu sisi Perseroan melihatnya sebagai tantangan besar untuk lebih meningkatkan profesionalisme dan prinsip kehati-hatian bank, namun di lain sisi sebagai peluang untuk meraih pangsa pasar yang lebih besar dengan terjadinya pergeseran signifikan dari pangsa pasar perbankan nasional.

Dari segi target pasar, Perseroan masih tetap berkeyakinan bahwa sesuai dengan pengalaman dan pemahamannya terhadap pangsa pasar ritel yang ditanganinya selama ini, maka sektor tersebut masih menjadi pangsa pasar utama dari Perseroan. Didukung pula oleh kenyataan bahwa dimasa sulit yang saat ini tengah dialami oleh dunia usaha, telah membuktikan bahwa sektor tersebutlah yang praktis masih mampu bertahan bahkan berpeluang untuk terus berkembang.

Era globalisasi yang akan segera berlangsung, mengharuskan Perseroan tetap kompetitif dan dapat terus bertahan dalam menjalankan usahanya, oleh karenanya Perseroan memandang perlu untuk meningkatkan kemampuan seluruh sumber daya yang dimilikinya. Visi Perseroan adalah terus berusaha menjadi salah satu lembaga keuangan terbaik yang berukuran cukup besar dan dasar yang kuat dengan kualitas dan pelayanan bertaraf international.

Halaman ini sengaja dikosongkan

V. RESIKO USAHA

Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi resiko yang mungkin dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan, apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Beberapa resiko yang diperkirakan dapat mempengaruhi usaha Perseroan secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

RESIKO KREDIT

Bagian terbesar dari aktiva yang dimiliki oleh Perseroan sebagai suatu bank adalah berupa kredit yang diberikan kepada para nasabahnya. Resiko kredit dapat timbul apabila kelancaran pembayaran kembali pokok pinjaman dan/atau bunga pinjaman mengalami gangguan. Apabila jumlah kredit yang tidak dapat dikembalikan cukup material maka dapat menurunkan kinerja Perseroan dalam memperoleh laba dan kondisi keuangan Perseroan secara keseluruhan.

RESIKO EKONOMI

Kondisi perbankan domestik tidak terlepas dari pengaruh perekonomian nasional dan internasional. Resiko ekonomi dapat timbul apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan sehingga dapat mempengaruhi seluruh kegiatan usaha Perseroan, baik dalam penghimpunan dana maupun pemberian kredit, pengembalian pokok kredit dan bunganya, serta aktivitas lainnya yang pada akhirnya dapat menurunkan kemampuan Perseroan dalam memperoleh laba.

RESIKO LIKUIDITAS

Sebagian besar pendanaan Perseroan berasal dari dana masyarakat yang relatif bersifat jangka pendek, sedangkan kredit yang diberikan memiliki jangka waktu yang relatif lebih panjang. Perbedaan jangka waktu tersebut harus dikelola dengan baik. Ketidaksesuaian antara jangka waktu penghimpunan dana dari masyarakat dan jangka waktu penempatan dana dapat menyulitkan Perseroan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya.

RESIKO KECUKUPAN PENYISIHAN PENGHAPUSBUKUAN KREDIT

Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina seluruh bank di Indonesia mensyaratkan adanya pembentukan penyisihan penghapusbukuan kredit sesuai dengan kategori kredit yang diberikan oleh Perseroan seperti lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Ketidakmampuan membentuk penyisihan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan-ketentuan Bank Indonesia, akan menurunkan tingkat kesehatan Perseroan dan pengembangan usaha Perseroan.

RESIKO KECUKUPAN MODAL

Peraturan Bank Indonesia mensyaratkan seluruh perbankan nasional untuk mencapai rasio kecukupan modal (CAR) minimal 4% pada tahun 2000, minimal 8% pada akhir tahun 2001. Apabila Perseroan tidak mampu mempertahankan rasio kecukupan modal tersebut, akan menurunkan penilaian tingkat kesehatan sehingga berdampak kurang menguntungkan terhadap kemampuan ekspansi usaha Perseroan.

RESIKO TINGKAT BUNGA

Resiko tingkat bunga adalah resiko kemungkinan turunnya pendapatan bunga bersih dan nilai pasar portofolio aktiva akibat perubahan tingkat bunga di pasar uang. Komposisi portofolio termasuk instrumen aktiva, pasiva dan rekening administratif cukup sensitif terhadap tingkat bunga. Karena aktiva dan pasiva seperti deposito pada bank lain, investasi dalam surat berharga, pinjaman, deposito berjangka, pinjaman jangka panjang dan kewajiban-kewajiban pasar uang lainnya, memiliki berbagai tingkat bunga dan jangka waktu, maka perubahan-perubahan pada tingkat bunga dapat mengakibatkan kenaikan atau penurunan pendapatan bunga bersih.

RESIKO PERSAINGAN

Pergeseran peta perbankan di Indonesia tidak berarti menurunnya tingkat persaingan bank-bank di Indonesia, namun sebaliknya akan meningkatkan persaingan sehat di antara bank-bank yang mampu bertahan dengan cara pembukaan kantor-kantor baru, penciptaan produk-produk yang menarik, persaingan suku bunga, maupun peningkatan pelayanan kepada nasabah. Banyak dari bank-bank tersebut bersaing untuk memperoleh nasabah yang sama dengan Perseroan. Dengan demikian, terdapat ketidakpastian Perseroan akan dapat meningkatkan atau mempertahankan besarnya portofolio simpanan, kredit, maupun pangsa pasarnya di masa yang akan datang akibat ketatnya persaingan yang terjadi, yang pada akhirnya dapat menurunkan pendapatan Perseroan.

RESIKO OPERASIONAL DAN TEKNOLOGI

Perseroan dapat dihadapkan pada resiko operasional yang disebabkan oleh lemahnya fungsi pengawasan intern dan tidak efektifnya sistem prosedur operasional. Sistem informasi teknologi yang tidak mendukung akan mengganggu kelancaran operasional dan mutu pelayanan kepada nasabah juga akan menurun, sehingga pada akhirnya akan memperkecil laba yang diperoleh Perseroan.

RESIKO KURS VALUTA ASING

Sebagai salah satu bank devisa, transaksi Perseroan tidak terlepas dari fluktuasi mata uang asing baik dari sisi aktiva maupun dari sisi kewajiban. Nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, sehingga apabila Perseroan memiliki posisi mata uang asing yang kurang menguntungkan dapat menimbulkan kerugian yang berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan.

RESIKO PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Industri perbankan memperoleh pengawasan yang cukup ketat dari Pemerintah karena kegiatan-kegiatannya banyak menyangkut kepentingan umum. Pengawasan yang ketat tersebut tercermin dari cukup banyaknya peraturan-peraturan Pemerintah mengenai perbankan yang terus menerus diperbaharui dari waktu ke waktu. Dikeluarkannya peraturan baru seringkali akan membawa dampak yang tidak kecil bagi Perseroan karena menuntut dilakukannya perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian akan cara dan pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan. Keterlambatan dalam mengantisipasi berbagai kebijakan Pemerintah tersebut akan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan yang pada akhirnya dapat menurunkan kinerja yang ditargetkan.

RESIKO INDUSTRI PERBANKAN SEHUBUNGAN DENGAN KRISIS EKONOMI

Dalam situasi perekonomian yang belum pulih sepenuhnya, perbankan dihadapkan kepada kondisi meningkatnya rata-rata suku bunga yang berakibat terciptanya kondisi negative spread. Disamping itu kondisi saat ini dimana masih belum tercapainya stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, memberikan pengaruh sangat besar terhadap ketidakmampuan debitur mengembalikan kredit dalam valuta asing yang diperolehnya dari bank, sehingga berakibat kepada meningkatnya tingkat kredit bermasalah yang akhirnya menurunkan kualitas aktiva produktif Perseroan. Kondisi negative spread dan kebutuhan untuk membentuk cadangan penyisihan bagi penghapusan aktiva produktif pada akhirnya mempengaruhi kemampuan Perseroan didalam menghasilkan laba.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000 dan 2001 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Robert Yogi dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen No. : NISP/43/PS/02, tanggal 5 April 2002.

Kejadian penting setelah tanggal laporan auditor, adalah perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) yang terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar) saham, dengan harga nominal tiap-tiap saham adalah Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), menjadi sebesar Rp 1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus miliar rupiah) yang terbagi atas 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta) saham, dengan harga nominal tiap-tiap saham adalah Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 67 tanggal 30 April 2002, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Keputusan No.C-07830 HT.01.04.TH2002, tanggal 6 Mei 2002.

Pada tanggal 17 Mei 2002, Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Ketua Bapepam sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas III kepada para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 810.584.200 (delapan ratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus) saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp 405,- (empat ratus lima Rupiah) setiap saham.

Setiap pemegang saham yang memiliki 3 (tiga) saham dengan nilai nominal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) setiap saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Juni 2002 pukul 16.00 WIB, mempunyai 2 (dua) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") untuk membeli sebanyak 2 (dua) saham baru dengan harga penawaran Rp 405,- (empat ratus lima Rupiah) setiap saham.

Tidak ada kejadian penting dan relevan setelah tanggal Laporan Keuangan Auditor Independen selain yang telah diungkapkan diatas.

Halaman ini sengaja dikosongkan

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Riwayat singkat Perseroan dari saat berdiri pada tahun 1941 sampai dengan Penawaran Umum Terbatas II dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Tahun 2000 dapat dilihat pada sub-judul riwayat singkat Perseroan yang telah disajikan dalam Prospektus Penawaran Umum Terbatas II dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Tahun 2000, Penawaran Umum Obligasi Bank NISP II Tahun 1999 Dengan tingkat Bunga Tetap dan Mengambang, Prospektus Penawaran Umum Terbatas I Tahun 1998, Prospektus Obligasi Bank NISP I Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap dan Mengambang dan Penawaran Umum Saham yang diterbitkan berturut-turut pada tanggal 17 Nopember 2000, 27 September 1999, 16 Nopember 1998, 29 Mei 1997, 22 September 1994.

Perseroan memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Keputusan No. D.15.6.2.27 tanggal 20 Juli 1967, izin sebagai bank devisa dengan Keputusan Bank Indonesia No. 23/9/KEP/DIR tanggal 19 Mei 1990, dan izin sebagai bank persepsi dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Keputusan No.S.35/MK.03/1993 tanggal 6 Januari 1993.

Setelah penerbitan prospektus Penawaran Umum Terbatas II dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Tahun 2000 hingga diterbitkannya Prospektus ini, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 67 tanggal 30 April 2002, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I dengan Surat Keputusan No.C-07830 HT.01.04.TH2002 tanggal 6 Mei 2002 dan telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 6 Mei 2002 dengan No.C-07831 HT.01.04.TH.2002, yang antara lain mengenai peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) menjadi sebesar Rp 1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus miliar rupiah).

2. PERKEMBANGAN STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan hingga saat Penawaran umum Terbatas II dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Tahun 2000 telah diuraikan dalam Prospektus Penawaran umum Terbatas II dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Tahun 2000, yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 Nopember 2000, dan selanjutnya sejak Penawaran umum Terbatas II hingga saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

17 Nopember 2000 - Sekarang

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.57 tanggal 22 Februari 2002, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Notaris di Jakarta, dinyatakan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas II, yaitu sejumlah 117.432.571 (seratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh satu) saham, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Modal dasar Bank NISP berjumlah Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar) saham, dengan harga nominal tiap-tiap saham adalah Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

- Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 1.215.876.301 (satu miliar dua ratus lima belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus satu) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya Rp. 303.969.075.250,00 (tiga ratus tiga miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 57 tanggal 22 Februari 2002 diatas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah saham	Jumlah nilai nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : (nilai nominal Rp 250 setiap saham)			
1. PT Suryasono Sentosa	223.202.857	55.800.714.250	18,36
2. PT Udayawira Utama	223.202.856	55.800.714.000	18,36
3. International Finance Corporation	116.875.000	29.218.750.000	9,61
4. Moore Investments Limited	83.508.346	20.877.086.500	6,87
5. Hurst Investments Limited	158.012.324	39.503.081.000	13,00
6. Stiles Investments Limited	158.012.325	39.503.081.250	13,00
7. Masyarakat	253.062.593	63.265.648.250	20,81
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.215.876.301	303.969.075.250	100,00
Jumlah saham dalam portepel	784.123.699	196.030.924.750	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 67 tanggal 30 April 2002, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I dengan Surat Keputusan No.C-07830 HT.01.04.TH2002, tanggal 6 Mei 2002, antara lain telah disetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) menjadi sebesar Rp 1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus miliar rupiah), sehingga dengan demikian struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Modal dasar Bank NISP berjumlah Rp. 1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah) yang terbagi atas 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta) saham, dengan harga nominal tiap-tiap saham adalah Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).
- Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 1.215.876.301 (satu miliar dua ratus lima belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus satu) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya Rp. 303.969.075.250,00 (tiga ratus tiga miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Struktur permodalan Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 8 Mei 2002 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah saham	Jumlah nilai nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	4.800.000.000	1.200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : (nilai nominal Rp 250 setiap saham)			
1. PT Suryasono Sentosa	223.202.857	55.800.714.250	18,36
2. PT Udayawira Utama	223.202.856	55.800.714.000	18,36
3. International Finance Corporation	116.875.000	29.218.750.000	9,61
4. Moore Investments Limited	83.508.346	20.877.086.500	6,87
5. Hurst Investments Limited	158.012.324	39.503.081.000	13,00
6. Stiles Investments Limited	158.012.325	39.503.081.250	13,00
7. Masyarakat	253.062.593	63.265.648.250	20,81
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.215.876.301	303.969.075.250	100,00
Jumlah saham dalam portepel	3.584.123.699	896.030.924.750	

3. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

a. PT Suryasono Sentosa

Pendirian

PT Suryasono Sentosa (selanjutnya disebut "Suryasono") didirikan berdasarkan Akta No. 182 tanggal 26 Januari 1994 yang dibuat di hadapan Lien Tanudirdja, S.H., Notaris di Bandung, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-7918.HT.01.01.Th.94 tanggal 19 Mei 1994, didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung di bawah No. 875 tanggal 2 Juni 1994, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 23 Agustus 1994, Tambahan No. 5893.

Anggaran Dasar Suryasono telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali diubah dalam rangka perubahan dan penyesuaian terhadap Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana ternyata dalam Akta No. 25 tanggal 18 Juni 1998 yang dibuat oleh Ny. Widyawati Witjaksana, S.H., pengganti dari Lien Tanudirdja, S.H., Notaris di Bandung, yang Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar untuk perubahan Pasal 1 dan Pasal 4 sampai dengan Pasal 27 menjadi Pasal 1 dan Pasal 4 sampai dengan Pasal 28 telah diterima dan dicatat oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 14 Oktober 1998 dengan No. C2-19895 HT.01.04.Th.98, dan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar untuk Pasal 2 dan Pasal 3 telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-19896 HT.01.04.TH.98 tertanggal 14 Oktober 1998; telah didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 April 1999 di bawah No. 856/BH 10.11/IV/1999, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 44 tanggal 1 Juni 1999, Tambahan No. 3235.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta No. 25 tanggal 18 Juni 1998, yang dibuat oleh Ny. Widyawati Witjaksana, S.H., pengganti dari Lien Tanudirdja, S.H., Notaris di Bandung, maksud dan tujuan Suryasono adalah mendirikan dan menjalankan usaha di bidang perindustrian, penunjang pertambangan, kehutanan, pengangkutan, pertanian, perkebunan, peternakan, pembangunan, perdagangan, jasa, dan sewa menyewa.

Permodalan

Berdasarkan Akta No. 25 tanggal 18 Juni 1998 yang dibuat oleh Ny. Widyawati Witjaksana, S.H., pengganti dari Lien Tanudirdja, S.H., Notaris di Bandung yang data perubahan Anggaran Dasarnya telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-19896.HT.01.04.TH.98 tanggal 14 Oktober 1998, didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 April 1999 di bawah No. 856/BH 10.11/IV/1999, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 44 tanggal 1 Juni 1999, Tambahan No. 3235, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Suryasono adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	20.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
1. dr. Pramana Surjaudaja	8.008.249	8.008.249.000	50,28
2. Karmaka Surjaudaja	4.330.279	4.330.279.000	27,19
3. Ny. Lelarati Lukman	2.516.620	2.516.620.000	15,80
4. Peter Eko Sutioso, S.H.	1.070.852	1.070.852.000	6,72
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.926.000	15.926.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.074.000	4.074.000.000	

Susunan pemegang saham tersebut di atas tidak berubah sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 21 tanggal 8 Maret 2000 yang dibuat di hadapan Lien Tanudirdja, S.H., Notaris di Bandung, susunan Direksi dan Komisaris Suryasono adalah sebagai berikut:

Komisaris

- Komisaris Utama : Karmaka Surjaudaja
- Komisaris : Peter Eko Sutioso, S.H.
- Komisaris : Ny. Lelarati Lukman

Direksi

- Direktur Utama : Ny. Sanitri Surjaudaja
- Direktur : drg. Rukita Sudarmono

Susunan Komisaris dan Direksi tersebut di atas tidak berubah sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

b. PT Udayawira Utama

Pendirian

PT Udayawira Utama (selanjutnya disebut "Udayawira") didirikan berdasarkan Akta No. 181 tanggal 26 Januari 1994, dibuat di hadapan Lien Tanudirdja, S.H., Notaris di Bandung, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-7919.HT.01.01.Th.94 tanggal 19 Mei 1994, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Bandung di bawah No. 877 tanggal 2 Juni 1994, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 23 Agustus 1994, Tambahan No. 5892.

Anggaran Dasar Udayawira telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir kali diubah dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata dalam Akta No. 28 tanggal 18 Juni 1998, yang dibuat di hadapan Ny. Widyawati Witjaksana, S.H., pengganti dari Lien Tanudirdja, S.H., Notaris di Bandung, yang datanya tertanggal 25 Juni 1998 telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-18790.HT.01.04.TH.98 tanggal 8 Oktober 1998.

Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Akta No. 28 tanggal 18 Juni 1998 yang dibuat di hadapan Ny. Widyawati Witjaksana, S.H., pengganti dari Lien Tanudirdja, S.H., Notaris di Bandung, maksud dan tujuan Udayawira adalah mendirikan dan menjalankan usaha di bidang perindustrian, pertambangan, kehutanan, pengangkutan, pertanian, perkebunan, peternakan serta perikanan darat/laut, real estate dan industrial estate, perdagangan umum, ekspor-impor barang yang diperkenankan Pemerintah, perdagangan keagenan dan komisi, leveransir/pemasok, grosir, distributor, supplier dan penyalur, bidang jasa kecuali jasa dalam bidang hukum, dan sewa menyewa barang bergerak dan tidak bergerak.

Permodalan

Berdasarkan Akta No. 28 tanggal 18 Juni 1998 yang dibuat di hadapan Ny. Widyawati Witjaksana, S.H., pengganti dari Lien Tanudirdja, S.H., Notaris di Bandung, struktur permodalan Udayawira adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	20.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Ny. Lelarati Lukman	12.305.925	12.305.925.000	78,45
2. Pramukti Surjaudaja	3.380.075	3.380.075.000	21,55
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.686.000	15.686.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.314.000	4.314.000.000	

Susunan pemegang saham tersebut di atas tidak berubah sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Udayawira No. 23 tanggal 8 Maret 2000, yang dibuat oleh Lien Tanudirdja, S.H., Notaris di Bandung, telah memutuskan susunan Direksi dan Komisaris Udayawira adalah sebagai berikut :

Komisaris

Komisaris Utama : Ny. Lelarati Lukman
 Komisaris : Tn. Karmaka Surjaudaja

Direksi

Direktur Utama : drg. Ny. Rukita Sudarmono
 Direktur : Ny. Sanitri Surjaudaja

Susunan Komisaris dan Direksi tersebut di atas tidak berubah sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

c. International Finance Corporation ("IFC")

IFC didirikan pada tahun 1956 dengan penandatanganan Articles of Agreement oleh 31 negara yang merupakan anggota International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) (World Bank).

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Articles of Agreement sebagaimana terakhir diubah pada tanggal 28 April 1993, maksud dan tujuan IFC adalah untuk perkembangan ekonomi dengan memacu pertumbuhan perusahaan swasta yang produktif di negara-negara anggota, khususnya di daerah-daerah yang belum berkembang, sehingga menjadi pelengkap kegiatan IBRD.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, IFC melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. bersama-sama dengan investor swasta, membantu pembiayaan untuk pendirian, pengembangan, dan perluasan perusahaan swasta sehingga akan memberikan kontribusi kepada pembangunan negara-negara anggota, melalui investasi, tanpa jaminan pembayaran dari pemerintah negara anggota yang bersangkutan, khususnya dalam hal modal swasta tidak tersedia dengan persyaratan-persyaratan yang layak.
- b. berusaha menyatukan kesempatan investasi, modal swasta baik domestik maupun asing, pengalaman manajerial; dan
- c. berusaha memicu dan membantu menciptakan kondisi yang kondusif bagi mengalirnya modal swasta, baik domestik maupun asing, ke dalam investasi yang produktif di negara-negara anggota.

Permodalan

Modal dasar IFC adalah sebesar US\$ 2,450,000,000,- yang terbagi dalam 2.450.000 saham dengan nilai nominal sebesar US\$ 1.000 per saham.

Keanggotaan

Anggota IFC terdiri dari negara-negara anggota IBRD (World Bank) yang telah menandatangani Articles of Agreement IFC. Hingga saat ini negara-negara anggota IFC terdiri dari 175 negara-negara anggota IBRD (World Bank) yang telah menandatangani Articles of Agreement IFC, sebagai berikut:

No.	Negara	Tahun Penandatanganan Articles of Agreement	No.	Negara	Tahun Penandatanganan Articles of Agreement
1	Afghanistan	1957	11	Bahamas, The	1986
2	Albania	1991	12	Bahrain	1995
3	Algeria	1990	13	Bangladesh	1976
4	Angola	1989	14	Barbados	1980
5	Antigua and Barbuda	1987	15	Belarus	1992
6	Argentina	1959	16	Belgium	1956
7	Armenia	1995	17	Belize	1982
8	Australia	1955	18	Benin	1987
9	Austria	1955	19	Bolivia	1956
10	Azerbaijan	1995	20	Bosnia-Herzegovina	1996

No.	Negara	Tahun Penandatanganan Articles of Agreement	No.	Negara	Tahun Penandatanganan Articles of Agreement
21	Botswana	1979	68	Haiti	1955
22	Brazil	1956	69	Honduras	1955
23	Bulgaria	1991	70	Hungary	1985
24	Burkina Faso	1975	71	Iceland	1955
25	Burundi	1979	72	India	1955
26	Cambodia	1997	73	Indonesia	1956 (melepaskan keanggotaan pada tahun 1961, dan bergabung kembali pada tahun 1968)
27	Cameroon	1974	74	Iran, Islamic Rep. of	1956
28	Canada	1955	75	Iraq	1956
29	Cape Verde	1990	76	Ireland	1958
30	Central African Rep.	1991	77	Israel	1956
31	Chad	1998	78	Italy	1956
32	Chile	1955	79	Jamaica	1964
33	China	1969	80	Japan	1956
34	Colombia	1955	81	Jordan	1956
35	Comoros	1992	82	Kazakhstan	1993
36	Congo, Democratic Republic of the	1970	83	Kenya	1964
37	Congo, Republic of	1980	84	Karibati	1986
38	Costa Rica	1955	85	Korea, Republik of	1964
39	Côte d'Ivoire	1963	86	Kuwait	1962
40	Croatia	1993	87	Kyrgyz Republic	1993
41	Cyprus	1962	88	Lao P.D.R.	1992
42	Czech Republic	1993	89	Latvia	1993
43	Denmark	1956	90	Lebanon	1956
44	Djibouti	1980	91	Lesotho	1972
45	Dominica	1980	92	Liberia	1962
46	Dominican Republic	1955 (melepaskan keanggotaan pada tahun 1960, dan bergabung kembali pada tahun 1961)	93	Libya	1958
47	Ecuador	1955	94	Lithuania	1993
48	Egypt, Arab Rep. of	1955	95	Luxembourg	1956
49	El Salvador	1956	96	Macedonia, FYR of	1993
50	Equatorial Guinea	1992	97	Madagascar	1963
51	Eritrea	1995	98	Malawi	1965
52	Estonia	1993	99	Malaysia	1958
53	Ethiopia	1956	100	Maldives	1983
54	Fiji	1979	101	Mali	1978
55	Finland	1956	102	Marshall Islands	1992
56	France	1956	103	Mauritania	1967
57	Gabon	1970	104	Mauritius	1968
58	Gambia	1983	105	Mexico	1955
59	Georgia	1995	106	Micronesia, Fed. States of	1993
60	Germany	1956	107	Moldova	1995
61	Ghana	1958	108	Mongolia	1991
62	Greece	1955	109	Morocco	1962
63	Grenada	1975	110	Mozambique	1984
64	Guatemala	1955	111	Myanmar	1956
65	Guinea	1982	112	Namibia	1990
66	Guinea-Bissau	1977	113	Nepal	1966
67	Guyana	1967	114	Netherlands	1955

No.	Negara	Tahun Penandatanganan Articles of Agreement	No.	Negara	Tahun Penandatanganan Articles of Agreement
115	New Zealand	1961	146	Sri Lanka	1956
116	Nicaragua	1955	147	Sudan	1960
117	Niger	1979	148	Swaziland	1969
118	Nigeria	1961	149	Sweden	1956
119	Norway	1956	150	Switzerland	1992
120	Oman	1973	151	Syrian Arab Republic	1962
121	Pakistan	1955	152	Tajikistan	1994
122	Palau	1997	153	Tanzania	1962
123	Panama	1955	154	Thailand	1956
124	Papua New Guinea	1975	155	Togo	1962
125	Paraguay	1955	156	Tonga	1985
126	Peru	1955	157	Trinidad and Tobago	1971
127	Philippines	1957	158	Tunisia	1962
128	Poland	1987	159	Turkey	1956
129	Portugal	1966	160	Turkmenistan	1997
130	Romania	1990	161	Uganda	1963
131	Russian Federation	1993	162	Ukraine	1993
132	Rwanda	1975	163	United Arab Emirates	1977
133	St. Kitts & Nevis	1996	164	United Kingdom	1955
134	St. Lucia	1982	165	United States	1955
135	Saudi Arabia	1962	166	Uruguay	1968
136	Senegal	1962	167	Uzbekistan	1993
137	Seychelles	1981	168	Vanuatu	1981
138	Sierra Leone	1962	169	Venezuela	1956
139	Singapore	1968	170	Viet Nam	1967
140	Slovak Republic	1993	171	Western Samoa	1974
141	Slovenia	1993	172	Yemen, Republic of	1970
142	Solomon Islands	1980	173	Yugoslavia, Federal Republic of	1993
143	Somalia	1962	174	Zambia	1965
144	South Africa	1957	175	Zimbabwe	1980
145	Spain	1960			

Struktur Organisasi dan Pengurusan

Struktur organisasi IFC terdiri dari Dewan Gubernur (Board of Governors), Dewan Direksi, Ketua, Dewan Direksi, seorang Presiden, serta officers dan staf-staf lain yang melakukan tugas-tugas yang ditentukan oleh IFC.

d. Moore Investments Limited ("Moore")

Moore Investments Limited didirikan pada tanggal 9 Juli 1998 berdasarkan Hukum Cayman Islands sesuai dengan Certificate of Incorporation tertanggal 9 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Registrar of Companies, Cayman Islands.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Memorandum of Association dan Articles of Association Moore, maksud dan tujuan pendirian Moore adalah termasuk tetapi tidak terbatas pada: melakukan kegiatan usaha selaku institusi keuangan yang menjalankan aktivitas dalam bidang keuangan yang tidak memerlukan izin

berdasarkan hukum Cayman Islands, atau hukum lainnya; bertindak selaku promotor dan pengusaha serta melakukan usaha sebagai penyedia pembiayaan, pelaksana hak konsesi, pedagang, broker, dealer, agen, importir, eksportir; dan melakukan dan menangani segala bentuk investasi, kegiatan keuangan, komersial, perdagangan, dan kegiatan lainnya. Melaksanakan, baik sebagai prinsipal atau agen atau dengan cara bagaimanapun, usaha sebagai pengembang, konsultan, agen atau manajer, kontraktor, atau penjual segala bentuk properti termasuk jasa.

Permodalan

Modal Moore sebesar US\$ 1,000,000 yang terbagi atas 100.000.000 saham dengan nilai nominal US\$ 0,01 setiap saham.

Berdasarkan Register of Members Moore, seluruh saham Moore yang telah diterbitkan/ditempatkan dalam jumlah 100.000 saham dimiliki oleh Asian Opportunity Fund 1998-I.

Pengurus

Berdasarkan Register of Directors and Officers Moore, diterangkan mengenai susunan kepengurusan Moore, sebagai berikut:

- Director : Karin Schulte
- Secretary : Regent Financial Services Limited

iv. Hurst Investments Limited ("Hurst")

Hurst Investments Limited didirikan pada tanggal 9 Juli 1998 berdasarkan Hukum Cayman Islands sesuai dengan Certificate of Incorporation tertanggal 9 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Registrar of Companies, Cayman Islands.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Memorandum of Association dan Articles of Association Moore, maksud dan tujuan pendirian Hurst adalah termasuk tetapi tidak terbatas pada: melakukan kegiatan usaha selaku institusi keuangan yang menjalankan aktivitas dalam bidang keuangan yang tidak memerlukan izin berdasarkan hukum Cayman Islands, atau hukum lainnya; bertindak selaku promotor dan pengusaha serta melakukan usaha sebagai penyedia pembiayaan, pelaksana hak konsesi, pedagang, broker, dealer, agen, importir, eksportir; dan melakukan dan menangani segala bentuk investasi, kegiatan keuangan, komersial, perdagangan, dan kegiatan lainnya. Melaksanakan, baik sebagai prinsipal atau agen atau dengan cara bagaimanapun, usaha sebagai pengembang, konsultan, agen atau manajer, kontraktor, atau penjual segala bentuk properti termasuk jasa.

Permodalan

Modal Hurst sebesar US\$ 1,000,000 yang terbagi atas 100.000.000 saham dengan nilai nominal US\$ 0,01 setiap saham.

Berdasarkan Register of Members Hurst, seluruh saham Hurst yang telah diterbitkan/ditempatkan dalam jumlah 100.000 saham dimiliki oleh Asian Opportunity Fund 1998-II.

Pengurus

Berdasarkan Register of Directors and Officers Hurst, diterangkan mengenai susunan kepengurusan Hurst, sebagai berikut:

Direktur : Karin Schulte
Secretary : Regent Financial Services Limited

f. Stiles Investments Limited ("Stiles")

Stiles Investments Limited didirikan pada tanggal 9 Juli 1998 berdasarkan Hukum Cayman Islands sesuai dengan Certificate of Incorporation tertanggal 9 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Registrar of Companies, Cayman Islands.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Memorandum of Association dan Articles of Association Stiles, maksud dan tujuan pendirian Hurst adalah termasuk tetapi tidak terbatas pada: melakukan kegiatan usaha selaku institusi keuangan yang menjalankan aktivitas dalam bidang keuangan yang tidak memerlukan izin berdasarkan hukum Cayman Islands, atau hukum lainnya; bertindak selaku promotor dan pengusaha serta melakukan usaha sebagai penyedia pembiayaan, pelaksana hak konsesi, pedagang, broker, dealer, agen, importir, eksportir; dan melakukan dan menangani segala bentuk investasi, kegiatan keuangan, komersial, perdagangan, dan kegiatan lainnya. Melaksanakan, baik sebagai prinsipal atau agen atau dengan cara bagaimanapun, usaha sebagai pengembang, konsultan, agen atau manajer, kontraktor, atau penjual segala bentuk properti termasuk jasa.

Permodalan

Modal Stiles sebesar US\$ 1,000,000 yang terbagi atas 100.000.000 saham dengan nilai nominal US\$ 0,01 setiap saham.

Berdasarkan Register of Members Stiles, seluruh saham Stiles yang telah diterbitkan/ditempatkan dalam jumlah 100.000 saham dimiliki oleh Asian Opportunities Fund 1998-II.

Pengurusan

Berdasarkan Register of Directors and Officers Stiles, diterangkan mengenai susunan kepengurusan Stiles, sebagai berikut:

Direktur : Karin Schulte
Secretary : Regent Financial Services Limited

Asian Opportunity Funds merupakan closed-ended investment funds bagi para investor yang ingin berinvestasi di kawasan Asia. The Asian Opportunity Funds dikelola oleh Regent Fund Management Limited, anak perusahaan dari iRegent Group (dulu bernama Regent Pacific Group Limited). iRegent Group didirikan di Hong Kong pada tahun 1991 dan menjadi perusahaan publik dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Hong Kong pada bulan Mei 1997. Para pemegang saham iRegent Group terdiri dari institusi internasional terkemuka dari Amerika Serikat, Eropa dan Jepang. Setelah reorganisasi yang berlangsung di awal tahun 2000, kini bisnis utama iRegent Group adalah investasi pada perusahaan-perusahaan berbasis teknologi, corporate finance dan asset management.

4. KETERANGAN TENTANG ANAK PERUSAHAAN

PT NISP SEKURITAS ("NISP Sekuritas")

Pada tanggal 4 Agustus 2000, PT Bank NISP melakukan pembelian saham PT Abadi Sekuritas Adimasa, sebuah perusahaan efek yang bergerak dalam bidang perantara perdagangan efek di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Kemudian di bulan September 2000, PT Abadi Sekuritas Adimasa dengan tim manajemen yang profesional memulai kegiatan perdagangan efeknya. Pada tanggal 6 Maret 2001 nama PT Abadi Sekuritas Adimasa resmi diganti menjadi PT NISP Sekuritas. Bank NISP saat ini memiliki saham sebesar 67% di perusahaan ini, sementara sisanya dimiliki PT Dana Udaya Sentosa.

Pendirian

NISP Sekuritas semula didirikan dengan nama PT Abadi Sekuritas Adimasa berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Abadi Sekuritas Adimasa No. 38 tanggal 30 Mei 1989, yang dibuat di hadapan Helena Kuntoro, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-9392 HT.01.01.Th. 89 tanggal 7 Oktober 1989, telah didaftarkan dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2259/1989 tanggal 16 Oktober 1989, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 7 Nopember 1989, Tambahan No. 2931.

PT Abadi Sekuritas Adimasa berubah namanya menjadi PT NISP Sekuritas berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Abadi Sekuritas Adimasa No.40 tanggal 14 Desember 2000, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C-844.HT.01.04-TH.2001 tanggal 26 Januari 2001.

Anggaran Dasar NISP Sekuritas telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Abadi Sekuritas Adimasa No.40 tanggal 14 Desember 2000, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C-844.HT.01.04-TH.2001 tanggal 26 Januari 2001, yang mengatur mengenai perubahan Pasal 1, 3, 4, dan 10.2 Anggaran Dasar Perseroan.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan NISP Sekuritas adalah menjalankan usaha selaku perusahaan efek dengan melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang efek dan manajer investasi.

Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Abadi Sekuritas Adimasa No.40 tanggal 14 Desember 2000, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C-844.HT.01.04-TH.2001 tanggal 26 Januari 2001, modal dasar NISP Sekuritas adalah sebesar Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) terdiri dari 60.000 (enam puluh ribu) saham, dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh adalah sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), dengan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	60.000	60.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Bank NISP Tbk	10.000	10.000.000.000	66,67
2. PT Dana Udaya Sentosa	5.000	5.000.000.000	33,33
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.000	15.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	45.000	45.000.000.000	

Susunan pemegang saham tersebut di atas tidak berubah sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

Manajemen dan Pengawasan

Susunan Direksi NISP Sekuritas berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT NISP Sekuritas No.24 tanggal 14 Juni 2001, dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Direksi
 Direktur Utama : Sigit Pratama Wiryadi
 Direktur : Tjie Sioek Tjin

Susunan Komisaris NISP Sekuritas berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT NISP Sekuritas No.28 tanggal 27 Juli 2001, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Komisaris
 Presiden Komisaris : Eugene Keith Galbraith
 Komisaris : Yogadharma Ratnapalasari

Ringkasan Laporan Keuangan

Dalam usianya yang relatif muda, NISP Sekuritas berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp 1,2 miliar di tahun 2001 dibanding tahun 2000 yang masih merugi sekitar Rp 300 miliar. Total aktiva tercatat sebesar Rp 19,0 miliar pada tahun 2001, meningkat dari Rp 17,7 miliar pada tahun 2000. Sementara itu, total ekuitas per 31 Desember 2001 menjadi sekitar Rp 16,1 miliar, dari Rp 14,9 miliar pada akhir tahun 2000.

Berikut ini tabel ringkasan laporan keuangan PT NISP Sekuritas per tanggal 31 Desember 2000 dan 2001 telah diaudit oleh Akuntan Publik Doli, Bambang & Sudarmadji:

(dalam jutaan rupiah)

	31 Desember	
	2000	2001
Aktiva Lancar	14.041	15.376
Aktiva Tidak Lancar	3.608	3.678
Total Aktiva	17.649	19.054
Hutang lancar	2.721	2.870
Hutang Lain-lain	-	-
Laba Usaha	(542)	893
Laba Bersih	(340)	1.201
Ekuitas	14.898	16.099

5. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN DIMANA PERSEROAN MEMPUNYAI PENYERTAAN

Perseroan memiliki penyertaan saham pada 2 (dua) bank campuran, yaitu PT Bank Daiwa Perdania dan PT Bank OCBC-NISP, dimana kepemilikan saham Perseroan di kedua perusahaan ini masing-masing sebesar 20,1% dan 15%. Kedua perusahaan tersebut juga menjalin hubungan kerja sama (partnership) dengan bank dari luar negeri.

Berikut adalah uraian singkat mengenai PT Bank Daiwa Perdania dan PT Bank OCBC-NISP:

a. PT Bank Daiwa Perdania ("BDP")

Pendirian

BDP semula didirikan dengan nama N.V. Bank Pembangunan berdasarkan Akta No. 104 tanggal 31 Desember 1953 juncto Akta No. 29 keduanya dibuat di hadapan Raden Meester Soewandi, pada saat itu Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. J.A.5/15/11 tanggal 15 Pebruari 1956, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut dibawah No. 354 dan 355 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 17 tanggal 28 Pebruari 1956, Tambahan No. 168.

N.V. Bank Pembangunan berubah namanya menjadi Daiwa Perdania Bank berdasarkan Akta No. 1 tanggal 6 Juli 1993, dibuat di hadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-4782.HT.01.04.Th.93 tanggal 19 Agustus 1993, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2323/1993 tanggal 1 September 1993, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 85 tanggal 22 Oktober 1993, Tambahan No.4961.

Anggaran Dasar BDP telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Daiwa Perdania Bank No. 14 tanggal 15 Mei 2000 dibuat di hadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-14680 HT.01.04.TH.2000 tanggal 20 Juli 2000 dan dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 20 Juli 2000 dengan No.C-14679 HT.01.04.TH.2000, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No.2373/RUB.09.05/XI/2000 tanggal 6 Nopember 2000, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 27 April 2001, Tambahan No.2722, yang mengatur perubahan Pasal 4, 5, 6, 10, 13.1, dan 13.2 Anggaran Dasar BDP.

Maksud dan Tujuan

Menjalankan usaha sebagai bank umum, terutama memberikan kredit di bidang industri dalam negeri, menjalankan usaha sebagai bank devisa, menjalankan usaha sebagai "trust & agency business" dalam bidang moneter dan keuangan, BDP dapat ikut mendirikan serta mengambil bagian dalam ataupun menjalankan pengurusan perusahaan-perusahaan lain.

Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Daiwa Perdania Bank No. 14 tanggal 15 Mei 2000 dibuat di hadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-14680 HT.01.04.TH.2000 tanggal 20 Juli 2000 dan dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 20 Juli 2000 dengan No.C-14679 HT.01.04.TH.2000, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan

Kodya Jakarta Pusat di bawah No.2373/RUB.09.05/XI/2000 tanggal 6 Nopember 2000, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 27 April 2001, Tambahan No.2722, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BDP adalah sebagai berikut:

- Modal dasar sebesar Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) yang terbagi atas 5.000.000 (lima juta) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Dari Modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 2.000.000 (dua juta) saham atau seluruhnya berjumlah Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.47 tanggal 14 Desember 2001, dibuat di hadapan Hendra Karyadi, S.H. Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 15 Januari 2002 dengan No.C-00706 HT.01.04.TH.2002, diterangkan bahwa sesuai dengan Resolution of the Shareholders of PT Bank Daiwa Perdania, dibuat di bawah tangan, pemegang saham BDP telah menyetujui:

- 1) pembagian deviden kepada para pemegang saham BDP (akan tetapi tidak termasuk kepada BDP sebagai pemilik 31.200 saham BDP yang telah dibeli kembali) sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) per saham atau seluruhnya sebesar Rp 3.937.600.000 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), yang akan terdiri dari deviden saham sebesar Rp 3.120.000.000,- (tiga miliar seratus dua puluh juta rupiah) dan deviden tunai sebesar Rp 817.600.000,- (delapan ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah).
- 2) peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dari Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) menjadi Rp 203.120.000.000,- (dua ratus tiga miliar seratus dua puluh juta rupiah) sehubungan dengan pembagian deviden tersebut.

Dengan dilakukannya pembagian deviden saham tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BDP menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	5.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
1. The Daiwa Bank Ltd.	960.585	96.058.500.000	47,30
2. PT Bank NISP Tbk	408.370	40.837.000.000	20,10
3. Wiliam Budiman	31.695	3.169.500.000	1,57
4. East Asia Indonesian Holdings Ltd	497.765	49.776.500.000	24,50
5. Jafco Co. Ltd	101.585	10.158.500.000	5,00
6. BDP	31.200	3.120.000.000	1,53
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.031.200	203.120.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	2.968.800	296.880.000.000	

Susunan pemegang saham tersebut di atas tidak berubah sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

Manajemen dan Pengawasan

Susunan Komisaris BDP berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 2 Juli 2001, dibuat di hadapan Hendra Karyadi, Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut :

Komisaris

Presiden Komisaris	:	Willy Prayogo
Komisaris	:	Ilham Indro Wibisono
Komisaris	:	Akiyoshi Otani
Komisaris	:	Louisa S. Chan

Susunan Direksi BDP berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 3 Januari 2002 yang dibuat di hadapan Sinta Dewi Sudarsana, S.H., adalah sebagai berikut :

Direksi

Presiden Direktur	:	Kenichi Sasakura
Direktur	:	Yoshiyuki Shimadate
Direktur Kepatuhan	:	Moro Arisnu
Direktur	:	Yoshihide Ito
Direktur	:	Abdul Harris Hartanto
Direktur	:	Stanley Irawan

PT Bank OCBC-NISP ("OCBC-NISP")

Pendirian

OCBC-NISP didirikan berdasarkan Akta No. 2 tanggal 4 Juli 1996, dibuat di hadapan Agus Hashim Ahmad, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-8263.HT.01.01.Th.96 tanggal 2 Agustus 1996, telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 554/BH.09.05/111/1997 tanggal 25 Maret 1997, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 35 tanggal 2 Mei 1997, Tambahan No. 1740.

Anggaran dasar OCBC-NISP telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan (Resolusi) Pemegang Saham "PT Bank OCBC-NISP" No. 8 tanggal 28 Desember 1998 yang dibuat di hadapan Agus Hashim Ahmad, S.H., Notaris di Jakarta.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan OCBC-NISP adalah menjalankan usaha-usaha suatu bank campuran pada umumnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, OCBC-NISP dapat melakukan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan (Resolusi) Pemegang Saham PT Bank OCBC-NISP No. 8 tanggal 28 Desember 1998 yang dibuat di hadapan Agus Hashim Ahmad, S.H., Notaris di Jakarta, modal dasar OCBC-NISP adalah sebesar Rp 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) terdiri dari dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham, dengan nilai nominal

Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh adalah sebesar Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah), dengan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp)	Jumlah (%)	Persentase
Modal Dasar	250.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Overseas Chinese Banking Corp. Ltd.	127.500	127.500.000.000	85,00
2. PT Bank NISP Tbk	22.500	22.500.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	150.000	150.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	100.000	100.000.000.000	

Susunan pemegang saham tersebut di atas tidak berubah sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

Manajemen dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Komisaris OCBC-NISP berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan (Resolusi) Di luar Rapat Pemegang Saham PT Bank OCBC-NISP No.25 tanggal 12 September 2001, yang dibuat di hadapan Agus Hashim Ahmad, S.H, Notaris di Jakarta, berisi pernyataan kembali keputusan para pemegang saham OCBC-NISP tertanggal 19 Juli 2000, adalah sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris	:	Alexander Au Siu Kee
Wakil Presiden Komisaris	:	Ratna Dewiyanti
Komisaris	:	Alfredo Ronaldo Villanueva
Komisaris	:	Na Wu Beng
Komisaris	:	Gregory Pau King Yan
Komisaris	:	Wong Yew Kuen

Direksi

Presiden Direktur	:	Goh Kim Bun
Wakil Presiden Direktur	:	Chia Kien Sian
Wakil Presiden Direktur	:	Dra. Komalasari Iskak

6. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi melakukan pengurusan Perseroan di bawah pengawasan Komisaris. Anggota Komisaris dan Direksi dipilih dan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Bank NISP Tbk No. 43 tanggal 20 Juni 2001, dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, telah disetujui antara lain perubahan susunan anggota Komisaris dan Direksi Perseroan, sehingga untuk selanjutnya susunan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Komisaris

Presiden Komisaris	:	Karmaka Surjaudaja
Wakil Presiden Komisaris	:	Peter Eko Sutioso
Wakil Presiden Komisaris	:	Eugene Keith Galbraith (Komisaris Independen)
Komisaris	:	Lelarati Lukman
Komisaris	:	Pramana Surjaudaja
Komisaris	:	Mariawati Halim (Komisaris Independen)
Komisaris	:	Michael James Higgins (Komisaris Independen)

Direksi

Presiden Direktur	:	Pramukti Surjaudaja
Wakil Presiden Direktur	:	Parwati Surjaudaja
Direktur	:	Kamsidin Wiradikusumah (Direktur Kepatuhan & Sekretaris Perusahaan)
Direktur	:	Hardi Juganda
Direktur	:	Surjawaty Tatang

Dalam rangka penyelenggaraan good corporate governance, pada tanggal 22 Oktober 2001 Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit yang terdiri dari 3 orang anggota. Ketua merangkap anggota adalah Komisaris Independen sedangkan 2 orang anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen.

Komite Audit melaksanakan fungsinya sesuai dengan Surat Edaran Bapepam No. SE-03/PM/2000 tanggal 5 Mei 2000 dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-315/BEJ/06-2000 tanggal 30 Juni 2000, yang antara lain bertugas memberikan pendapat profesional yang independen kepada Komisaris terhadap laporan yang disampaikan Dirkesi serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris.

Susunan Komite Audit Perseroan, adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Mariawati Halim
Anggota	:	Made Rugeh Ramia
Anggota	:	Jusuf Halim

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan Direksi Perseroan:

KOMISARIS



Karmaka Surjaudaja, Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, 68 tahun. Presiden Komisaris Perseroan sejak April 1997, sebelumnya Presiden Direktur Perseroan (1963 - April 1997). Wakil Presiden Komisaris Bank OCBC-NISP (1997 - Feb 2000), Komisaris Daiwa Perdania Bank sejak tahun (1992 - Feb 2000). Aktif di berbagai kegiatan kemasyarakatan dan sosial. Sebelum di Perseroan, menjabat sebagai Manager N.V. Padasuka dan Direktur Dharmakusuma, Textile & Trading Co. (1958 - 1963).



Peter Eko Sutioso, Wakil Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, 61 tahun. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum dari Universitas Pajajaran, Bandung pada tahun 1965. Wakil Presiden Komisaris Perseroan sejak Juni 1998. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan dari April 1997 sampai Juni 1998, sebelumnya Direktur Perseroan (1972 - April 1997). Aktif di berbagai yayasan kemasyarakatan dan pendidikan di Bandung (yayasan Kewalayaan - RS. Kebon Jati dan Universitas Katholik Parahyangan).



Eugene Keith Galbraith, Wakil Presiden Komisaris

Warga Negara Amerika Serikat, 49 tahun. Mendapatkan gelar Ph.D dari Johns Hopkins University pada tahun 1983. Wakil Presiden Komisaris sejak Mei 2000. Pengalaman beliau di Indonesia dimulai sebagai independent research di Surabaya (1982-1984). Pernah menjadi Penasehat Bagian Keuangan & Perencanaan-Departemen Keuangan RI (1988-1990) yang sebelumnya sebagai Penasehat Perencanaan Ekonomi untuk Gubernur NTT (1984-1988). Bergabung dengan HG Asia yang kini dikenal dengan ABN Amro Asia Securities Indonesia sebagai Presiden Direktur (1990-1996) dan menjadi salah satu dari enam Group Managing Director pada ABN Amro Asia Ltd. Hongkong (1996-1998). Sejak tahun 1999 hingga sekarang masih menjabat sebagai Chairman Asiawise Com. dan Independent Consultant di Hongkong.



Lelarati Lukman, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 62 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 1982 dan sebagai Direktur Utama PT Udayawira Utama sejak tahun 1994-Maret 2000. Komisaris PT Suryasono Sentosa sejak 1994. Ketua Yayasan Bio-Test Medical Laboratories di Bandung dan Surabaya.



Pramana Surjaudaja, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 42 tahun. Menyelesaikan pendidikan dari jurusan Kedokteran di Universitas Pajajaran, Bandung pada tahun 1985 dan melanjutkan pendidikan di Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen, Jakarta dengan memperoleh gelar MBA pada tahun 1991. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 1983. Pegawai Negeri (1985-1988), mendapat penghargaan sebagai tokoh masyarakat di bidang pembangunan bidang kesehatan, dokter teladan dan Pegawai Negeri teladan. Aktif di bidang olah raga, Ketua Pengda Perbasasi Jawa Barat dan Ketua Umum Pengda PTMSI Jawa Barat.



Mariawati Halim, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Menyelesaikan pendidikan S1 di bidang Ekonomi Universitas Kristen Indonesia pada tahun 1967. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Juli 1997. Sebelumnya sebagai Vice President Bank of America (Juli 1985) dan sebagai Presiden Direktur PT First Indo-American Leasing Co. (1991-1995). Sejak 1968 menempati berbagai posisi dan bidang di Bank of America, Jakarta. Berbagai pelatihan telah dijalani antara lain di bidang treasury, kredit dan trade finance di dalam dan luar negeri.



Michael J. Higgins, Wakil Presiden Komisaris

Warga Negara Amerika Serikat, 54 tahun. Menjabat sebagai Senior Banking Specialist pada International Finance Corporation (World Bank Group) sejak 1998, Menyelesaikan pendidikan di University of Virginia School of Law, Charlottesville, Virginia (Doktor dalam bidang hukum) tahun 1973-1976, Bergabung di Federal Housing Finance Board (1991-1993), Mengikuti Pelatihan Credit Training Course, The Chase Manhattan Bank, N.A., New York - USA (1976 - 1977)

DIREKSI



Pramukti Surjaudaja, Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, 39 tahun. Mendapatkan gelar Bsc Banking dari San Fransisco State University, California, USA pada tahun 1978 dan MBA dari Golden Gate University, San Fransisco, USA pada tahun 1985. Beberapa pendidikan perbankan yang pernah diikuti antara lain: Sekolah Staff Pimpinan Bank Indonesia (Angkatan XVI), Executive Program di Massachusetts Institute of Technolgy dan Stanford University di Amerika Serikat. Dari tahun 1986-1988, pernah bekerja di New York, London, Hong Kong, Tokyo dengan perusahaan Daiwa Bank, Daiwa Overseas Finance, Daiwa Capital Management dan Daiwa Trust. Mengawali karirnya di Perseroan sejak tahun 1988 dan menduduki posisi Presiden Direktur Perseroan sejak April 1997, sebelumnya Direktur Perseroan (1989-April 1997), Komisaris Bank OCBC-NISP 1997-Juni 2000. Wakil ketua PERBANAS Pusat sejak Oktober 2000.

Parwati Surjaudaja, Wakil Presiden Direktur



Warga Negara Indonesia, 37 tahun. Pendidikan hingga Master of Business Administration - Accounting di San Fransisco State University, USA (1987, Cum Laude). Beberapa pendidikan perbankan lainnya yang pernah diikuti antara lain: Asia Pacific Basic Banking School dari Andersen Consulting di Singapore, Sekolah Staff Pimpinan Bank Indonesia (Angkatan XVII), Loan Auditing & Fraud Auditing dari Institute Of Banking & Finance di Singapore, dan Merger Acquisition Course dari Euromoney di Singapore. Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak Juni 1998, sebelumnya Direktur Perseroan (1990-Juni 1998). Konsultan senior di SGV Utomo/Arthur Andersen (1987-1990).



Kamsidin Wiradikusumah, Direktur

Warga Negara Indonesia, 53 tahun. Mengikuti pendidikan jurusan Ekonomi dari Universitas Parahyangan, Bandung pada tahun 1967-1968. Mengikuti beberapa kursus dan seminar di bidang administrasi, akuntansi, perbankan dan hukum. Direktur Perseroan sejak April 1997, bergabung di Perseroan tahun 1969 dengan jabatan terakhir Pemimpin Kantor Cabang Utama Jakarta (1994-97). Wakil Ketua BMPD Bogor (1990-1994).



Hardi Juganda, Direktur

Warga Negara Indonesia, 43 tahun. Menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum dari Universitas Parahyangan Bandung pada tahun 1985. Mengikuti pendidikan Sekolah Staff Pimpinan Bank di Lembaga Perbankan Indonesia (Jakarta), kursus Pejabat Pemberi Kredit - LPPI (Bandung), serta berbagai kursus dan seminar di bidang kredit, pemasaran, komputer dan jasa pelayanan. Direktur Perseroan sejak April 1997, bergabung di Perseroan tahun 1985 dengan jabatan terakhir Pemimpin Kantor Cabang Asia Afrika Bandung (1991-1997).



Surjawaty Tatang, Direktur

Warga Negara Indonesia, 31 tahun, Menyelesaikan pendidikan Business Administration, Philippines School of Business Administration di Manila. Menjabat sebagai Vice President Bank of America (1992 - 1997). Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1997 dengan jabatan terakhir sebagai Asisten Direksi dan Kepala SK. Corporate Finance (Maret 1997 - July 2001)

7. SUMBER DAYA MANUSIA

Selaras dengan upaya untuk mulai melakukan pengembangan usaha, perusahaan senantiasa berupaya pula untuk meningkatkan kualitas kerja dan kualitas kesejahteraan sumberdaya manusianya. Pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia banyak dititikberatkan pada peningkatan kesadaran terhadap pentingnya mutu dan kesiapan mereka untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, baik terhadap pelanggan intern maupun ekstern. Upaya melakukan perbaikan dan peningkatan secara berkesinambungan dan terus menerus, ditunjukkan dengan pembentukan kelompok-kelompok GKM (Gugus Kendali Mutu) yang dibina dan dikembangkan secara rutin, serta penyusunan dan penyempurnaan sistem pelayanan dalam bentuk kebijakan dan pedoman, dilengkapi pula dengan diselenggarakannya pelatihan-pelatihan dan pembinaan-pembinaan.

Untuk tetap menumbuhkan motivasi kerja sekaligus meningkatkan kualitas hidup karyawan, perusahaan senantiasa menyempurnakan terus fasilitas-fasilitas kesejahteraan, seperti tunjangan pengobatan, tunjangan rawat jalan, pemberian beasiswa bagi anak karyawan, tunjangan melahirkan, dan tunjangan-tunjangan lainnya.

Hingga saat ini, perusahaan tetap menyelenggarakan pelatihan-pelatihan intern dan ekstern untuk mengembangkan kemampuan, ketrampilan, dan sikap karyawan, misalnya melalui pelatihan teknis perbankan, pengembangan pribadi, service, penguasaan bahasa Inggris, dan persiapan-persiapan karyawan untuk menempati posisi frontliner. Pelatihan intern yang diselenggarakan lebih ke kompetensi yang bersifat spesifik, seperti HR planning, legal, selling, quality management, advance credit analysis, treasury management dan lain sebagainya.

Pelatihan-pelatihan tersebut diadakan sesuai dengan rencana unit kerja untuk mengoptimalkan kompetensi stafnya; dan diselaraskan dengan usaha serta rencana pengembangan kantor dan perusahaan untuk jangka pendek dan jangka menengah.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, terdapat 2 (dua) anggota Komisaris Perseroan yang merupakan warga negara asing, yaitu Eugene Keith Galbraith yang menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris dan Michael J. Higgins yang menjabat sebagai Komisaris. Kedua anggota Komisaris tersebut telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Per tanggal 31 Desember 2001, Perseroan memiliki total karyawan sejumlah 1.740 orang dengan perincian sebagai berikut:

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

	31 Desember			
	1999	%	2000	%
Manajemen Puncak	8	0,6%	8	0,5%
Manajemen Madya	53	3,9%	53	3,4%
Manajemen Pelaksana	74	5,4%	77	4,9%
Staff	1.234	90,1%	1.436	91,2%
Total	1.369	100,0%	1.574	100,0%

Catatan :

- Manajemen Puncak : Direksi, Asisten Direksi
- Manajemen Madya : Kepala Satuan Kerja, Pemimpin dan Wakil Cabang
- Manajemen Pelaksana : Pemimpin/Wakil Capem dan Kantor Kas, Supervisor, Kepala Seksi dan Kepala Bagian

Sehubungan dengan program optimalisasi cabang yang dilakukan Perseroan pada tahun 2001, hal ini merubah struktur dan jenjang manajemen dalam Perseroan, menjadi sebagai berikut:

	31 Desember	
	2001	%
Top Management	8	0,5%
Middle Management	28	1,6%
Lower Management	108	6,2%
Staff	1.157	66,5%
Other	439	25,2%
Total	1.740	100,0%

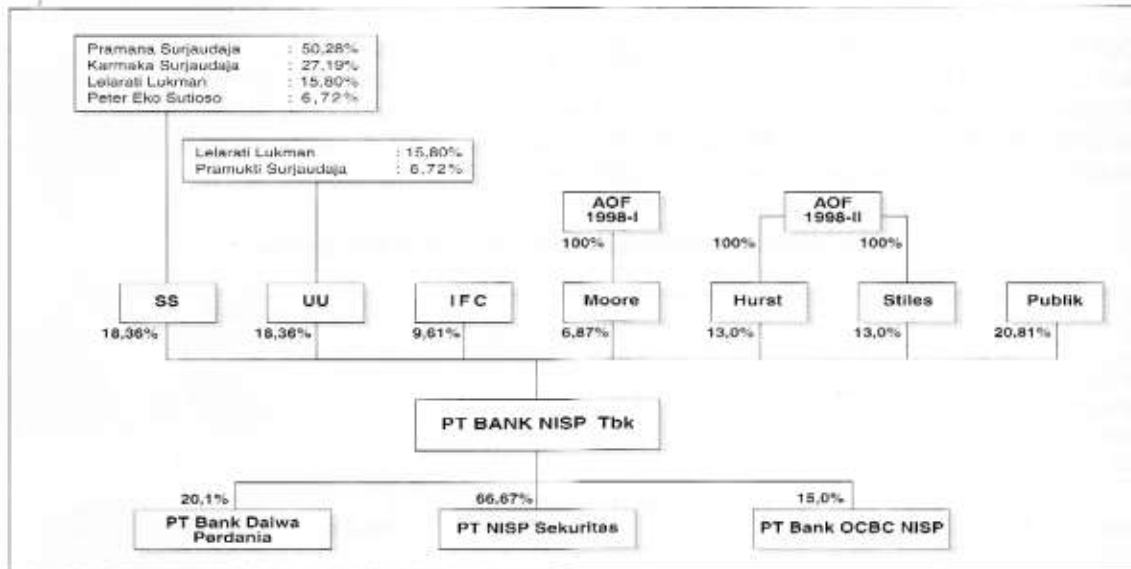
Catatan :

- Top Management : Direksi, Asisten Direksi
- Middle Management : Kepala Satuan Kerja, Koordinator, Regional Department Head
- Lower Management : Section Head, Branch Manager, Branch Supervisor, Unit Head, Regional Support Function Head, Head Office Coordinator
- Other : Non Staff

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

	31 Desember					
	1999	%	2000	%	2001	%
Sarjana	431	31,5%	547	34,8%	602	34,6%
Sarjana Muda dan Diploma	227	16,6%	272	17,3%	306	17,6%
Lainnya	711	51,9%	755	48,0%	832	47,8%
Total	1.369	100,0%	1.574	100,0%	1.740	100,0%

8. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN



Keterangan:

SS	:	PT Suryasono Sentosa
UU	:	PT Udayawira Utama
IFC	:	International Finance Corporation
Moore	:	Moore Investments Limited
Hurst	:	Hurst Investments Limited
Stiles	:	Stiles Investments Limited
AOF 1998-I	:	Asian Opportunity Fund 1998-I
AOF 1998-II	:	Asian Opportunity Fund 1998-II

9. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Nama	Perseroan	Suryasono	Udayawira
Pramukti Surjaudaja	Presdir	-	-
Parwati Surjaudaja	Wk. Presdir	-	-
Kamsidin Wiradikusumah	Direktur	-	-
Hardi Juganda	Direktur	-	-
Surjawaty Tatang	Direktur	-	-
Karmaka Surjaudaja	Preskom	Komut	Komisaris
Eugene Keith Galbraith	Wk. Preskom	-	-
Peter Eko Sutioso	Wk. Preskom	Komisaris	-
Lelarati Lukman	Komisaris	Komisaris	Komut
Pramana Surjaudaja	Komisaris	-	-
Mariawati Halim	Komisaris	-	-
Michael James Higgins	Komisaris	-	-
Rukita Sudarmono	-	Direktur	Dirut
Sanitri Surjaudaja	-	Dirut	Direktur

Keterangan:

Presdir	:	Presiden Direktur	Dirut	:	Direktur Utama
Wk. Presdir	:	Wakil Presiden Direktur	Suryasono	:	PT Suryasono Sentosa
Wk. Preskom	:	Wakil Presiden Komisaris	Udayawira	:	PT Udayawira Utama
Komut	:	Komisaris Utama			

10. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi usaha dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, yaitu pihak yang mempunyai hubungan secara langsung atau tidak langsung, mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dan mempunyai hubungan sebagai pemegang saham utama dari Perseroan. Transaksi-transaksi dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa meliputi:

- a. Kredit yang diberikan kepada Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa sebesar Rp 1.071.631.381,- per tanggal 31 Desember 2001, Rp 726.653.517,- per tanggal 31 Desember 2000 dan Rp 546.483.507,- per tanggal 31 Desember 1999.

Pada tahun 1999, 2000, 2001, kredit yang diberikan kepada Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, tidak ada yang melebihi nilai Rp 1 miliar per individunya.

- b. Giro yang diterima dari Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa sebesar Rp 644.675.741,- per tanggal 31 Desember 2001, Rp 1.456.379.198,- per 31 Desember 2000 dan Rp 853.875.200,- per tanggal 31 Desember 1999.
- c. Tabungan yang diterima dari Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa sebesar Rp 4.437.170.888,- per tanggal 31 Desember 2001, Rp 4.095.353.455,- per 31 Desember 2000 dan Rp 6.810.595.025,- per tanggal 31 Desember 1999
- d. Deposito berjangka yang diterima dari Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa sebesar Rp 19.074.722.818,- per tanggal 31 Desember 2001, Rp. 10.705.235.150,- per tanggal 31 Desember 2000 dan Rp 15.162.955.638,- per tanggal 31 Desember 1999.

Halaman ini sengaja dikosongkan

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

1. UMUM

Perseroan memulai kegiatan operasi perbankanya sebagai Bank Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. D. 15.6.2.27 tanggal 20 Juli 1967. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Bank Indonesia.

Pada tanggal 19 Mei 1990, Perseroan ditingkatkan statusnya menjadi Bank Devisa berdasarkan Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/9/KEP/DIR. Selanjutnya, dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-35/MK.03/1993 tanggal 6 Januari 1993, Perseroan ditunjuk menjadi salah satu Bank Persepsi yang diijinkan menerima setoran pajak dan bukan pajak.

Berdasarkan surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. S-1601/PM/1994, pada tanggal 20 Oktober 1994, Perseroan mencatatkan sahamnya di PT Bursa Efek Jakarta, yang menandai statusnya menjadi Bank Publik. Jumlah saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering) sebanyak 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) per saham dengan harga penawaran Rp 3.100,00 (tiga ribu seratus Rupiah) per saham.

Kantor Pusat Perseroan bertempat di Jl. Taman Cibeunying Selatan No. 31, Bandung 40114. Jaringan kantor Perseroan saat ini berjumlah 19 kantor cabang yang terdiri dari masing-masing 1 kantor cabang di Jakarta, Bogor, Semarang, Tangerang, Bekasi, Sukabumi, Surakarta, Batam, Cimahi, Cirebon, Denpasar, Tasikmalaya, Medan, Palembang, 2 kantor cabang di Surabaya dan 3 kantor cabang di Bandung serta 39 kantor cabang pembantu, 15 kantor kas dan 10 payment point.

DAFTAR JARINGAN KANTOR PERSEROAN

No	Alamat	Status Kantor	Status Tempat *
1.	Jl. Taman Cibeunying Selatan 31 Bandung 40114	Kantor Pusat & Kantor Pusat Operasional	Milik Sendiri
2.	Jl. Asia Afrika No. 100 Bandung 40261	Kantor Cabang	Milik Sendiri
3.	Jl. Rajawali Timur No. 27B Komp. Rajawali Plaza No.1 Bandung 40182	Kantor Cabang	Milik Sendiri
4.	Jl. Gatot Subroto No. 8 Cimahi 40532	Kantor Cabang	Milik Sendiri
5.	Jl. Yudanegara No. 52 Tasikmalaya 46121	Kantor Cabang	Sewa (4 Okt 1999 - 4 Okt 2004)
6.	Jl. Siliwangi No. 117 Cirebon 45124	Kantor Cabang	Sewa (3 Jan 1998 - 3 Jan 2003)
7.	Jl. Ir. H. Juanda No. 12 Bogor 16121	Kantor Cabang	Milik Sendiri
8.	Jl. R.E. Martadinata No. 32 Sukabumi 43111	Kantor Cabang	Milik Sendiri
9.	Jl. Gunung Sahari No. 38 Jakarta 10720	Kantor Cabang Utama	Milik Sendiri
10.	Sentral Niaga Kalimalang Jl. Ahmad Yani Blok A-6 No. 10 Bekasi 17140	Kantor Cabang	Milik Sendiri

No	Alamat	Status Kantor	Status Tempat
11.	Jl. Gatot Subroto (d/h Jl. Merdeka) No. 92 A-B Tangerang 15113	Kantor Cabang	Milik Sendiri
12.	Jl. Brig. Jend Katamso No. 5 -5A Semarang 50242	Kantor Cabang	Milik Sendiri
13.	Jl. Pemuda No. 104 - 106 Surabaya 60271	Kantor Cabang	Milik Sendiri
14.	Jl. Ngagel Jaya Selatan No. 123 Surabaya 60284	Kantor Cabang	Bangunan dimiliki oleh Perseroan di atas tanah hak sewa yang diberikan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
15.	Jl. Slamet Riyadi No. 303 Solo 57171	Kantor Cabang	Sewa (5 Sep 2001 - 5 Sep 2006)
16.	Kompleks Regency Park Blok I No. 4 - 5 Jl. Teuku Umar Batam 29432	Kantor Cabang	Milik Sendiri
17.	Jl. Patimura No. 69 Denpasar Bali 80233	Kantor Cabang	Milik Sendiri
18.	Jl. Imam Bonjol No. 15 Medan 20112	Kantor Cabang	Sewa (1 Feb 2001 - 1 Apr 2006)
19.	Jl. TP. Rustam Effendi No. 570 Palembang 30125	Kantor Cabang	Sewa (1 Jan 2002 - 31 Des 2006)
20.	Jl. Setiabudi No. 170E Bandung 40141	Kantor Capem	Milik Sendiri
21.	Jl. Terusan Jalan Jakarta No. 53 Ruko M Borma Antapani Bandung 40291	Kantor Capem	Sewa (1 Apr 2002 - 31 Mar 2007)
22.	Kompleks Pertokoan Sumber Sari Ruko Kav. T-5 Jl. Sumber Sari Indah Bandung 40222	Kantor Capem	Milik Sendiri
23.	Jl. Sawunggaling No. 2 Bandung 40116	Kantor Capem	Sewa (21 Juni 1999 - 21 Juni 2004)
24.	Kompleks Kopo Permai Estate Blok 6 AR No. 21 Bandung 40227	Kantor Capem	Milik Sendiri
25.	Jl. Kepatihan No. 10 A Bandung 40251	Kantor Capem	Sewa (1 Mar 1999 - 1 Mar 2005)
26.	Jl. Buah Batu No. 236 Bandung 40265	Kantor Capem	Sewa (22 Des 1996 - 1 Sep 2003)
27.	Jl. Ujung Berung No. 144 Bandung 40611	Kantor Capem	Perjanjian tertanggal 9 April 1998 oleh dan antara Perseroan dengan dr. Pramana Surjaudaja.
28.	Jl. Kebonjati No. 152 Bandung 40181	Kantor Capem	Kerjasama
29.	Jl. Raya Purwakarta No. 95 Padalarang 40553	Kantor Capem	Milik Sendiri
30.	Jl. Raya Soreang No. 103 Kabupaten Bandung 40911	Kantor Capem	Sewa (12 Jan 1998 - 12 Jan 2003)
31.	Jl. Kiara Payung No. 1 Kompleks Perumahan Taman Rejeki Cibinong 16917	Kantor Capem	Milik Sendiri
32.	Jl. Raya Siliwangi No. 243 Cicurug 43159	Kantor Capem	Milik Sendiri
33.	Jl. Siliwangi No. 122 Bogor 16133	Kantor Capem	Milik Sendiri
34.	Pertokoan Bogor Indah Raya Blok B 4 Jl. Baru Kedung Badak Km 6,6 Bogor	Kantor Capem	Milik Sendiri

No	Alamat	Status Kantor	Status Tempat
35.	Jl. Mayor Oking No. 78 Desa Karang Asem Barat, Citeureup Kabupaten Bogor	Kantor Capem	Sewa (15 Mar 2002 - 15 Mar 2007)
36.	Jl. Surya Kencana No. 117 Cibadak Sukabumi	Kantor Capem	Milik Sendiri
37.	Bukit Duri Permai Jl. Jatinegara Barat No. 54 E Blok. C Kav. 9-10 Jakarta Timur	Kantor Capem	Sewa (18 Okt 1999 - 18 Okt 2004)
38.	Jl. Kelapa Gading Boulevard Blok LB 1 No. 4-5 Jakarta 14240	Kantor Capem	Milik Sendiri
39.	Kompleks Dusit Mangga Dua Hotel Ruko No. 1 Jl. Mangga Dua Raya Jakarta 10730	Kantor Capem	Milik Sendiri (hak milik atas satuan rumah susun)
40.	<i>Kompleks ITC Roxy Mas Blok D III No. 17 Jl. K.H. Hasyim Ashari Jakarta 10150</i>	Kantor Capem	Milik Sendiri
41.	Grand Wijaya Center Blok A No.1 Jl. Wijaya II, Kebayoran Baru Jakarta 12160	Kantor Capem	Sewa (20 Mar 2000 - 20 Mar 2005)
42.	Gedung Twink Center, Lt.Dasar Jl. Kapten P. Tendean no. 82 Jakarta 12790	Kantor Capem	Sewa (1 Mar 1997 - 9 Feb 2002*) * Perpanjangan perjanjian sewa masih dalam proses pengurusan
43.	Gedung Senatama Lt. Dasar Jl. Kwitang Raya no. 8 Jakarta 10420	Kantor Capem	Sewa (9 Jul 1997 - 9 Agt 2002)
44.	Jl. Agung Utara Blok R 53, Sunter Paradise Jakarta 14350	Kantor Capem	Sewa (26 Jul 1999 - 26 Jul 2004)
45.	Jl. Taman Duta I Blok UA No. 56 Plaza II Pondok Indah Jakarta Selatan	Kantor Capem	Sewa (27 Agt 1999 - 27 Agt 2004)
46.	Ruko Puri Indah Jl Puri Indah Raya Blok I No.42 Kembangan Selatan. Jakarta 11610	Kantor Capem	Sewa (5 Des 1999 - 5 Des 2004)
47.	Gedung Bursa Efek Jakarta Tower I, 3rd floor, Suite 303 Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53 Jakarta 12190	Kantor Capem	Sewa (1 Mar 2000 - 28 Feb 2005)
48.	Jl. Muara Karang Raya Blok. Z 3 S no. 52, Pluit Jakarta 14446	Kantor Capem	Sewa (5 Sep 2001 - 5 Sep 2006)
49.	Komplek Intercon Plaza Blok F No. 1 Kebon Jeruk Jakarta Barat	Kantor Capem	Sewa (1 Jun 2001 - 1 Jun 2006)
50.	Mangga Besar I Pertokoan Glodok Plaza Blok F No. 96, Tamansari Jakarta 11180	Kantor Capem	Sewa (31 Jan 2002 - 31 Jan 2007)
51.	Ruko Pinangsia Blok I No. 36 LIPPO Karawaci Tangerang 15139	Kantor Capem	Milik Sendiri
52.	Jl. Jend. Gatot Subroto No.76 Ungaran 50517	Kantor Capem	Milik Sendiri
53.	Jl. Let. Jend. Suprpto No. 3 Semarang 50137	Kantor Capem	Milik Sendiri
54.	Jl. Jend. Sudirman 189 Kompleks Siliwangi Plaza Blok C1 Semarang 50248	Kantor Capem	Sewa (25 Agt 1998 - 25 Agt 2003)

No	Alamat	Status Kantor	Status Tempat
55.	Jl. Industri X No. 158 Komp.Lingkungan Industri Kecil Bugangan Baru Semarang	Kantor Capem	Sewa (8 Okt 2001 - 8 Okt 2006)
56.	Jl. Mayjend Sungkono Kompleks Pertokoan Darmo Park I Blok IV No.5 Surabaya 60256	Kantor Capem	Sewa (11 Jan 2002 - 11 Jan 2004)
57.	Jl. S. Parman No. 51 Solo 57135	Kantor Capem	Sewa (1 Mar 2000 - 1 Mei 2005)
58.	RS. Santo Borromeus Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Bandung 40132	Kantor Kas	Kerjasama
59.	RS. Advent Jl. Cihampelas No. 161 Bandung 40131	Kantor Kas	Kerjasama
60.	Universitas Parahyangan Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141	Kantor Kas	Kerjasama
61.	Jl. Kompleks Ruko Kopo Plaza Blok A4 Bandung	Kantor Kas	Sewa (6 Des 2000 - 2 Jan 2006)
62.	Jl. Moh. Toha No. 182 Bandung 40243	Kantor Kas	Sewa (14 Okt 2001 - 14 Okt 2004)
63.	Kompleks Sekolah St.Aloysius Jl.Sultan Agung No. 4 Bandung 40115.	Kantor Kas	Kerjasama
64.	Jl. Kopo Sayati 100 A, Merlin Dep. Store Bandung 40226	Kantor Kas	Sewa (1 Juli 2002 - 30 Juli 2005)
65.	PT Vonex Indonesia Jl. Rancaekek Km 23,7 Bandung	Kantor Kas	Kerjasama
66.	Jl.Pajajaran No. 87 Bandung 40172	Kantor Kas	Sewa (24Nov1999 - 24Nov2004)
67.	Jl.Bojong Raya No. 99, Cijerah Bandung 40212	Kantor Kas	Sewa (21 Sep2001 - 21Sep 2002)
68.	Jl. Prof. Suria Sumantri Kompleks Setrasari Plaza Kav. A1 Bandung	Kantor Kas	Sewa (2 Nov 2001 - 2 Nov 2006)
69.	Jl. Rangka Gading No. 1 Sekolah Kesatuan Bogor 16123	Kantor Kas	Sewa 21 Jul 1996 - 21 Apr 2003 (Obyek Sewa I) dan 21 Jul 1996-21 April 2003 (Obyek Sewa II)
70.	Pertokoan Griya Kenari Mas Blok A1 No. 20 Cileungsi Bogor	Kantor Kas	Sewa (30 Jun 2000 - 30Jun 2005)
71.	Rukan Sentral Blok B No.10 Bogor (dahulu Jl. Raya Kemang Bogor No. 566 Show Room Express Motor Kemang Bogor 16310)	Kantor Kas	Sewa (1 Mar 2002 - 1 Mar 2007)
72.	Pasar Pramuka Blok A, Lt. 1 Los AKS No. 021-026 Jl. Pramuka Raya Jakarta 13140	Kantor Kas	Surat Izin Pemakaian Tempat Berjualan
73.	Gedung ITC - Roxy Mas Jl. KH Hasyim Ashari Lt. Dasar No. 9-10 Jakarta Barat	Kantor Kas	Sewa (sejak tanggal serah terima - 1 Maret 2020)
74.	Jl. Salemba Raya No. 41 Jakarta 10440	Kantor Kas	Kerjasama
75.	PT.Mulia Industrindo Tbk, Mulia Industri Estate Jl. Raya Tegal Gede, Lemah Abang Cikarang Bekasi	Kantor Kas	Kerjasama

No	Alamat	Status Kantor	Status Tempat
76.	PT Arnott's Indonesia Jl. H. Wahab Affan No. 8 Raya Bekasi Km 28.5 Bekasi Jawa Barat 17132	Kantor Kas	Kerjasama
77.	Wisma Jababeka Cikarang Baru	Kantor Kas	Kerjasama
78.	Kompleks Bumi Serpong Damai Blok RP/93, Sektor VII Bumi Serpong Damai Tangerang	Kantor Kas	Sewa (1 Jan 2002 - 31 Des 2006)
79.	PT Nicomas Gemilang Jl. Raya Serang Km. 71, Desa Tambak Kec. Cikande Serang	Kantor Kas	Kerjasama
80.	PT Hasi Jl. Gajah Tunggal, Jati Uwung Tangerang	Kantor Kas	Kerjasama
81.	PT Fajarindo Faliman Zipper, Daan Mogot Tangerang	Kantor Kas	Kerjasama
82.	Jl. Kartini no. 76-78 Surabaya	Kantor Kas	Sewa (2 Sep 2001 - 2 Sep 2003)
83.	Jl. Pasar Turi Baru Tahap IV Stand R-3 & R-6 Surabaya 60175	Kantor Kas	Sewa/dengan hak pakai (1 Okt 1999 - 1 Okt 2002)

Untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul, Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaannya pada perusahaan asuransi yang tidak terafiliasi dengan Perseroan, yaitu PT Wahana Tata dan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia.

2. KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha Perseroan meliputi penyaluran dana, penghimpunan dana dan pelayanan jasa-jasa lainnya.

2.1. Penghimpunan dana

Dalam menghimpun dana dari masyarakat, Perseroan menekankan pada segi jasa pelayanan yang memberikan kepuasan kepada nasabah dengan menawarkan suku bunga yang wajar dan kompetitif. Dana masyarakat yang dihimpun melalui produk giro, tabungan dan deposito dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terus mengalami kenaikan.

a. Giro

Simpanan dana dalam bentuk rupiah, US Dollar, EURO, Australian Dollar dan Yen Jepang ataupun Singapore Dollar (khusus di Kantor Cabang Batam) yang dapat ditarik setiap saat juga menunjukkan pertumbuhan, meskipun tidak sebesar produk jenis lainnya.

b. Tabungan

Produk ini terdiri dari Tabungan Visi Kid's (Tabanas NISP), Tabungan Harian, Tabungan Harian Berhadiah atau H plus H, Tabungan Visi Save NISP dan Tabungan Berjangka Nominal serta Tabungan Berjangka Asuransi.

c. Deposito

Dana pihak ketiga yang dihimpun melalui produk deposito berjangka dan sertifikat deposito, jumlahnya paling besar diantara keseluruhan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh Perseroan. Berikut ini adalah tabel Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun Perseroan per tanggal 31 Desember 1999, 2000 dan 2001.

TABEL DANA PIHAK KETIGA

(dalam jutaan rupiah)

Dana Pihak Ketiga	31 Desember					
	1999		2000		2001	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Giro	379.931	14	538.309	14	768.769	13
a. Rupiah	284.584		364.927		516.862	
b. Valas	95.347		173.382		251.907	
Tabungan	513.536	19	643.359	16	755.751	13
Deposito + Sertifikat Deposito	1.847.082	67	2.787.956	70	4.364.730	74
a. Rupiah	1.391.225		2.222.305		3.364.193	
b. Valas	455.857		565.651		1.000.537	
Jumlah	2.740.549	100	3.969.624	100	5.889.250	100

TABEL KOMPOSISI DEPOSITO BERJANGKA DAN SERTIFIKAT DEPOSITO BERDASARKAN JANGKA WAKTU

(dalam jutaan rupiah)

Deposito Berjangka	31 Desember					
	1999		2000		2001	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Rupiah						
1 bulan	1.261.189		1.621.428		2.849.564	
3 bulan	74.401		463.458		324.316	
6 bulan	20.459		68.638		37.203	
12 bulan	32.058		31.424		68.886	
24 bulan	3.118		18.317		25.091	
Diatas 24 bulan	-		19.040		59.133	
Sub-Total	1.391.225	75	2.222.305	80	3.364.193	77
Valas						
1 bulan	345.357		442.184		893.178	
3 bulan	67.668		63.574		56.049	
6 bulan	11.188		9.403		21.273	
12 bulan	7.308		12.269		16.630	
24 bulan	24.338		38.221		10.437	
Diatas 24 bulan	-		-		2.970	
Sub-Total	455.857	25	565.651	20	1.000.537	23
Jumlah	1.847.082	100	2.787.956	100	4.364.730	100

Perseroan menerima sumber dana lainnya diluar dana pihak ketiga berupa pinjaman yang diterima. Pinjaman tersebut diantaranya berasal dari Bank Exim Jepang yang khusus untuk membiayai Kredit Usaha Kecil. Selain itu, Perseroan telah menerima direct bilateral loan dari International Finance Corporation (IFC). Perseroan juga melakukan diversifikasi penghimpunan dana dengan menerbitkan Obligasi.

2.2. Penyaluran Dana

Penempatan dan penyaluran dana ke dalam aktiva yang produktif yaitu meliputi pemberian kredit, penempatan pada bank lain, surat berharga dan penyertaan. Berikut adalah tabel penyaluran dana dalam aktiva produktif untuk periode 31 Desember 1999, 2000 dan 2001 :

TABEL PENYALURAN DANA

(dalam jutaan rupiah)

Penyaluran Dana	31 Desember					
	1999		2000		2001	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Penempatan pada bank lain	226.026	6	166.044	3	168.715	3
Surat berharga	1.956.303	55	1.444.495	30	1.752.661	27
Kredit yang diberikan	1.348.625	38	3.024.895	64	4.355.094	68
Penyertaan	41.416	1	121.583	3	141.683	2
Jumlah	3.572.370	100	4.757.017	100	6.418.153	100

Didalam menyalurkan dananya, Perseroan senantiasa menerapkan kebijakan/prinsip kehati-hatian, yang diwujudkan dengan cara melakukan diversifikasi dalam pemberian kreditnya sehingga konsentrasi pada sektor industri atau kelompok nasabah tertentu dapat dihindari. Portofolio kredit Perseroan saat ini terutama disalurkan pada sektor perindustrian, perdagangan dan jasa. Berikut ini adalah tabel portofolio kredit berdasarkan sektor usaha untuk periode 31 Desember 1999, 2000 dan 2001 :

TABEL PORTOFOLIO KREDIT BERDASARKAN SEKTOR USAHA

(dalam jutaan rupiah)

Sektor Usaha	31 Desember					
	1999		2000		2001	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Perindustrian	562.273	42	1.204.155	40	1.853.109	43
Konstruksi	57.975	4	72.603	2	101.150	2
Perdagangan	423.324	31	805.053	27	870.756	20
Jasa	209.018	16	567.707	19	974.772	22
Lain-lain	96.035	7	375.377	12	555.307	13
Jumlah	1.348.625	100	3.024.895	100	4.355.094	100
Penyisihan Penghapusan Kredit	74.451		95.169		72.239	

Ditinjau dari segi skala/nilai kredit, Perseroan mengelompokkan portofolio kreditnya dalam 3 kategori, yaitu: kredit skala kecil (kredit sampai dengan Rp 1 miliar), kredit skala menengah (kredit lebih dari Rp 1 miliar hingga Rp 10 miliar) dan kredit skala besar (kredit dengan nilai diatas Rp 10 miliar).

Berikut ini adalah tabel portofolio kredit berdasarkan skala kredit untuk periode 31 Desember 1999, 2000 dan 2001:

TABEL PORTOFOLIO KREDIT BERDASARKAN SKALA KREDIT

(dalam jutaan rupiah)

Skala Kredit	31 Desember					
	1999		2000		2001	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Kecil	436.403	32	910.554	30	1.127.022	26
Menengah	450.971	33	1.287.605	43	1.937.501	44
Besar	461.251	34	826.736	27	1.290.571	30
Jumlah	1.348.625	100	3.024.895	100	4.355.094	100
Penyisihan Penghapusan Kredit	74.451		95.169		72.239	

Dilihat dari jangka waktu pemberian kredit, Perseroan lebih memfokuskan penyaluran dananya kedalam kredit jangka pendek dan jangka menengah. Berikut adalah tabel penyaluran kredit berdasarkan jangka waktu untuk periode 31 Desember 1999, 2000 dan 2001:

TABEL PORTOFOLIO KREDIT BERDASARKAN JANGKA WAKTU

(dalam jutaan rupiah)

Jangka Waktu	31 Desember					
	1999		2000		2001	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
s/d 2 tahun	880.091	65	1.931.181	64	2.734.037	63
> 2 tahun	468.534	35	1.093.714	36	1.621.057	37
Jumlah	1.348.625	100	3.024.895	100	4.355.094	100
Penyisihan Penghapusan Kredit	74.451		95.169		72.239	

Dilihat dari tujuan penggunaannya, Perseroan mengelompokkan portofolio kreditnya dalam 3 kategori, yaitu: kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit konsumsi. Sebagian besar dari portofolio kredit Perseroan diberikan dalam bentuk kredit modal kerja.

Berikut adalah tabel penyaluran kredit berdasarkan jenis penggunaan kredit pada tanggal 31 Desember 1999, 2000, dan 2001:

TABEL PORTOFOLIO KREDIT BERDASARKAN JENIS PENGGUNAAN KREDIT

(dalam jutaan rupiah)

Jenis Penggunaan Kredit	31 Desember					
	1999		2000		2001	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Modal Kerja	1.012.866	75	2.342.684	77	3.295.070	76
Investasi	259.042	19	476.679	16	799.523	18
Konsumsi	76.717	6	205.532	7	260.501	6
Jumlah	1.348.625	100	3.024.895	100	4.355.094	100
Penyisihan Penghapusan Kredit	74.451		95.169		72.239	

Berikut adalah tabel penyaluran kredit berdasarkan jenis kredit yang diberikan dalam rupiah dan valuta asing untuk periode 31 Desember 1999, 2000 dan 2001 :

TABEL PORTOFOLIO KREDIT BERDASARKAN JENIS VALUTA

(dalam jutaan rupiah)

Jenis Valuta	31 Desember					
	1999		2000		2001	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Rupiah	978.486	73	2.519.509	83	3.677.999	84
Valas : USD	370.139	27	505.386	17	677.094	16
Jumlah	1.348.625	100	3.024.895	100	4.355.094	100
Penyisihan Penghapusan Kredit	74.451		95.169		72.239	

Pada tabel berikut disajikan tabel portofolio kredit kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga serta disajikan pula tabel portofolio kredit berdasarkan 5 kategori kolektibilitas.

TABEL PORTOFOLIO KREDIT KEPADA PIHAK KETIGA & PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

(dalam jutaan rupiah)

Jenis Hubungan	31 Desember					
	1999		1998		1999	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pihak Ketiga	1.348.079	99,96	3.024.168	99,98	4.354.022	99,98
Pihak Hubungan Istimewa	546	0,04	727	0,02	1.072	0,02
Jumlah	1.348.625	100	3.024.895	100	4.355.094	100
Penyisihan Penghapusan Kredit	74.451		95.169		72.239	

TABEL PORTOFOLIO KREDIT BERDASARKAN KOLEKTIBILITAS

(dalam jutaan rupiah)

Kategori Kolektibilitas	31 Desember					
	1999		2000		2001	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Lancar	1.119.256	83	2.688.205	89	4.152.630	95
Dalam Perhatian Khusus	39.073	3	152.015	5	24.490	1
Kurang Lancar	91.752	7	45.321	2	122.016	3
Diragukan	44.447	3	11.643	0	7.630	0
Macet	54.097	4	127.711	4	48.328	1
Jumlah	1.348.625	100	3.024.895	100	4.355.094	100
Penyisihan Penghapusan Kredit	74.451		95.169		72.239	

Kredit merupakan komponen asset produktif yang utama bagi perbankan. Oleh karenanya Perseroan senantiasa berpedoman pada prinsip kehati-hatian didalam menyalurkan kreditnya. Untuk itu Perseroan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- Membentuk Komite Kebijakan Perkreditan untuk menetapkan strategi dan arah perkreditan yang tepat dan sehat dengan memperhatikan aspek hukum, distribusi/komposisi penyalurannya pada sektor usaha, jangka waktu dan segmen pasar.
- Membentuk Komite Kredit pada masing-masing kantor operasional dan kantor pusat untuk menerapkan prosedur pemberian kredit yang hati-hati. Setiap Komite Kredit minimum terdiri dari tiga orang yang bertugas untuk mengambil keputusan berdasarkan analisa kualitatif maupun analisa kuantitatif yang memadai.
- Menjaga rasio penyaluran kredit terhadap sumber dana (LDR) agar selalu berada dalam tingkat yang sehat, dan senantiasa mematuhi ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit yang berlaku sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, serta membantu program pemerintah dalam menyalurkan Kredit Usaha Kecil (KUK) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- Memelihara cadangan penyisihan kredit yang cukup sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

2.3. Pendapatan Non-Bunga

Pendapatan non-bunga merupakan pendapatan yang berasal dari penerimaan biaya administrasi yang diterima dari pihak ketiga dalam rangka penempatan giro, tabungan, deposito, dan sertifikat deposito, penjualan buku cek dan giro, pendapatan yang diperoleh dari safe deposit box, inkaso, transfer, letter of credit (LC), pendapatan dari transaksi uang kertas asing, pendapatan dari transaksi dan kepemilikan surat berharga, bank garansi dan pendapatan dari ekspor dan impor serta laba dari perusahaan afiliasi.

Berikut ini diuraikan pendapatan non-bunga dari periode 31 Desember 1999, 2000 dan 2001:

(dalam jutaan rupiah)

	31 Desember		
	1999	2000	2001
Pendapatan Non-Bunga	24.574	53.296	69.745

Perseroan mengalami peningkatan pendapatan non-bunga sebesar 31% dibandingkan dengan periode 31 Desember 2000, karena meningkatnya pendapatan dari transaksi dan kepemilikan surat berharga.

2.4. Kegiatan Lain - Lain

Kegiatan-kegiatan lainnya yang ikut mendukung kegiatan utama Perseroan adalah sebagai berikut:

2.4.1. Kerjasama dengan Pihak Lain

Kegiatan-kegiatan lainnya yang ikut mendukung kegiatan utama Perseroan adalah sebagai berikut :

- Kerjasama dengan USAID (Lembaga Bantuan dari Amerika Serikat).
- Kerjasama dengan Lembaga Keuangan Dunia (IFC: International Finance Corporation) dalam rangka pendanaan dan penyertaan
- Kerjasama dalam bentuk "technical assistant" dan kepemilikan saham di PT. Bank Daiwa Perdania.
- Kerjasama dengan OCBC Bank Ltd dari Singapura dalam bentuk bank patungan bernama Bank OCBC - NISP
- Kerjasama dengan jaringan ATM Bersama yang dikelola oleh PT. Aplikanusa Lintasarta dengan beberapa bank dalam penyediaan fasilitas ATM (Anjungan Tunai Mandiri) untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah.

- Kerjasama dengan PT. Telkom Bandung untuk pembayaran Telkom 022 melalui ATM NISP
- Kerjasama dengan PT. Multi Adiguna Mandiri dan Artajasa untuk pengembangan layanan Kartu Debet NISP (NISP Kartuku)
- Kerjasama strategis dengan PT. Belaputera Intiland untuk pemasaran Kota Mandiri, Kota Baru Parahyangan melalui KPR Merdeka NISP.
- Kerjasama dengan PT. Telkom Batam untuk pembayaran tagihan telepon di Batam.

2.4.2. Rencana Penambahan Jaringan Kantor

Untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah dan guna mendorong kegiatan usahanya, Perseroan merencanakan untuk memperluas jaringan distribusinya melalui perluasan kantor yang tersebar antara lain di Jawa, Bali, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan daerah lain yang berpotensi dimana hingga akhir tahun 2002 direncanakan akan memiliki total kantor sebanyak paling sedikit 100 kantor. Selain itu Perseroan juga akan mengembangkan jaringan ATM yang bisa memberikan kemudahan/fleksibilitas akses dalam hal waktu maupun jarak distribusi melalui mitra strategis.

2.4.3. Sistem Manajemen Mutu

Sejak tahun 1995, Bank NISP telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO (International Organization for Standardization), yang diawali dengan penerapan ISO 9002 dan saat ini telah disesuaikan dengan ISO 9001 - 2000.

Dengan kelompok-kelompok GKM (Gugus Kendali Mutu), program Service Quality serta kegiatan-kegiatan lain yang berfokus pada peningkatan mutu, Bank NISP berupaya untuk senantiasa meningkatkan kualitas kerja secara terus menerus, terutama kualitas pelayanannya, yang berujung pada peningkatan kepuasan nasabah dari waktu ke waktu.

Dalam upaya memastikan roda usaha Bank NISP agar dapat berjalan selaras dan tidak tumpang tindih, maka tanggung jawab dan wewenang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara konsisten di seluruh lapisan manajemen.

Tidak berhenti sampai di situ, agar Bank NISP dapat terus berkembang, jajaran manajemen menempuh berbagai upaya untuk terus membenahi Sistem Manajemen Mutu yang sedang berjalan, yaitu dengan :

- Memastikan terpenuhinya kebutuhan dan harapan nasabah, serta persyaratan hukum dan perundang-undangan
- Menetapkan kebijakan mutu
- Menetapkan target-target usaha yang harus dicapai
- Melaksanakan evaluasi secara berkala
- Menyediakan segala sumber daya yang dibutuhkan
- Upaya-upaya tersebut dibarengi dengan pemantauan dan analisis yang tajam.

Untuk mencapai target-target usaha yang telah ditetapkan, maka seluruh kegiatan Bank NISP dijalankan berdasarkan rencana kerja yang matang dan akurat. Kemudian rencana tersebut dikomunikasikan kepada seluruh karyawan dari level atas sampai level yang terendah.

Untuk terus memperbaiki dan mengembangkan Sistem Manajemen Mutu, pada awal tahun 2002, telah disepakati oleh seluruh leaders Bank NISP untuk menetapkan Service Level masing-masing Unit Kerja. Komitmen tersebut menjadi salah satu dari serangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan berkaitan dengan pencanangan Tahun 2002 sebagai Tahun Kualitas.

Nasabah, yang merupakan aset utama Bank NISP, selalu dipantau kepuasannya terhadap jasa perbankan yang diberikan. Tercapai tidaknya kepuasan nasabah dengan pelayanan jasa perbankan yang diberikan, akan menunjukkan tingkat efektivitas Sistem Manajemen Mutu Bank NISP.

Selain melakukan pemantauan terhadap jasa perbankan yang disediakan, Bank NISP sendiri selalu dipantau melalui audit mutu oleh lembaga independen secara berkala. Hasil audit tersebut merupakan masukan yang berharga bagi evaluasi manajemen.

Melalui pembagian tugas yang lebih fokus, pengelolaan mutu yang lebih terintegrasi di segala bidang disertai komitmen dan pemantauan yang serius, manajemen Bank NISP menempatkan harapan tinggi untuk bisa menjadikan Bank NISP sebagai bank dengan tingkat layanan 5 besar terbaik di Indonesia di akhir tahun 2002.

2.4.4. Pengembangan Sistem Informasi

Dari Segi Perangkat Lunak ("Software")

Program Aplikasi Operasional Perbankan yang dibuat secara internal, terus disempurnakan mengikuti kebutuhan intern (efisiensi dan efektifitas) maupun ekstern (BI, investor, nasabah, dll)

Pada tahun 2001, Perseroan mengembangkan program CMS (Cash Management Service) untuk membantu nasabah perusahaan mengelola keuangan-nya. Program ini dimulai dengan penanganan pembayaran gaji karyawan dan pembayaran ke supplier. Kemudian dilanjutkan dengan pembayaran uang sekolah serta uang pembayaran langganan air bersih/PAM (Jababeka Cikarang dan ATB Batam) dan uang pembayaran rumah sakit.

Rencana selanjutnya untuk program CMS ini yaitu dikembangkannya program Private Access yang di-install di perusahaan-perusahaan sehingga nasabah perusahaan bisa melihat saldo rekeningnya setiap saat dan melaksanakan perintah untuk transfer atau pindah buku, juga perintah pembayaran gaji atau supplier.

Di tahun yang sama, Perseroan melakukan migrasi sistem Database dari Sybase SQL Server ke Microsoft SQL Server 2000. Migrasi ini dimaksud untuk menggunakan teknologi yang lebih baru misalnya memanfaatkan Server SMP (Symetric Multi Processor), agar beban kerja Server bisa dibagi ke beberapa processor. Juga teknologi yang lebih baru memungkinkan adanya proses-proses yang dischedule secara otomatis.

Perseroan juga melakukan perubahan sistem Program Client dari SQL Windows ke VB. Alasan migrasi ini juga sama yaitu untuk menggunakan teknologi yang lebih baru misalnya menunjang sistem operasi yang 32 Bit, teknologi COM agar program lebih modular.

Masih di tahun 2001 Perseroan melakukan perubahan program yang signifikan sehubungan dengan perubahan organisasi Cabang yang dikenal dengan OCa (Optimalisasi Cabang), dimana pembagian tugas yang lebih spesifik dan Front Liner sekarang diarahkan untuk selling dan service, semua pekerjaan administrasi dilakukan di Back Office.

Di tahun 2002, tepatnya di bulan Maret 2002, Perseroan selesai mengimplementasikan program OCa keseluruhan Cabang. Berbagai pembenahan program akan terus dilakukan seperti misalnya modul pinjaman yang lebih memudahkan pencatatan administrasi, pembuatan laporan dan pemantauan. Juga optimalisasi program terus dilakukan secara berkesinambungan.

Di samping itu, Perseroan juga sedang menyiapkan program sehubungan akan diterbitkannya kartu Debet serta pengembangan Web Intern, media forum diskusi antar karyawan.

Dari Segi Perangkat Keras dan Jaringan Komunikasi

Dengan tetap mengandalkan pada PC, Perseroan senantiasa mengupdate hardware yang ada agar selalu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Sejalan dengan implementasi OCa, perangkat keras di seluruh cabang NISP telah diganti dengan teknologi terakhir untuk menjaga aspek keandalannya.

Dengan memanfaatkan jaringan antar kantor yang sudah sepenuhnya on-line, saat ini Perseroan telah memiliki jaringan intranet yang memadai dimana akan terus dikembangkan.

ATM Switching juga mendorong perkembangan jumlah ATM NISP. Per 31 Desember 2001, Perseroan telah memiliki sekitar 59 unit ATM dan akan terus ditambah sejalan dengan perkembangan jaringan usaha Bank NISP.

2.5. Kegiatan Perusahaan Afiliasi

PT Bank Daiwa Perdania

PT Bank Daiwa Perdania, yang merupakan bank campuran antara Daiwa Bank Ltd, Japan dengan partner lokal, semula bernama PT Bank Perdania. Didirikan pada tahun 1953 dengan kegiatan usaha dalam bidang perbankan, dan merupakan bank yang dikelola dengan baik.

Berikut ini adalah tabel ringkasan laporan keuangan PT Bank Daiwa Perdania pada tanggal-tanggal 31 Desember 1999, 2000, 2001 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendra Winata dan Rekan.

(dalam miliar rupiah)

	31 Desember		
	1999	2000	2001
Kredit yang diberikan	1.661,0	2.447,5	2.633,2
Total Aktiva	2.369,7	3.152,8	3.333,9
Dana Pihak Ketiga	1.156,6	1.340,9	1.498,8
Modal Sendiri	254,0	567,5	591,4
Pendapatan Bunga Bersih	205,7	147,2	177,4
Laba Bersih	36,0	187,3	81,3

PT Bank OCBC - NISP

PT Bank OCBC-NISP yang merupakan bank campuran hasil kerjasama Perseroan dengan OCBC Bank Ltd. dari Singapura memulai operasinya pada tahun 1997. OCBC Bank Ltd. didirikan pada tahun 1932 dan merupakan salah satu bank terbesar di Singapura. Menurut majalah terkemuka di Asia "Asiaweek" edisi tanggal 15 September 2000, berdasarkan hasil pemeringkatannya menempatkan OCBC Ltd. sebagai bank terbesar ke-3 di Singapura. OCBC Bank Ltd. ini mempunyai jaringan luas yang tersebar di manca negara seperti Australia, Hongkong, Jepang, Malaysia, Cina, Korea, Thailand, Myanmar, Filipina, Inggris dan Amerika Serikat.

Perseroan memiliki penyertaan senilai Rp 22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) atau merupakan 15% dari modal ditempatkan dan disetor penuh PT Bank OCBC-NISP.

Berikut ini tabel ringkasan laporan keuangan PT Bank OCBC-NISP yang baru beroperasi pada tahun 1997. Laporan keuangan per tanggal 31 Desember 1999, 2000 dan 2001 telah diaudit oleh Akuntan Publik Drs. Hadi Susanto & Rekan Price Waterhouse.

(dalam miliar rupiah)

	31 Desember		
	1999	2000	2001
Kredit yang diberikan		87,6	142,5
Total Aktiva	63,7	465,5	535,3
Dana Pihak Ketiga	316,4	182,1	182,6
Modal Sendiri	90,3	201,0	218,8
Pendapatan Bunga Bersih	219,2	30,0	37,5
Laba Bersih	57,0	13,8	17,9

3. PEMASARAN

Dengan semakin ketatnya tingkat persaingan, Perseroan melakukan penghimpunan dana melalui berbagai cara yang memuat sentuhan dan implementasi lokal. Produk - produk yang ada di kemas kembali untuk menjawab kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang.

Peluncuran program TAKA Ericsson merupakan strategi yang diterapkan untuk meningkatkan volume secara cepat dengan menggandeng kerjasama dengan Ericsson. Strategi ini juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan awareness.

Produk Giro juga tidak ketinggalan masuk dalam strategi melalui peluncuran Giro Prestasi, merupakan program incentive kepada nasabah atas prestasi giro yang dicapai di tahun 2002 yang diterapkan secara lokal fokus pada kebutuhan market tertentu di Regional III.

Sejalan dengan program funding, Customer Base Program juga merupakan fokus utama tahun 2002 melalui kerjasama dengan PT. Multi Adiguna Manunggal dan PT. Artajasa, menyiapkan layanan kartu Debet NISP (NISP Kartuku) yang fokus pada segmen anak-anak muda dan profesional muda di Regional I. Layanan tersebut dilengkapi dengan Kartu ATM yang menarik bisa full photo yang bisa dipakai "gaya abis - abisan" oleh segmen anak - anak muda.

Salah satu target tahun 2002 yaitu meningkatkan volume kredit konsumen khususnya KPR. Salah satu strategi yang diterapkan adalah dengan membangun infrastruktur internal yaitu SDM dan sistem/proses yang cepat melalui penerapan scoring juga dengan melakukan kerjasama strategis dengan beberapa developer. Salah satunya adalah aliansi strategis untuk pemasaran Kota Mandiri, Kota Baru Parahyangan melalui KPR Merdeka NISP.

Pembangunan infrastruktur tersebut juga tidak luput dari pemanfaatan teknologi tinggi yaitu pengembangan alternatif external channel distribution melalui web site www.kprmerdeka.com. Nasabah dapat memanfaatkan web site tersebut untuk simulasi kredit/budget, informasi developer/broker, termasuk fasilitas apply on line. Nasabah dapat langsung mengisi aplikasi dan mengirimkannya secara elektronik ke Bank NISP dengan demikian dapat mempercepat proses KPR nasabah yang sudah menjadi trademark KPR Merdeka NISP yaitu 5 hari kerja.

Semakin kompetitifnya persaingan menuntut Perseroan untuk lebih selektif bermain di pasar dengan fokus pada kelebihan atau kekuatan di wilayah tertentu. Dengan menggandeng PT. Telkom wilayah Batam, Bank NISP mengembangkan layanan one stop payment melalui ATM NISP untuk pembayaran tagihan telkom dan telkomsel yang pertama di Batam. Nasabah dapat mengakses seluruh ATM NISP untuk melakukan pembayaran tagihan tersebut secara on line 24 jam selama 7 hari. Pengembangan layanan ini merupakan strategi untuk meningkatkan fee based dan customer based cabang Batam.

Dengan melakukan strategi-strategi di atas, Perseroan telah berhasil meningkatkan sumber dana, baik dari dana pihak ketiga maupun dari pinjaman serta menyalurkan dana-dana tersebut dengan tingkat pertumbuhan yang berarti. Hal ini menjadi bukti bahwa kepercayaan masyarakat kepada Perseroan masih terjaga dengan baik.

4. TINGKAT KESEHATAN

Tingkat kesehatan Perseroan selama 24 bulan terakhir adalah SEHAT. Hal ini juga dinyatakan dalam surat Bank Indonesia No. 4/13/DPwB1/Bd/Rahasia, tanggal 8 Mei 2002.

Berbagai peraturan yang berlaku bagi perbankan di Indonesia pada dasarnya adalah untuk menciptakan iklim perbankan nasional yang sehat. Peraturan-Peraturan tersebut antara lain mencakup ketentuan mengenai Rasio Pinjaman Terhadap Dana Pihak Ketiga (Loan to Deposit Ratio-LDR), Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio-CAR), Batas Maksimum Pemberian Kredit (Legal Lending Limit-LLL) serta Posisi Devisa Netto (Net Open Position-NOP).

Untuk memperkecil kemungkinan munculnya aktiva produktif bermasalah, dibentuk unit kerja khusus yang menangani penagihan dan pemeliharaan kredit sehingga membantu didalam menurunkan jumlah kredit bermasalah. Perseroan juga membatasi transaksi valuta asing agar selalu terpelihara posisi devisa netto yang aman, memperkecil resiko kredit dengan menetapkan limit pemberian kredit, berusaha mencapai kegiatan operasional yang efisien agar diperoleh rentabilitas optimal dan senantiasa memperhatikan kecukupan likuiditas.

Rasio Pinjaman Terhadap Dana Pihak Ketiga (LDR)

Berikut ini adalah tabel Rasio Pinjaman Terhadap Dana Pihak Ketiga (LDR) untuk periode 31 Desember 1999, 2000 dan 2001 :

	31 Desember		
	1999	2000	2001
LDR	34,15%	59,29%	66,33%

Ditahun 1999, dunia perekonomian masihlah lesu. Walaupun jumlah kredit yang diberikan sudah mengalami kenaikan sebesar 39%, akan tetapi karena jumlah penghimpunan dana pihak ketiga mengalami kenaikan jauh lebih tinggi, yaitu meningkat hingga 61%, maka rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga pada tahun 1999 masih tetap rendah.

Namun, ditahun 2000, kondisi perekonomian sudah berangsur pulih, sehingga pada periode 31 Desember 2001 sudah terlihat adanya kenaikan rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga dibandingkan dengan posisi akhir tahun 1999.

Kemudian, seiring dengan ekspansi yang dilakukan oleh perseroan sehingga pada periode 31 Desember 2001 Perseroan berhasil mencapai rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga sebesar 66,33%.

Berikut ini disajikan tabel perbandingan antara kredit yang diberikan dan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun Perseroan pada periode 31 Desember 1999, 2000, dan 2001:

(dalam jutaan rupiah)

	31 Desember		
	1999	2000	2001
Kredit yang Diberikan	1.348.625	3.024.895	4.355.094
Giro	379.931	538.309	768.769
Tabungan	513.536	643.359	755.751
Deposito dan Sertifikat Deposito	1.847.082	2.787.956	4.364.730
Dana Pihak Ketiga	2.740.549	3.969.624	5.889.250

Rasio Kecukupan Modal

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/21/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 menetapkan bahwa Bank wajib menyediakan modal minimum atau CAR sebesar 8% dan perseroan berhasil mencapai rasio CAR melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Posisi CAR Perseroan pada tanggal 31 Desember 1999, 2000 dan 2001 adalah 14,87%, 9,94% dan 9,02%.

Penyisihan Penghapusan Kredit

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur BI no. 31/148/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 besarnya prosentase penyisihan penghapusan dibagi menjadi 5 kategori dengan tingkat yang berbeda untuk setiap periode dari tanggal 1 Januari 1999 sampai 31 Desember 2001. Prosentase penyisihan penghapusan yaitu sebesar minimum 0,25% - 1% untuk kredit Lancar, minimum 1,25% - 5% untuk kredit Dalam Perhatian Khusus, minimum 3,75% - 15% untuk kredit Kurang Lancar, minimum 50% untuk kredit Diragukan dan 100% untuk kredit Macet. Prosentase penyisihan penghapusan untuk kredit yang dikategorikan Kurang Lancar, Diragukan dan Macet dihitung setelah terlebih dulu memperhitungkan nilai agunan yang dikuasai.

Rasio Cadangan Wajib Minimum

Kemampuan Perseroan dalam membiayai aktiva lancar telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia, sesuai dengan ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) yaitu 5%.

Tabel di bawah ini menunjukkan prosentase GWM untuk periode 31 Desember 1999, 2000 dan 2001.

	31 Desember		
	1999	2000	2001
Rupiah	5,21%	5,46%	5,24%
Valas	3,25%	3,10%	6,46%

Rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

Dalam operasional sehari-hari Perseroan selalu memperhatikan kualitas aktiva produktifnya dan rasio KAP Perseroan berada pada tingkat yang relatif baik. Untuk priode 31 Desember 1999, 2000 dan 2001 masing-masing sebesar 3,96%, 3,97% dan 1,82%, .

Berikut disajikan tabel komposisi kredit berdasarkan kolektibilitas untuk periode 31 Desember 1999, 2000 dan 2001:

(dalam jutaan rupiah)

Kredit Berdasarkan Kolektibilitas	31 Desember					
	1999		2000		2001	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Lancar	1.119.256	83	2.689.074	89	4.152.630	95
Dalam Perhatian Khusus	39.073	3	152.015	5	24.490	1
Kurang Lancar	91.752	7	45.321	2	122.016	3
Diragukan	44.447	3	11.643	0	7.630	0
Macet	54.097	4	126.842	4	48.328	1
Jumlah	1.348.625	100	3.024.895	100	4.355.094	100
Penyisihan Penghapusan Kredit	74.451		95.169		72.239	

Posisi Devisa Netto (PDN)

Menurut Surat Keputusan Bank Indonesia No. 31/178/KEP/DIR yang mulai berlaku 31 Maret 1999, pengertian Posisi Devisa Netto (PDN) adalah angka yang merupakan penjumlahan nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontijensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.

Bank wajib memelihara Posisi Devisa Netto setiap akhir hari setinggi-tingginya 20% dari modal. Posisi PDN Perseroan per 31 Desember 1999, 2000 dan 2001 adalah sebagai berikut :

(dalam miliar rupiah)

	31 Desember		
	1999	2000	2001
Batas Maksimum Posisi Devisa Netto (20% dari modal)	69,0	76,6	79,7
Posisi Devisa Netto Perseroan	6,6	41,1	1,0

Kredit Usaha Kecil

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/2/PBI/2001 tentang pemberian Kredit Usaha Kecil ditetapkan bahwa Kredit Usaha Kecil adalah pembiayaan dari Bank investasi atau Kredit Modal Kerja yang diberikan dalam Rupiah dan/atau valuta asing kepada nasabah usaha kecil dengan plafond kredit keseluruhan maksimum Rp 500.000.000,00 dan ditujukan untuk membiayai usaha yang produktif.

Pada peraturan itu disebutkan bahwa Bank dianjurkan menyalurkan sebagian dananya melalui pemberian KUK , dan berdasarkan kriteria tersebut total KUK yang telah disalurkan perseroan pada 31 Desember 1999, 2000 dan 2001 adalah Rp. 174 miliar, 166 miliar dan Rp. 348 miliar.

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 31/16/UPPB tanggal 31 Desember 1998 maka BMPK adalah merupakan persentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal. Penyediaan dana tersebut dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan antar bank penyertaan, termasuk komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif. BMPK untuk pihak terkait ditetapkan setinggi-tingginya 10% dari modal. BMPK untuk pihak tidak terkait ditetapkan sebesar 30% dari modal sampai dengan tahun 2001, 25% dari modal sampai dengan tahun 2002 dan 20% dari modal mulai 1 Januari 2003. Sebelumnya BMPK tersebut ditetapkan maksimum 10% dari modal untuk pihak yang terkait dan 20% dari modal untuk pihak yang tidak terkait.

Mengacu kepada ketentuan tersebut, Perseroan tidak melanggar atau melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit.

Berikut disajikan tabel posisi BMPK Perseroan, baik untuk pihak terafiliasi maupun pihak ketiga untuk periode 31 Desember 1999, 2000 dan 2001 :

(dalam jutaan rupiah)

	31 Desember					
	1999		2000		2001	
	Pihak Terafiliasi	Pihak Ketiga	Pihak Terafiliasi	Pihak Ketiga	Pihak Terafiliasi	Pihak Ketiga
BMPK	34.479	103.437	38.262	114.785	39.893	119.678

5. PROSPEK USAHA

Perekonomian Indonesia

Tahun 2001 masih merupakan tahun yang berat bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Setelah mengalami pertumbuhan sebesar 4,9% di tahun 2000, perekonomian Indonesia sedikit melambat dan mencatat pertumbuhan sebesar 3,3% di tahun 2001. Sementara itu, inflasi bergerak naik dari 9,3% di tahun 2000 menjadi 12,5% di tahun 2001, antara lain dipicu oleh kenaikan harga BBM dan tarif listrik.

Tingginya tingkat inflasi pada gilirannya menyebabkan suku bunga cenderung mengalami peningkatan. Rata-rata suku bunga SBI satu bulan tercatat sebesar 16,6% di tahun 2001, meningkat dibandingkan dengan 12,5% di tahun 2000. Sebagai akibatnya, biaya dana mengalami peningkatan, sehingga menyulitkan bank-bank yang memiliki ketergantungan pada aktiva produktif berbunga tetap, seperti obligasi pemerintah berbunga tetap.

Sementara itu, investasi dan ekspor yang semula diharapkan tetap menjadi motor pertumbuhan pada 2001 mengalami pertumbuhan yang tidak terlalu menggembirakan, yaitu hanya tumbuh masing-masing sebesar 4,0% dan 1,9% atau melambat dibandingkan dengan pertumbuhan di tahun 2000 yang masing-masing tumbuh sebesar 21,9% dan 26,5%. Melemahnya investasi ini tidak terlepas dari tingginya risiko investasi akibat masih adanya gangguan keamanan, ketidakpastian penegakan hukum, dan perselisihan perburuhan. Sementara itu, menurunnya kinerja ekspor disebabkan oleh melemahnya perekonomian dunia dan menurunnya harga beberapa komoditas utama ekspor Indonesia. Selain itu, depresiasi nilai tukar rupiah telah berdampak pada naiknya biaya factor produksi sehingga mengurangi daya saing produk ekspor Indonesia, yang sebagian besar memiliki kandungan impor yang tinggi.

Perkembangan nilai tukar rupiah selama 2001 masih mengalami tekanan depresiasi yang tinggi disertai dengan volatilitas yang meningkat walaupun sempat menguat pada pertengahan tahun. Secara keseluruhan nilai tukar rupiah mengalami depresiasi sekitar 17,7% dari tahun 2000, yaitu dari rata-rata Rp 8.438 per dollar menjadi Rp 10.255 per dollar.

Belum pulihnya fungsi intermediasi perbankan juga menjadi salah satu faktor yang menimbulkan tekanan pada nilai tukar dan inflasi serta mengurangi efektivitas transmisi kebijakan moneter dalam mempengaruhi inflasi dan kegiatan ekonomi.

Sementara itu di sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi lebih banyak didorong oleh konsumsi rumah tangga. Pengeluaran konsumsi dalam tahun 2001 tumbuh sebesar 6,2%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,9%.

Kondisi Industri Perbankan

Sebagai hasil dari berbagai kebijakan perbankan yang ditempuh Pemerintah dan Bank Indonesia pada beberapa tahun terakhir, kinerja industri perbankan mulai menunjukkan kemajuan. Beberapa indikator kinerja, khususnya menyangkut pemenuhan CAR minimum 8% dan NPLs 5% menunjukkan perbaikan.

Jumlah bank yang mencapai tingkat CAR sebesar 8% sampai dengan November 2001 sebanyak 138 dari 145 bank. Berarti, secara umum struktur permodalan bank mengalami perbaikan yang cukup berarti dibanding awal krisis pada pertengahan tahun 1997. NPLs juga telah mengalami perbaikan yang cukup signifikan yaitu mencapai 12,1% dari 18,8% pada tahun 2000. Hal ini terutama disebabkan karena adanya penghapusbukuan kredit macet, restrukturisasi dan penyelesaian kredit, pengalihan kredit ke BPPN, serta penyaluran kredit baru.

Net interest Margin (NIM) perbankan meningkat rata-rata Rp 1,9 triliun pada tahun 2000 menjadi Rp 3,2 triliun pada tahun 2001. Indikator ini menunjukkan membaiknya kinerja perbankan dilihat dari sisi profitabilitas.

Namun demikian, peningkatan NIM ini terutama berasal dari spread positif karena naiknya suku bunga SBI dan besarnya penerimaan obligasi pemerintah yang mencapai sekitar 45,3% dari total pendapatan bunga. Sementara itu, pendapatan bunga dari kredit perbankan hanya tercatat sebesar 32,2%.

Tingginya ketergantungan perbankan terhadap penerimaan bunga obligasi mengindikasikan proses restrukturisasi perbankan yang telah dilakukan masih belum mampu meningkatkan fungsi intermediasi perbankan secara keseluruhan.

Untuk memulihkan fungsi intermediasi perbankan, pemerintah dan Bank Indonesia akan mendorong perbankan untuk lebih banyak lagi menyalurkan kredit kepada sektor-sektor yang dianggap telah siap dan memiliki risiko yang relatif rendah seperti kredit bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan kredit ekspor dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat.

Selain itu, usaha untuk meningkatkan kesehatan bank juga akan didukung dengan upaya-upaya yang terus menerus untuk menekan angka NPLs perbankan nasional dengan mewajibkan bank-bank untuk mencapai target NPLs sebesar 5% pada akhir 2002. Di samping NPLs, upaya untuk memelihara CAR bank-bank yang telah mencapai 8% terus dilakukan khususnya terhadap bank-bank yang struktur permodalannya masih rentan terhadap pengaruh kenaikan suku bunga dan melemahnya nilai tukar serta penurunan kualitas kredit.

Prospek bagi Perseroan

Kondisi perekonomian Indonesia, dan kondisi perbankan nasional seperti yang digambarkan di atas, tengah mengalami kondisi yang buruk, namun ditengah-tengah krisis tersebut Perseroan masih tetap bertahan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- Dilihat dari sumber pendanaan, Perseroan memiliki komposisi pendanaan jangka panjang dalam rupiah dan valuta asing yang cukup sehingga tidak sampai terjadi kekurangan likuiditas.
- Dilihat dari biaya dana yang relatif tinggi saat ini, Perseroan memiliki komposisi pendanaan dengan tingkat bunga tetap, yang diperoleh saat suku bunga rendah, sehingga memungkinkan Perseroan untuk dapat memberikan subsidi bunga terhadap penyaluran kredit dengan tujuan tetap menjaga kualitas aktiva produktifnya agar jangan sampai terjadi kemacetan.
- Perseroan mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari para penabung dan deposannya, sehingga tetap dapat mengembangkan usahanya dengan baik, bahkan melebihi situasi normal.
- Dampak dari menurunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, tidak memperburuk kondisi Bank, dikarenakan tagihan Perseroan dalam valuta asing melebihi kewajibannya dalam valuta asing, ditambah pula kewajiban dalam valuta asing rata-rata berjangka cukup panjang, sehingga tidak memerlukan likuiditas valuta asing yang mendesak.

Dari data dan uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa di tengah situasi perekonomian yang masih dalam tahap pemulihan, masih terbuka peluang bagi Perseroan untuk tetap berkembang dan Perseroan yakin akan mampu tetap tumbuh baik.

6. LAIN-LAIN

Menyangkut pemenuhan kewajiban perpajakan, selama ini Perseroan selalu memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan. Sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Fiskal Nomor : SR-82/WJP.07/BD.03/2002 tanggal 24 April 2002, diterangkan bahwa Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak atas seluruh kewajiban PPh, PPN, maupun PBB.

Perseroan saat ini menghadapi beberapa perkara perdata di Pengadilan Negeri, sebagai berikut: 8 perkara di Bandung; 4 perkara di Semarang; 1 perkara di Bogor; 2 perkara di Cibadak, 1 perkara di Sukabumi; 1 perkara di Sidoarjo, dan perincian perkara-perkara mana diungkapkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dari Konsultan Hukum LOU & Mitra tertanggal 16 Mei 2002.

Perkara-perkara tersebut secara material tidak mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1999, 2000 dan 2001 yang disarikan dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar Drs. Robert Yogi dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Untuk tahun 1999 disajikan kembali sesuai Revisi PSAK Pasal 31.

(dalam jutaan rupiah)

NERACA	31 Desember		
	1999	2000	2001
Total aktiva	4.044.071	5.261.023	7.137.366
Penempatan pada bank lain (bersih)	225.041	164.644	168.261
Surat-surat berharga (bersih)	1.952.333	1.439.818	1.742.915
Kredit yang diberikan (bersih)	1.274.174	2.929.726	4.282.855
Penyertaan saham (bersih)	41.157	120.437	140.168
Jumlah aktiva produktif	3.572.370	4.757.017	6.418.153
Cadangan aktiva produktif	79.665	102.392	83.954
Jumlah kewajiban	3.718.518	4.881.417	6.658.024
Dana pihak ketiga	2.740.549	3.969.624	5.889.250
Giro	379.931	538.309	768.769
Deposito berjangka	1.745.075	2.593.865	4.136.440
Sertifikat deposito	102.006	194.090	228.290
Tabungan	513.536	643.359	755.751
Pinjaman yang diterima *)	496.995	392.655	279.084
Modal sendiri	325.552	379.605	479.341
Total kewajiban dan modal sendiri	4.044.071	5.261.023	7.137.366

*) termasuk pinjaman Subordinasi tahun 2001 Rp 52.000 juta (USD 5.000.000)

(dalam jutaan rupiah kecuali laba per saham)

PERHITUNGAN LABA RUGI	31 Desember		
	1999	2000	2001
Pendapatan Bunga	545.897	522.290	746.348
Beban Bunga	432.301	365.763	530.398
Pendapatan Bunga Netto	113.596	156.527	215.950
Pendapatan Lainnya	24.574	53.296	69.745
Beban Lainnya	111.744	141.545	191.615
Laba Operasional	26.426	68.277	94.079
Pajak Penghasilan	5.527	10.200	22.960
Laba Bersih	19.491	60.665	71.492
Laba Operasional per saham (Rp)	24	62	77
Laba Bersih per saham (Rp)	18	55	59

RASIO KEUANGAN	31 Desember		
	1999	2000	2001
Pertumbuhan (%)			
Pendapatan Bunga	(21,80)	(4,32)	42,90
Beban Bunga	(25,55)	(15,39)	45,01
Pendapatan Bunga Bersih	(3,26)	37,79	37,96
Laba Operasional	(23,47)	158,37	37,79
Laba Bersih	(25,92)	211,25	17,85
Kredit yang diberikan (bersih)	42,04	129,93	46,19
Jumlah aktiva	51,22	30,09	35,66

Setiap pemegang saham yang memiliki 3 (tiga) saham dengan nilai nominal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) setiap saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Juni 2002 pukul 16.00 WIB, mempunyai 2 (dua) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") untuk membeli sebanyak 2 (dua) saham baru dengan harga penawaran Rp 405,- (empat ratus lima Rupiah) setiap saham juga terjadi pada tanggal 31 Desember 2001, maka struktur ekuitas Perseroan secara proforma pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Apabila kenaikan modal dasar dari Rp. 500 miliar menjadi Rp. 1,2 triliun terjadi pada tanggal 31 Desember 2001 dan harga pelaksanaan HMETD adalah Rp 405,- setiap lembar sahamnya, maka :

Perkiraan	Modal Dasar	Modal Disetor	Tambahan Modal Disetor	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
	Rp miliar	Rp miliar	Rp miliar	Rp miliar	Rp miliar
Posisi dalam laporan keuangan pada 31 Desember 2001	500,00	303,97	30,24	145,13	479,34
Seandainya kenaikan modal dasar terjadi pada tanggal 31 Desember 2001	700,00				
Seandainya Penawaran Umum Terbatas III dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada tanggal 31 Desember 2001 dengan harga pelaksanaan Rp 405,-	-	202,65	125,64	-	328,29
Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2001 sesudah Penawaran Umum Terbatas III dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada tanggal 31 Desember 2001	1.200,00	506,62	155,88	145,13	807,63

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Semua saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh termasuk saham baru dalam rangka Penawaran Umum Terbatas III ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lainnya yang telah disetor penuh termasuk hak atas dividen.

Tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal lain sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, mulai tahun buku 2002 Direksi Perseroan merencanakan untuk membayar dividen kas (tunai) sekurang-kurangnya sekali dalam setahun yang besarnya dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dengan tidak mengabaikan kebutuhan permodalan, tingkat kesehatan Perseroan dan kebutuhan dana yang diperlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha. Rencana pembagian dividen akan berkisar antara 20% - 40% dari laba bersih Perseroan.

Kebijakan dividen diatas merupakan kebijakan dividen yang akan diusulkan Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS") yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Juni 2002, dan kebijakan dividen yang diusulkan tersebut baru berlaku setelah disetujui oleh RUPS.

Dalam menghadapi krisis ekonomi yang mengakibatkan perlunya penjaminan oleh Bank Indonesia terhadap dana nasabah, perbankan nasional yang mengikutsertakan dirinya dalam program penjaminan tersebut wajib menyetujui untuk tidak membagikan dividen dalam bentuk tunai (cash dividend) kepada pemegang sahamnya, sepanjang Bank mempunyai kewajiban kepada Pemerintah dan Bank belum memenuhi ketentuan permodalan minimum yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia, kecuali dalam hal Bank telah memenuhi ketentuan permodalan minimum yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia, maka Bank dapat membagikan dividen tunai setelah mendapat persetujuan dari BPPN. Ketentuan-ketentuan ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional No. 1036/BPPN/0401 tanggal 2 April 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 179/KMK.017/2000 tanggal 26 Mei 2000 tentang Syarat, Tata Cara dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

Mengingat Perseroan ikut serta dalam program penjaminan Pemerintah, dengan demikian maka Perseroan wajib tunduk kepada ketentuan diatas.

Sejak Penawaran Umum Perdana pada tahun 1994, Perseroan telah membayar dividen sebagai berikut:

Tahun Buku	Laba Bersih (Rp)	Jumlah Saham	Dividen per saham (Rp)	Jumlah Dividen (Rp)	Dividen Kas terhadap Laba Bersih (%)
1994	13.521.114.244	62.500.000	50,00	3.125.000.000	23,11%
1995	16.527.935.929	62.500.000	100,00	6.250.000.000	37,81%
1996	18.638.698.154	62.500.000	35,00	6.125.000.000	32,86%
1997	24.411.992.455	175.000.000	65,25	11.418.750.000	46,78%
1998	26.310.842.995	549.221.865	12,50	6.865.273.312	26,09%
1999	19.490.567.558	1.098.443.730	5,00	5.492.218.650	28,18%
2000	60.290.000.756	1.215.876.301	15,00	18.238.144.515	30,25%

Halaman ini sengaja dikosongkan

XII. PERPAJAKAN

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2000, tanggal 2 Agustus 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, penerimaan dividen atau bagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan bila perusahaan mempunyai penyertaan 25% atau lebih dan mempunyai kegiatan usaha.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, untuk semua transaksi penjualan saham dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan untuk transaksi penjualan saham pendiri, kecuali saham pendiri perusahaan pasangan usaha yang dimiliki oleh perusahaan modal ventura, ditambah 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan.

Pajak Penghasilan atas dividen diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994, tentang Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan Dana Pensiun yang disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak dari Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman antara lain dalam efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-28/PJ-43/1995 tanggal 22 Mei 1995, perihal Pajak Penghasilan Pasal 23 atas bunga Obligasi dan Dividen yang diterima Wajib Pajak orang pribadi (Seri Pph Pasal 23/Pasal 26 No. 6), maka Bunga Obligasi dan Dividen baik dari saham atau sekuritas, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam Negeri Orang Pribadi dalam tahun 1995 dan seterusnya, dipotong pajak penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.

Dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-05/Pj.10/200 tanggal 1 September 2000.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.42/1993 tanggal 29 Januari 1993 tentang Pajak Penghasilan atas HMETD, apabila Pemegang Saham menjual HMETD, maka hasil penjualan tersebut adalah penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan. Penghasilan dari penjualan HMETD yang diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak luar negeri, selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (with-holding tax) di Indonesia, badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, dan bentuk usaha tetap.

Atas transaksi penjualan saham di Indonesia dikenakan bea materai sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) atas transaksi dengan nilai lebih Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) atas transaksi dengan nilai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Transaksi dengan nilai kurang dari Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dikenakan bea materai.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM TERBATAS III INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM TERBATAS III INI.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Terbatas III ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK

Drs. Robert Yogi

Jl. Majapahit 20, B103-104
Jakarta

Ruang lingkup tugas Akuntan Publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti pendukung dalam pengungkapan laporan keuangan.

KONSULTAN HUKUM

LOU & Mitra

Plaza DM (d/h Plaza Mashill) 2nd Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 25, Jakarta 12190

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum ("Legal Audit") yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Segi Hukum ("Legal Opinion") yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

NOTARIS

Fathiah Helmi, S.H

Jl. Ki Mangunsarkoro No. 77A, Menteng
Jakarta 10310

Ruang lingkup tugas Notaris antara lain membuat perjanjian antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek, dan membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas III Perseroan.

**BIRO ADMINISTRASI EFEK
("BAE")**

PT Sirca Datapro Perdana

Jl. Johar No. 18, Menteng
Jakarta 10340

Ruang lingkup tugas BAE adalah menyiapkan Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), mendistribusikan Sertifikat Bukti HMETD atau HMETD dalam bentuk elektronik kedalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), menerima permohonan pelaksanaan HMETD, dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan Bank yang ditunjuk emiten, melakukan proses penjatahan atas pemesanan pembelian saham tambahan, melaksanakan proses penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI serta melaksanakan proses pengembalian uang pemesanan pembelian saham.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan istimewa dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung (sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang no. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal).

Halaman ini sengaja dikosongkan

XIV. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek (BAE), PT Sirca Datapro Perdana sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka Penawaran Umum Terbatas III ini, sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Penawaran Umum Terbatas III PT Bank NISP Tbk No. 24 tanggal 16 Mei 2002 yang dibuat di depan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.

Berikut ini adalah persyaratan dan tatacara pemesanan pembelian saham:

1. PEMESAN YANG BERHAK

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 27 Juni 2002 pukul 16.00 WIB berhak untuk mengajukan pemesanan pembelian saham baru dalam rangka Penawaran Umum Terbatas III ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 3 (tiga) saham, mempunyai 2 (dua) HMETD untuk membeli sebanyak 2 (dua) saham baru dengan harga penawaran Rp 405,- (empat ratus lima rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham.

Pemesan yang berhak membeli saham baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut atau pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI.

Pemesan dapat terdiri dari Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Hukum Indonesia maupun asing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

2. PENDISTRIBUSIAN HMETD, PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR

a. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 1 Juli 2002 pukul 16.00 WIB. Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) dan formulir lainnya akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

b. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham.

Para pemegang saham yang beralamat di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek) dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE Perseroan pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 28 Juni 2002 sampai dengan 1 Juli 2002 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotocopynya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri.

Perseroan akan mengirimkan paket Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya kepada para pemegang saham yang berada di luar Jabotabek melalui pos tercatat.

Perseroan tidak akan mengirimkan paket tersebut di atas kepada para pemegang saham yang beralamat di Amerika Serikat sehubungan dengan peraturan United States Securities Act 1993 No. 5 yang berlaku di negara tersebut.

3. PENDAFTARAN PELAKSANAAN HMETD

Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa / Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa / Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (exercise) melalui sistem C-BEST sesuai dengan prosedur yang telah

ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa / Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut.
- b. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan daftar pemegang HMETD dalam penitipan kolektip KSEI yang melaksanakan haknya, dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Perseroan.

Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan / BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan / BAE Perseroan selambatnya 4 hari kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (good fund) di rekening Perseroan.

Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat / Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
- b. Asli bukti pembayaran dengan transfer / pemindah-bukuan / giro / cek / tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- c. Fotocopy KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotocopy Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi / Pengurus (bagi Lembaga / Badan Hukum).
- d. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dilampirkan dengan fotocopy KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa.
- e. Apabila pemegang HMETD menghendaki saham hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa :
 - (i) Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam penitipan kolektip KSEI atas nama pemberi kuasa.
 - (ii) Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 2 Juli 2002 sampai 9 Juli 2002 pada hari dan jam kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. PEMESANAN TAMBAHAN

Pemegang saham yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam penitipan kolektip KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 5.000 saham atau kelipatannya.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat / Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa / Bank Kustodian. Sedangkan pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang

tetap menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk warkat / fisik SKS dapat mengajukan sendiri permohonan kepada BAE Perseroan.

1. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat / Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa / Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
 - b. Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam penitipan kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa.
 - c. Fotocopy KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotocopy Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi / Pengurus (bagi Lembaga / Badan Hukum).
 - d. Asli bukti pembayaran dengan transfer / pemindah-bukuan / giro / cek / tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
 - e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.

Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST).
 - b. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.
 - c. Asli bukti pembayaran dengan transfer / pemindah-bukuan / giro / cek / tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
2. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat / Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat / fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
 - b. Fotocopy KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotocopy Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi / Pengurus (bagi Lembaga / Badan Hukum).
 - c. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dilampiri dengan fotocopy KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa.
 - d. Asli bukti pembayaran dengan transfer / pemindah-bukuan / giro / cek / tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 10 Juli 2002 dalam keadaan baik (in good funds). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. PENJATAHAN PEMESANAN TAMBAHAN

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 12 Juli 2002 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas III ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas III ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

6. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas III yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (in good funds) dalam mata uang rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai atau cek, atau bilyet giro, atau pemindahbukuan, atau transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan. Pembayaran harus dilakukan ke rekening Perseroan sebagai berikut:

Bank NISP Gunung Sahari
Jl. Gunung Sahari No. 38, Jakarta 10720
Rekening: Right Issue PT Bank NISP Tbk
No. : 020 - 010 - 63493 - 2

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/ giro yang telah diterima baik (in good funds) di rekening Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 10 Juli 2002.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas III ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian saham akan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap dan ditandatangani. Bagi Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (exercise) dari C-BEST di KSEI melalui pemegang rekening KSEI.

8. PEMBATALAN PEMESANAN SAHAM

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pesanan.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pesanan antara lain:

- a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus;
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

9. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan saham tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang rupiah dengan menggunakan cek atas nama pemesan. Pengembalian uang pemesanan saham tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan, yaitu tanggal 16 Juli 2002 dan dapat diambil di kantor BAE Perseroan pada hari dan jam kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB). Pengambilan cek sesudah tanggal 16 Agustus 2002 hanya bisa dilakukan di kantor Perseroan.

Uang pengembalian pemesanan saham hanya bisa diambil oleh pemesan atau kuasanya dengan menunjukkan asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (bagi perorangan) atau fotocopy Anggaran Dasar (bagi Lembaga/Badan Usaha) serta asli Surat Kuasa yang telah ditandatangani di atas meterai

Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy KTP/ Paspor/ KITAS yang masih berlaku dari pemberi dan penerima kuasa (bagi yang dikuasakan).

Besar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham tersebut dihitung dengan tingkat bunga yang berlaku pada saat pengembalian. Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. PENYERAHAN SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD DAN PENGKREDITAN KE REKENING EFEK

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada rekening efek dalam 4 (empat) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan.

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (in good funds) direkening Perseroan.

Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam penitipan kolektif KSEI selambatnya 5 (lima) hari kerja setelah penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD sesuai hak dapat diambil pada setiap hari kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 9 Juli 2002 sampai 16 Juli 2002, sedangkan SKS baru hasil penjatahan dapat diambil mulai tanggal 19 Juli 2002 sampai 19 Agustus 2002. Pengambilan SKS sesudah tanggal 19 Agustus 2002 dilakukan di kantor Perseroan. Pengambilan SKS tersebut dapat

dilakukan di BAE Perseroan dengan menunjukkan / menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) , atau
- b. Fotocopy Anggaran Dasar (bagi Lembaga / Badan Hukum) dan Susunan Direksi Komisaris atau Pengurus yang masih berlaku.
- c. Asli Surat Kuasa yang sah (untuk Lembaga / Badan Hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dilengkapi dengan fotocopy KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa.
- d. Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian .

11. ALOKASI TERHADAP HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN

Jika saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas III ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan di alokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Bilamana setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham dari jumlah saham yang ditawarkan, sisa saham yang tidak dibeli akan dikembalikan ke dalam portepel Perseroan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

XV. KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas III ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan baik di luar bursa maupun melalui bursa.

1. PEMEGANG SAHAM YANG BERHAK MENERIMA HMETD

Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 27 Juni 2002 pukul 16.00 WIB berhak mendapatkan HMETD. Setiap pemegang 3 (tiga) saham lama akan mendapatkan 2 (dua) HMETD, di mana setiap 2 (dua) HMETD akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan saham biasa atas nama Perseroan.

2. PEMEGANG HMETD YANG SAH

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- Para pemegang saham yang berhak menerima HMETD yang tidak dijual HMETD-nya,
- Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, atau
- Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

3. PERDAGANGAN HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu mulai tanggal 2 Juli 2002 sampai 8 Juli 2002.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu PT Bursa Efek Jakarta dan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam penitipan kolektif di KSEI diperdagangkan di bursa efek, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama bank kustodian atau perusahaan efek di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

4. BENTUK DARI HMETD

Bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham, serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, dan jumlah pemesanan saham tambahan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan rekening efek atas nama bank kustodian atau perusahaan efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

5. PERMOHONAN PEMECAHAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 1 Juli 2002 sampai 4 Juli 2002.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon, yaitu sebesar Rp 1.100,- (seribu seratus rupiah) per Sertifikat Bukti HMETD baru hasil pemecahan. Biaya tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

6. NILAI HMETD

- a. Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.
- b. Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam Penawaran Umum Terbatas III ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Bila harga saham pada tanggal terakhir perdagangan

saham yang mengandung HMETD (Cum HMETD) = Rp C

Harga pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas III

(Exercise Price) = Rp E

Bila setiap pemegang sejumlah L saham lama berhak membeli sejumlah B saham baru, maka jumlah seluruh saham setelah pelaksanaan HMETD adalah L + B.

Dengan demikian harga teoritis saham baru mulai tanggal perdagangan saham yang tidak mengandung HMETD adalah:

$$= \frac{(Rp C \times L) + (Rp E \times B)}{(L + B)}$$

= Rp N

Harga teoritis HMETD = Rp N - Rp E

7. PECAHAN HMETD

Sesuai dengan Peraturan No. IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, maka atas pecahan HMETD tersebut harus dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

8. PENGGUNAAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli saham biasa atas nama yang ditawarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas III. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotocopy. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam penitipan kolektip KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Perseroan mengumumkan informasi penting berkaitan dengan Penawaran Umum terbatas III ini melalui iklan di surat kabar.

1. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 1 Juli 2002 pukul 16.00 WIB. Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) dan formulir lainnya akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.
2. Bagi Pemegang yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham.

Para pemegang saham yang beralamat di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek) dapat mengambil sendiri Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 28 Juni 2002 sampai dengan 1 Juli 2002 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotocopynya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri, pada BAE Perseroan :

PT Sirca Datapro Perdana

Jl. Johar No. 18 menteng, Jakarta 10340

Tlp. (021) 3900645/5920, 3140032 ; Fax. (021) 3900671, 3140185

Sedangkan untuk para pemegang saham yang berada di luar wilayah Jabotabek, Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya akan dikirim oleh BAE Perseroan melalui pos tercatat selambat-lambatnya tanggal 1 Juli 2002.

Perseroan tidak akan mengirimkan paket tersebut di atas kepada para pemegang saham yang beralamat di Amerika Serikat sehubungan dengan peraturan United States Securities Act 1993 No. 5 yang berlaku di negara tersebut.

Apabila sampai dengan tanggal 1 Juli 2002 pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 27 Juni 2001 belum menerima atau mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka segala resiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

XVII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi, para pemegang saham dipersilahkan menghubungi:

PT Bank NISP Tbk.

Jl. Gunung Sahari No. 38, Jakarta 10720

Telp.: (021) 26508400 extention : 334 - 340

Fax.: (021) 6492264, 6006763

Corporate Communication : yani@banknisp.com

Investor Relations : wahyu@banknisp.com

e-mail : nisp@banknisp.com

home page : www.banknisp.com

